

LAPORAN TAHUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN 2016



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ALAN BAJIMINASA NO. 12, TELP 0411 - 873680, FAX 0411-858779

Website : www.dkp.sulselprov.go.id

MAKASSAR

2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dapat tersusun. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan gambaran dan informasi sejumlah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan disela-tahun 2016.

Secara umum program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan pembangunan Kelautan dan Perikanan ditahun 2016 dan masa mendatang.

Disadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari hasil kerjasama yang baik dan terpadu antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu terbitnya Buku Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 diucapkan terima kasih.

Makassar,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. SULKAF .S LATIEF, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630424 198903 1 010

RINGKASAN

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota Makassar terletak antara 0°12' - 8° LS dan diantara 116°48' - 112° 36' BT dengan luas wilayah sekitar 45.764,53 Km², panjang garis pantai 1.937 Km yang terdiri dari 24 kabupaten/kota, 304 kecamatan.

Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan tahun 2016 tercatat sebanyak 8.606.375 jiwa atau meningkat 1,0 % dari tahun 2015. Diantara jumlah penduduk tersebut terdapat tenaga kerja yang mengelola sumberdaya Kelautan dan Perikanan (nelayan, pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran dan Petani Garam) sebanyak 897.577 orang atau 9,5 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 278.165 orang (30,9 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 167.295 orang (18,6 %), Pengolahan dan Pemasaran sebanyak 451.528 orang (50,3 %) dan Pembudidaya garam sebanyak 589 orang (0,07 %)

Untuk mengorganisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik non teknis maupun teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan staf yang cukup dan memiliki integritas yang handal. Pada tahun 2016 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki staf pegawai negeri sipil sebanyak 201 orang.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengacu pada Visi Dinas yaitu Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat.

Pelaksanaan masing-masing sub program dibiayai melalui dana Dekonsentrasi (APBN) sebesar Rp. 9.947.549.000, APBD (Belanja Langsung) sebesar Rp. 69.747.742.155,8. Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi sebesar Rp. 1.194.143.000 dan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp.1.831.495.000

Hasil pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan selama tahun 2016 tercatat total produksi sebesar 3.941.648,8 ton, sedangkan pada tahun 2015 produksi perikanan sebesar 3.786.834,5 ton dimana mengalami peningkatan sebesar 154.814,3 ton atau 4,1 %. Pada tahun 2016 total volume ekspor sebesar 118.256,3 ton turun 15,3 % dari tahun 2015 dan nilai sebesar US \$ 210,3 juta turun 14 % dari tahun 2015.

Sejalan dengan peningkatan produktivitas usaha, maka tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan pada berbagai usaha sebagai berikut: Budidaya KJA Air Laut Rp. 47.844.262, Budidaya Laut (Rumput Laut) Rp. 24.888.684, Budidaya

Tambak Rp. 21.642.503, Budidaya Kolam Rp. 12.447.300, Budidaya KJA Air Tawar Rp. 7.662.719 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 24.396.606 dan nelayan perairan umum Rp. 23.032.704.

Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun masyarakat Sulawesi Selatan tahun 2016 tercatat sebanyak 52,5 kg/kapita/tahun (naik 5,6%).

Sekaitan dengan pelayanan baik dalam memanfaatkan asset pemerintah maupun bentuk jasa yang dilakukan, maka dengan mengacu pada perda-perda yang ada, besarnya pendapatan asli daerah sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 tercatat Rp1.276.687.404,- (105,6 %) dari target Rp. 1.209.025.000.-



DAFTAR ISI

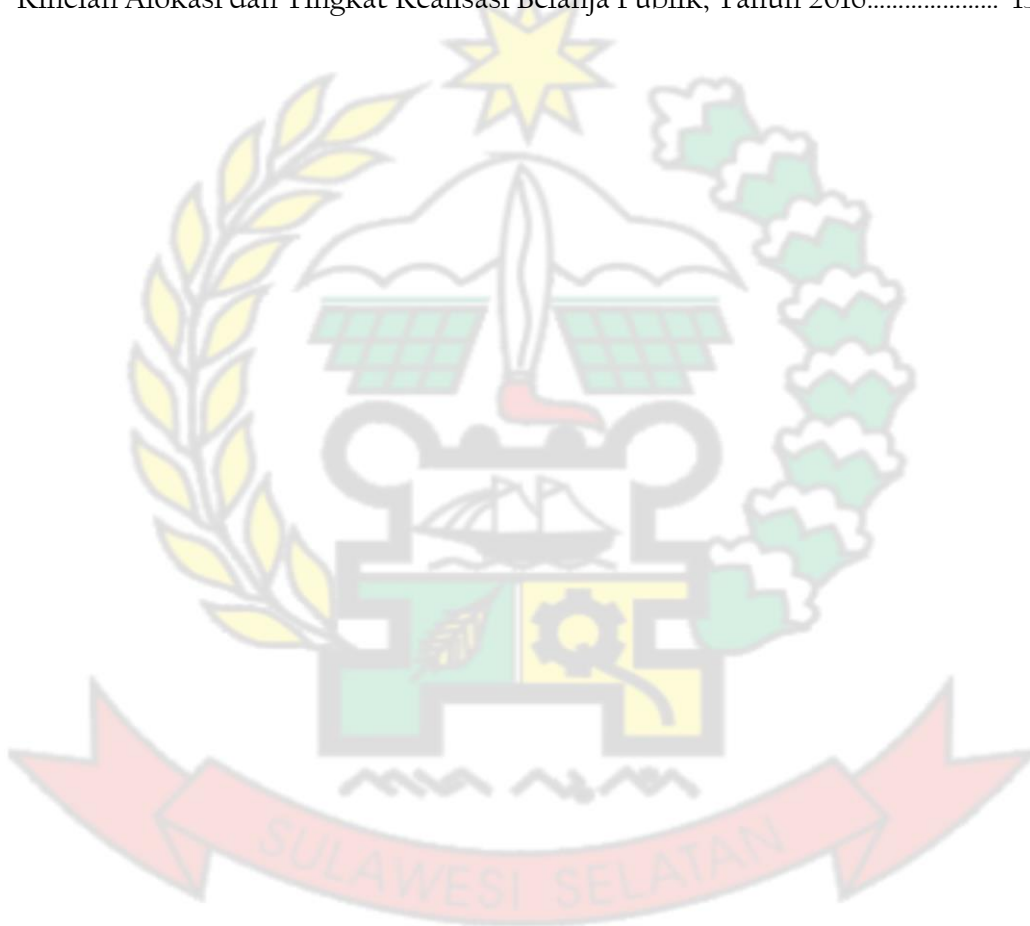
	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN.....	3
2.1. Keadaan Geografis	3
2.2. Demografi	3
2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan	4
a. Perikanan Tangkap	4
b. Perikanan Budidaya	4
c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan.....	4
d. Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan.....	5
e. Pengujian Mutu Hasil Perikanan.....	6
f. Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap.....	8
g. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar.....	9
h. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan pantai.....	10
III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	 13
3.1. Struktur Organisasi.....	13
3.2. Kepegawaian.....	15
3.3. Aset Pemerintah	17
3.4. Keuangan.....	17
a. Belanja Aparatur	17
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	17
IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI SULAWESI SELATAN	 18
4.1. Tujuan dan Sasaran	18
a. Tujuan.....	18
b. Sasaran.....	18
4.2. Kebijakan dan Program Strategis	19
a. Kebijakan Strategis	19
b. Program Strategis	19
4.3. Sumber Pembiayaan	25
4.3.1. Dana Dekonsentrasi	25
4.3.2. Dana Tugas Pembantuan	25
4.3.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	26
4.3.4. Dana Daerah	26
a. Belanja Langsung	27
b. Belanja Tidak Langsung	27

4.4.	Kegiatan Pembangunan	28
4.4.1.	Perikanan Budidaya.....	28
a.	Kegiatan Budidaya Laut dan Payau	28
b.	Kegiatan Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum.....	31
c.	Kegiatan Sarana dan Prasarana Budidaya	34
4.4.2.	Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40
a.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40
b.	Seksi Kelautan dan Konservasi.....	57
c.	Seksi Perikanan Tangkap.....	68
4.4.3.	Pengawasan dan Pengendalian SDKP.....	80
a.	Sarana dan Prasarana Pengawasan.....	80
b.	Penataan dan Penegakan Hukum SDKP.....	98
c.	Pengembangan SDM Pengawasan SDKP	113
4.4.4.	Bina Usaha dan Kelembagaan.....	148
a.	Pembinaan Mutu dan Pemasaran	148
V.	HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN	154
5.1.	Ekonomi	154
5.1.1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.....	154
5.1.2.	Produksi Perikanan.....	154
a.	Budidaya	154
b.	Penangkapan.....	157
5.1.3.	Konsumsi Ikan	157
5.1.4.	Pemasaran.....	157
5.1.5.	Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya.....	157
5.1.6.	Tenaga Kerja	158
5.2.	Proyek dan Pembiayaan	158
5.2.1.	Dekonsentrasi (APBN).....	158
5.2.2.	Provinsi.....	159

DAFTAR TABEL

1. Capaian Kinerja Laboratorium UPTD PPSKI Pangkep Tahun 2016.....	5
2. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan oleh UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	7
3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan, Tahun 2016	8
4. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016	13
5. Susunan Organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016	14
6. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 dan 2016	15
7. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2016.....	16
8. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2016.....	16
9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016	17
10. Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2016.....	26
11. Laporan Hasil Produksi Penerima Paket Bantuan Benur, Nener, Pakan Saponin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Udang dan Bandeng).....	28
12. Laporan Hasil Produksi Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Perikanan (Udang Vannamei) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	29
13. Laporan Hasil Produksi Penerima Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	29
14. Alokasi Paket Budidaya Air Tawar yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2016.....	32
15. Perkembangan Sertifikasi CBIB Periode Tahun 2016.....	36
16. Daftar Nama-Nama Manajer Pengendali Mutu (MPM) pada Unit Perbenihan di Sulawesi Selatan Sampai Tahun 2016.....	37
17. Daftar Unit Pembenihan yang Bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) Di Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	38
18. Hasil Monitoring dan Surveillance OIKB pada Distributor & Toko/Depo Obat Ikan – DKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	39
19. Kegiatan Pemeriksaan Kapal selama Gelar Operasi di Kabupaten Bone.....	100

20. Kegiatan Pemeriksaan Kapal selama Gelar Operasi di Kabupaten Pinrang.....	101
21. Kegiatan Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman di Perairan Kabupaten Pangkep.....	109
22. Kegiatan Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman di Perairan Kotamadya Makassar.....	109
23. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2016.....	154
24. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Masing-Masing Satuan Kerja, Tahun 2016.....	158
25. Rincian Alokasi dan Tingkat Realisasi Belanja Publik, Tahun 2016.....	159



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Peta Wilayah Penangkapan Udang, Tuna, dan Rumput Laut.....	164
2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Subsidi Pengembangan SDM Pengawasan KP Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	165
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2015	166
4. Rekapitulasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Sektor Kelautan dan Perikanan UPT Pelayanan Perizinan BKPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	167
5. Rekapitulasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Sektor Kelautan dan Perikanan UPT Pelayanan Perizinan BKPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	168
6. Rekapitulasi Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) Sektor Kelautan dan Perikanan UPT Pelayanan Perizinan BKPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	169
7. Rekapitulasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengumpul, Penampung, Pengolah, dan Pemasaran Hasil Perikanan UPT Pelayanan Perizinan BKPM provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	170
8. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	172
9. Data Koperasi Penerima Kapal APBN Tahun Anggaran 2016.....	173
10. Data Penyerahan Kapal yang diberikana Kepada Kelompok Nelayan Melalui Program Taskin (APBD) Tahun 2016	173
11. Daftar Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan	174
12. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Udang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	175
13. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	175
14. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	175
15. Rekapitulasi Jumlah Pokmaswas Aktif Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pokmaswas sampai dengan Desember Tahun 2016.....	176
16. Data SDM PPNS Perikanan yang Aktif di Bidang Pengawasan SDKP Kab/Kota dan Prov, Hasil Pembinaan Seksi Pengembangan SDM Pengawasan KP Tahun 2016.....	177
17. Data SDM Pengawas Perikanan yang berkedudukan di UPT Pusat (Pos PSDKP Kab/Kota) Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	178
18. Produksi Benih dan Jumlah Induk pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Payua La'joa Soppeng 2016.....	179
19. Data Produksi Pembenihan Udang Windu pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai tahun 2016.....	180
20. Daftar Unit Pengolahan Ikan/Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	182

21. Kegiatan Monitoring Formalin Tahun 2016.....	188
--	-----



I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah pula memberikan kewenangan otonomi bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai kebutuhan serta sumberdaya yang dimiliki demi kemakmuran rakyatnya.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonomi telah membenahi diri untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada diantaranya adalah sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan kedepan tetap diarahkan pada visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu “Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat” sedangkan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu “ 1) Meningkatkan Kualitas Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, 2) Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan, 3) Meningkatkan Daya Saing daerah dan Sinergitas Regional, Nasional dan Global, 4) Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan serta Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Hal ini untuk mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu *Pro-Poor* (Pengentasan kemiskinan), *Pro-Job* (Penyerapan Tenaga Kerja), *Pro-Growth* (Pertumbuhan) dan *Pro-Sustainability* (Keberlanjutan), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi dibidang kelautan dan perikanan (*Pro-Business*).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan melalui pendekatan sektor kegiatan yang meliputi (1) Perikanan Budidaya, (2) Perikanan Tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil (3) Kelembagaan dan Usaha Perikanan, dan (4) Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap

diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Sulawesi Selatan bersumber dari usaha perikanan penangkapan (Laut & Perairan Umum) dan usaha perikanan budidaya (Laut, Tambak, Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan upaya penangkapan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan ke depan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu optimalisasi dan pengembangan kegiatan produksi, peningkatan daya saing melalui penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan, dan pengembangan mekanisme dan jaringan pemasaran. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Sejalan dengan Arah dan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2016 yaitu Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan dan Pengembangan Kerjasama Daerah dan Daya Saing Daerah. Kegiatan usahanya meliputi budidaya rumput laut, pengolahan, penangkapan dan perbengkelan. Beberapa kegiatan di daerah yang juga mendukung usaha pemberdayaan tersebut seperti Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, P2HP, dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Peningkatan Kesempatan Kerja, pengembangan daya saing dan ekspor, Revitalisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kelautan, dan Akselerasi.

Pengamanan sumberdaya ikan akibat dari eksploitasi yang berlebihan dilakukan melalui perlindungan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berencana dan berkelanjutan terutama di perairan pantai yang ditandai telah padat tangkap. Melalui cara tersebut diharapkan jaminan ketersediaan sumberdaya ikan dapat dipertahankan secara berkesinambungan guna mendukung pembangunan di daerah Sulawesi Selatan.

II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

2.1. Keadaan Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota di Makassar terletak antara $0^{\circ} 12' - 8'$ Lintang Selatan dan di antara $116^{\circ} 48' - 122^{\circ} 36'$ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sulawesi Barat
- Sebelah Timur : Teluk Bone dan Prov. Sulawesi Tenggara
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- A. Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 46.083,94 Km², secara administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 Kabupaten dan 3 kota yang terdiri dari 304 kecamatan. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.365,51 Km² atau luas kabupaten tersebut merupakan 15,98 % dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 sungai. Aliran sungai terbanyak terdapat di kabupaten Luwu, yaitu 25 aliran sungai. Sungai Saddang adalah sungai terpanjang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 Km.

Di Sulawesi Selatan terdapat 5 (lima) danau yakni Danau Tempe, Sidenreng dan Lapompak yang masing-masing berada di Kabupaten Wajo, Sidrap dan Soppeng serta Danau Matano dan Towuti di Kabupaten Luwu Timur.

2.2. Demografi

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2016 tercatat sebanyak 8.606.375 jiwa, dimana dari total jumlah penduduk Sulawesi selatan tersebut sekitar 897.577 jiwa yang terdiri dari 167.295 jiwa adalah nelayan, 278.165 jiwa adalah pembudidaya ikan, 451.528 jiwa adalah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan 589 jiwa adalah pembudidaya garam. Komposisi jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Lampiran 3.

2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah prasarana perikanan tangkap yang berfungsi untuk menunjang kegiatan bongkar muat hasil perikanan. Pada prasarana tersebut terdapat sarana penunjang yakni tempat pemasaran ikan, tempat kapal bersandar, perkantoran, gedung pertemuan dan tempat perbengkelan.

Di Sulawesi Selatan sampai tahun 2016 terdapat 21 unit PPI yang terdapat di 18 Kabupaten/kota yang masih sementara kondisinya rata-rata baik, namun pembangunan prasarana pelabuhan perikanan /pangkalan pendaratan ikan terus menerus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nelayan, yang merupakan kelanjutan pemasaran hasil tangkapan dan distribusi untuk mendukung kegiatan agribisnis pada sektor kelautan dan perikanan.

b. Perikanan Budidaya

Prasarana utama pada kegiatan budidaya adalah saluran irigasi baik untuk irigasi tambak maupun irigasi kolam/Mina Padi (sawah). Selama ini Dinas Perikanan dan Kelautan baru menangani irigasi tambak sedangkan untuk irigasi kolam/Mina Padi (sawah) dilakukan oleh Dinas Pengairan.

c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan

Di Sulawesi Selatan ada dua jenis sarana pengolahan/pengawetan hasil perikanan yakni bersifat modern dan tradisional (konvensional), kedua jenis usaha tersebut memiliki segmen pasar yang hampir sama. Untuk pengolahan modern hampir sebagian besar dipasarkan ke luar negeri (ekspor), sedangkan yang konvensional pasarnya dalam negeri dan luar negeri.

Pengolahan modern meliputi produk segar (udang, ikan dan kepiting), beku (Udang, ikan, kepiting, paha kodok), kering (sirip ikan hiu, rumput laut, telur ikan terbang dan teripang), olahan (rumput laut dan kepiting), sedangkan tradisional meliputi produk asap (ikan), kering (cumi, ikan dan rumput laut), pindang (ikan), terasi (ikan) dan peda (ikan). Unit pengolahan yang mendukung dapat dilihat pada lampiran 20

d. Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan

Usaha budidaya ikan telah berkembang sejak tahun 1980-an, terutama budidaya air tawar dan air payau, kemudian diikuti dengan kegiatan budidaya laut, namun demikian pengalaman menunjukkan bahwa usaha budidaya baik ikan air tawar, payau maupun laut sering mengalami kegagalan oleh adanya kendala biologis yang berupa serangan wabah hama dan penyakit ikan yang hingga saat ini sebagian permasalahan tersebut belum dapat diatasi. Penyebabnya antara lain terbatasnya pengetahuan petani menyangkut penyakit ikan dan belum tersedianya atau terbatasnya teknologi efektif dan praktis dalam pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit ikan. Namun demikian pemerintah melalui UPTD Kesehatan Ikan telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan dan melakukan sosialisasi kepada pembudidaya untuk melakukan pemeriksaan benih/bibit/benur sebelum dilakukan penebaran sehingga mendapatkan kualitas benih/bibit/benur yang baik.

Bentuk kegiatan yang merupakan penjabaran dari upaya meningkatkan produktivitas dan produksi dalam pengembangan budidaya ikan di Sulawesi Selatan, yaitu Pembinaan Kesehatan Ikan dan Sertifikasi Sarana Perikanan, yang pelaksanaannya mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Identifikasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan maupun Residu OIK
2. Pemeriksaan Laboratorium terhadap produk dan sarana perikanan dan upaya pencegahan penyebaran penyakit
3. Peramalan terhadap kemungkinan adanya serangan hama dan penyakit.
4. Pemberian rekomendasi teknologi penanggulangan hama dan penyakit.
5. Pemberian penilaian standarisasi, labelisasi dan sertifikasi benih dan sarana produksi lainnya.

Tabel 1. Capaian Kinerja Laboratorium UPTD PPSKI Pangkep Tahun 2016

No	Bulan	Laboratorium Uji		
		Bio Molekuler	Mikrobiologi	Kualitas Air
1	Januari	-	2	7
2	Februari	8	28	48
3	Maret	9	31	64
4	April	11	15	85
5	Mei	9	28	109
6	Juni	4	16	41

No	Bulan	Laboratorium Uji		
		Bio Molekuler	Mikrobiologi	Kualitas Air
7	Juli	-	3	7
8	Agustus	2	52	254
9	September	9	83	389
10	Oktober	6	64	143
11	November	31	17	30
12	Desember	47	47	114
	Total	136	386	1.291

Sumber : UPTD Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan Pangkep

Kendala yang dihadapi pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan Pangkep antara lain :

1. Keberadaan Laboratorium yang belum menghasilkan pemeriksaan yang optimal terhadap deteksi ikan, karena belum sepenuhnya peralatan yang dimiliki.
2. Kemampuan SDM yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga lebih profesional dan permanen
3. Masih rendahnya koordinasi dan konsolidasi terhadap lembaga terkait tentang pengendalian penyakit ikan di Sulawesi Selatan, karena masih terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi.
4. Ruang Laboratorium yang masih terbatas
5. Terbatasnya bahan uji
6. Kurangnya dukungan dana untuk kegiatan surveillance
7. Sarana Kantor yang sering mengalami banjir

e. Pengujian Mutu Hasil Perikanan

UPTD Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD BPPMHP) telah di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sebagai Laboratorium Penguji dengan Nomor Akreditasi No LP-094-IDN dengan ruang lingkup parameter pengujian berupa Angka Lempeng Total, E. Coli, Salmonella SP, V. Cholera, V. Parahaemolyticus, Staphylococcus, Histamin, Logam Berat (Hg, Pb, Cd), kloramphenicol, Organoleptik, Kadar Air dan Kadar Abu. Pada Bulan Desember Tahun 2012 UPTD BPPMHP di Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Lembaga Inspeksi Type A dengan Nomor Akreditasi No. LI-052-IDN.

Selama tahun 2016 UPTD BPPMHP Makassar menerbitkan Sertifikat Hasil Uji sebanyak 299 Sertifikat dan telah melakukan pengujian sampel sebanyak 4.797

sampel. Target PAD pada tahun 2016 UPTD BPPMHP Makassar sebesar Rp. 500.000.000 sedangkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sebesar Rp. 416.007.404 dengan persentase capaian sebesar 83,20 %.

Tabel 2. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan Oleh UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2016

No	Parameter	Jenis Pengujian		
		Test Result (TR)	Monitoring	Total Pengujian Tahun 2016
	Organoleptik			
1	Uji Sensori	10	0	10
	Kimia			
2	Histamin	111	0	111
3	Chloramphenicol	88	0	88
4	Logam Berat			
	- Pb	232	0	232
	- Hg	232	0	232
	- Cd	232	0	232
5	Tetracyclin	217	0	217
6	Formalin	2	141	143
7	TVB-N	40	0	40
8	Nitrofurantoin	125	0	125
	Mikrobiologi			
1	ALT	257	0	257
2	ALT (Kualitas Air)	11	0	11
3	E. Coli	53	150	203
4	Coliform	25	0	25
5	E. Coli dan Coliform (Kualitas Air)	18	0	18
6	Salmonella	67	150	217
7	Vibrio cholerae	214	150	364
8	Vibrio parahaemolyticus	100	0	100
9	Staphylococcus aureus	91	0	91
10	Listeria monocytogenes	59	0	59
11	Kapang dan Khamir	2	0	2
12	Enterococci	4	0	4
			Total	4.797

Sumber : UPTD PPMHP

Ket : Test Result : Pengujian berdasarkan permintaan Pelanggan

Monitoring : Pengujian Monitoring Formalin dan Bakteri Pathogen di Kab/Kota

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2016

No	Target	Bulan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	500.000.000	Januari	50.157.404	10,03
2		Februari	60.650.000	12,13
3		Maret	21.250.000	4,25
4		April	20.300.000	4,06
5		Mei	22.750.000	4,55
6		Juni	34.300.000	6,86
7		Juli	26.900.000	5,38
8		Agustus	71.800.000	14,36
9		September	18.100.000	3,62
10		Oktober	25.350.000	5,07
11		November	17.250.000	3,45
12		Desember	47.200.000	9,44
TOTAL			416.007.404	83,20

Sumber : UPTD BPPMHP

f. Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap yang bernaung dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi khusus bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap secara nyata telah menunjukkan kegiatan yang berbasis kemasyarakatan dengan tujuan menyentuh masyarakat nelayan skala kecil sampai menengah sehingga peningkatan usaha dapat tercapai dan secara langsung akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan sebagai ujung tombak dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Permasalahan yang terdapat pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap selama tahun 2016 yaitu :

- ◆ Terdapat kegiatan yang lamban dalam pengerjaan oleh pihak ketiga karena cuaca yang ekstrim tetapi akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
- ◆ Kurangnya perhatian nelayan penerima dalam memperbaiki alat setelah dioperasikan di lapangan sehingga bila ada kerusakan nelayan malas memperbaiki.

- ◆ Lemahnya pengawasan terhadap pendistribusian alat yang diserahkan ke kabupaten
- ◆ Dukungan biaya operasional nelayan dalam menjalankan usahanya masih minim sehingga perlu adanya stakeholder
- ◆ Masih banyak masyarakat nelayan yang enggan menerapkan pasca panen yang baik pada saat mendapatkan hasil tangkapan sehingga mutu hasil tangkapan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holder.
- ◆ Masih banyak nelayan yang mengambil jalan pintas dengan melakukan penangkapan ilegal fishing (Bom dan Bius).

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan tangkap yaitu :

- Senantiasa melakukan pembinaan kepada nelayan oleh tenaga pendamping ataupun penyuluh perikanan lapangan untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait.
- Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang diberikan secara bertahap setiap tahun agar diawasi pendistribusiannya agar penerima benar-benar pelaku usaha perikanan.
- Nelayan lebih proaktif menggalang dana, agar tidak terfokus mengharap bantuan modal dari pemerintah dengan berkoordinasi dengan KKMB Kabupaten
- Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat oleh instansi terkait.
- Perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari pihak pemerintah untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada nelayan.
- Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat oleh instansi terkait.

g. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar

Salah satu rangkaian dalam siklus budidaya perairan tawar adalah perbenihan ikan air tawar. Perbenihan ikan air tawar memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai penyedia sarana produksi berupa benih ikan. Keberadaan perbenihan ikan air tawar sebagai pendukung budidaya seperti pemeliharaan ikan dikolam, tambak, mina padi, air deras serta pemanfaatan perairan umum seperti keramba jaring apung dan lainnya.

Hal tersebut diatas, merupakan acuan bagi UPTD PPBAT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun program kegiatan dalam kurun waktu tahun anggaran 2016. Disamping tugas dan fungsi sebagai pembinaan dan

pengembangan budidaya ikan air tawar di Sulawesi Selatan, juga diberikan tugas perbantuan sebagai pengumpul PAD berupa retribusi penjualan benih ikan air tawar. Pada Tahun 2016 UPTD PPBAT diberikan target PAD sebesar Rp. 160.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 160.200.000 dengan rincian Rp. 150.200.000 dari hasil penjualan benih ikan dan Rp. 10.000.000 dari hasil penjualan pembesaran ikan.

Kegiatan budidaya ikan air tawar yang dilaksanakan oleh UPTD PPBAT meliputi:

- Pembenuhan ikan air tawar meliputi Ikan Mas, Nila.
- Pembesaran ikan untuk calon induk dikolam pemeliharaan meliputi jenis ikan Mas, Nila, dan Ikan Patin
- Kerjasama petani sawah pemeliharaan ikan mas dengan penebaran benih umur seminggu, memanfaatkan waktu musin palawija (80 hari)
- Pembesaran ikan disawah dengan sistem kemitraan dengan petani sawah
- Pembesaran Ikan Nila, Mas, Lele ditambah bekas udang windu dan bandeng yang masih memiliki salinitas dibawah 5 permil
- Restocking perairan umum seperti danau, waduk, sungai dan rawa

Permasalahan yang dihadapi oleh UPTD PPBAT selama tahun 2015 yaitu :

- Permintaan benih ikan di luar kabupaten Soppeng semakin banyak sementara kendaraan pengangkut benih yang dimiliki UPTD PPBAT sudah tua yang memerlukan biaya operasional yang tinggi
- UPTD PPBAT setiap tahun digunakan sebagai tempat magang, praktek lapang, field trip namun tidak dilengkapi dengan tempat ibadah

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh UPTD PPBAT yaitu :

- Perlu adanya pengadaan kendaraan operasional pengangkut benih ikan yang baru sehingga lebih memperlancar pemasaran ikan ke daerah yang jaraknya jauh dari Lajoa Soppeng
- Perlunya adanya pembangunan tempat ibadah walaupun itu hanya mushallah yang berukuran kecil.

h. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai

UPTD Pembinaan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai merupakan pilar untuk pengembangan usaha budidaya laut dan pantai di Sulawesi Selatan dan

mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 bersumber dari hasil penjualan pembesaran (tambak) Rp. 18.090.000, Hasil penjualan Benur Vannamei Rp. 17.520.000, Hasil Penjualan Benur Udang Windu Rp. 59.640.000 dan Hasil Penjualan Ikan Baronang dan Bandeng (KJA) Rp. 6.500.000 sehingga total PAD tahun 2016 sebesar Rp. 101.750.000

Adapun beberapa permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi oleh UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai selama Tahun 2016 yaitu :

a. Ketatausahaan

- ✦ Belum Profesionalnya tenaga ketatausahaan
- ✦ Tenaga ketatausahaan hanya dimonopoli tenaga honorer sehingga penanggung jawab yang terkait bidang-bidang tertentu yang harus ditangani oleh pegawai terpaksa tumpang tindih tanggung jawabnya.
- ✦ Belum tercovernya pekerjaan secara baik dan benar
- ✦ Tugas Pokok dan fungsi perlu diterapkan dengan baik dan benar

Upaya Pemecahan

- ✦ Tenaga yang ada perlu dimaksimalkan dan difokuskan atau menambah tenaga ketatausahaan.
- ✦ Penambahan tenaga ketatausahaan yang berpengalaman atau tenaga kontrak yang mempunyai latar belakang pendidikan spesialis
- ✦ Perlu penambahan tenaga organik atau PNS untuk bidang teknis
- ✦ Perlu aplikasi Tugas pokok dan fungsi yang benar

b. Pelatihan dan Pembinaan

Upaya yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pelatihan budidaya tambak dan laut tahun 2016

- ✦ Mengidentifikasi permasalahan dilapangan.
- ✦ Pemantauan kegiatan budidaya udang ditambah.
- ✦ Membantu petani dilapangan tentang persiapan lahan yang baik, memilih bibit/benur yang baik.
- ✦ Mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap petani tambak penggelondongan, dan pelaku usaha Hachery maupun backyard.

- ✦ Mengadakan studi banding yang berkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha Hatchery maupun Backyard.

c. Teknologi Budidaya

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam masa produksi perbenihan udang adalah sebagai berikut :

- ✦ Sumber air laut kurang bagus akibat adanya perubahan cuaca dari pergantian musim kemarau ke musim hujan yang menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit baik virus maupun bakteri
- ✦ Belum adanya jaminan induk bebas virus dan penyakit sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas nauplius yang dihasilkan sehingga tidak dapat memproduksi PL dengan baik

Upaya yang dilakukan dalam rangka penyediaan benur tahun 2016 :

- ✦ Pengadaan Nauplius Udang Vannamei
- ✦ Pengadaan Induk Udang Windu
- ✦ Pengadaan Nauplius Udang Windu
- ✦ Penyediaan pakan alami
- ✦ Penyediaan Pakan buatan
- ✦ Perbaikan sarana dan prasarana produksi

III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 08 Tahun 2008, tanggal 28 Juli 2008 Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan susunannya sebagai berikut :

Tabel 4. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Ir. Sulkaf S. Latief, MM	19630424 198903 1 010	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Sekretaris	Ir. A.Chairil Anwar, MM	19620925 198903 1 015	Pembina Tk. I (IV/b)
	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	Ir. Alimuddin	19660908 199903 1 004	Penata Tk. I (III/d)
	Ka. Subag Keuangan	Drs. Syarifuddin, S.Pi	19590423 197812 1 001	Pembina (IV/a)
	Ka. Subag Program	Ir. Ign Eko Susetiyo, MM	19660101 199503 1 005	Pembina (IV/a)
3	Ka. Subdin Perikanan Budidaya			
	Kasie. Budidaya Laut dan payau	Ir. Hardi Haris, MM	19650816 199403 1 008	Pembina (IV/a)
	Kasie Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum	Ir. Ibrahim Rumbi, MM	19670223 199803 1 005	Pembina (IV/a)
	Kasie Sarana dan Prasarana Budidaya	Ir. Muhammad Madja	19640507 199303 1 008	Penata Tk.I (III/d)
4	Ka. Subdin Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dr. Ir. Muh. Natsir Mallawi, M.Si	19620327 199103 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Andi Mei Agung, S.ST.Pi	19780530 200312 1 006	Penata (III/c)
	Kasie Perikanan Tangkap	Muh. Gemuruh, S.Pi	19610531 198303 1 006	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Kelautan dan Konservasi	Ir. A. Mallombassi Mappewali	19670118 199603 1 002	Penata Tk. I (III/d)
5	Kasubdin Bina Usaha dan Kelembagaan	Ir. Abd. Hafid Mallewa	19611102 198903 1 012	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ir. Arni Mahmud, MM	19640316 199203 2 004	Pembina (IV/a)
	Kasie Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan	Ir. A. Mustamin, M.Si	19651231 199803 1 003	Pembina (IV/a)
	Kasie Pembinaan Usaha	Ir. Lyna Indriati, M.Si	19590719 199003 2 001	Pembina (IV/a)

Lanjutan.....

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1	2	3	4	5
6	Kasubdin Perlindungan Pengawasan dan Pengendalian	Ir. Miftahuddin	19630531 198903 1 015	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie Penataan dan Penegakan Hukum	Ir. Abd. Khalik, MM	19650509 199903 1 004	Pembina (IV/a)
	Kasie. Pengembangan SDM Pengawasan	Ir. Masnia T	19620313 199101 2 001	Pembina (IV/a)
	Kasie. Sarana dan Prasarana Pengawasan	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian

Tujuan dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada Pergub Nomor 40 Tahun 2008.

Susunan organisasi tersebut di atas juga dilengkapi dengan 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana langsung kegiatan teknis di daerah. UPTD dalam melaksanakan tugas berbeda dengan subdinas teknis dan dibawah pimpinan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun UPTD yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Susunan Organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1	2	3	4	5
1	Kepala Unit Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi dan Perikanan Tangkap	Ir. H. Bahtiar Lewa, MT	19640816 199003 1 013	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Ir. Muh. Usman, MM	19660418 199803 1 009	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Teknologi Sarana dan Prasarana Perikanan	Ir. St. Syahtirah Syam	19659617 199803 2 002	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Teknologi Mekanisasi Kapal Perikanan dan Kesehatan Kerja	Ir. Husni Husain	19651112 199212 1 001	Penata Tk. I (III/d)
2	Kepala Unit Pengelolaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	St. Zaleha Soebarini, S.Pi, M.Si	19670913 199103 2 016	Pembina (IV/a)
	Kasubag Tata usaha	Ir. Rosdiana, MM	19670116 199503 2 002	Pembina (IV/a)
	Kasi Standarisasi dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Sukmawati Gaffar, S.ST.Pi	19730331 199803 2 009	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Teknologi Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Ir. Abdul Azis, M.Si	19661231 199903 1 030	Penata Tk. I (III/d)
3	Kepala Unit Pembenihan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai	Ir. Amri Tjoneng, MM	19640421 199102 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Mas'ud Banas, S.Pi	19580307 197812 1 002	Penata Tk. I (III/d)

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/ Golongan
1	2	3	4	5
	Kasie Pembinaan dan Pelatihan	Sahabuddin, S.Pi	19681911 200003 1 004	Pembina (IV/a)
	Kasie Teknologi Budidaya Laut dan pantai	Deppalana, S.Pi, MM	19740605 199803 1 007	Penata Tk I (III/d)
4	Kepala Unit Pembinaan Kesehatan dan Sertifikasi Sarana Perikanan	Ir. Basri Hamal, MP	19650508 199103 1 017	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Febrian Budianto, S.Pi, MM	19730201 199903 1 013	Pembina (IV/a)
	Kasie Analisis Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Ir. Wahyuni, S.Pi, MM	19641005 199103 2 012	Pembina (IV/a)
	Kasie Standarisasi dan Sertifikasi Sarana Perikanan	Muh. Ridha, S.Pi, M.Si	19680615 199803 1 013	Pembina (IV/a)
5	Kepala Unit Pembenihan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Ir. Syafaruddin, MM	19640605 199003 1 007	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Nursalam, S.Pi	19710601 200003 1 006	Penata (III/c)
	Kasie Teknologi Perbenihan Air Tawar	-	-	-
	Kasie Pembinaan dan pelatihan	Handayani Pratiwi, S.Pi	19700621 200701 2 019	Penata Muda Tk I (III/b)

Sumber : Subag Kepegawaian

3.2. Kepegawaian

Pada tahun 2016 tercatat jumlah pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 201 orang turun 2,4 % bila dibandingkan dengan tahun 2015.

Adapun jumlah komposisi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 dan 2016

Tingkat/Gol	Tahun				(%)
	2015	%	2016	%	
IV	29	14,1	29	14,4	-
III	144	69,9	139	69,2	(3,5)
II	29	14,1	29	14,4	-
I	4	1,9	4	1,9	-
Jumlah	206	100	201	100	(2,4)

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian

Tabel 7. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2016

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama/ IV e	0	0	0
2	Pembina Utama Madya/ IV d	0	0	0
3	Pembina Utama Muda / IV c	1	0	1
4	Pembina Tingkat I / IV b	8	1	9
5	Pembina/ IV a	13	6	19
6	Penata Tingkat I/ III d	15	18	33
7	Penata/ III c	27	28	55
8	Penata Muda Tingkat I / III b	17	22	39
9	Penata Muda / III a	6	8	14
10	Pengatur Tingkat I / II d	6	0	6
11	Pengatur / II c	10	5	15
12	Pengatur Muda Tingkat I / II b	3	0	3
13	Pengatur Muda/ II a	4	0	4
14	Juru Tingkat I / I d	0	0	0
15	Juru/ I c	0	1	1
16	Juru Muda Tingkat I / I b	0	0	0
17	Juru Muda/ I a	2	0	2
Total		112	89	201

Sumber : Subag Kepegawaian

Tabel 8. Rekapitulasi PNS Berdasar Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2016.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	2	0	2
2	S2	25	16	41
3	S1	41	58	99
4	D.IV	11	7	18
5	D.III	8	1	9
6	D.II	1	0	1
7	D.I	0	0	0
8	SMA	20	6	26
9	SMP	2	1	3
10	SD	2	0	2
Total		112	89	201

Sumber : Subag Kepegawaian

3.3. Keuangan

a. Belanja Aparatur

Belanja aparatur digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tambahan Penghasilan dan Intensif Pungutan Retribusi Daerah pada tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan

sebesar Rp. 18.188.149.265,- terjadi kenaikan sebesar 10,2 % bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp. 16.498.236.542,-, Realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 16.815.795.645,- atau 92,45 %.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan juga menangani PAD, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa obyek pajak.

Untuk tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 1.209.025.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.276.687.404 atau 105,6 %. Adapun sumber dan target besarnya PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016

NO	Uraian	Dasar Hukum	Target	Realisasi
1	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	Perda No. 1 Tahun 2013	2.778.000.000	2.167.625.412
	- Sertifikat Mutu Ekspor dan Surat Keterangan Asal			
	➤ UPTD LPPMHP Makassar		2.634.000.000	1.998.771.412
	➤ Lab. Kesehatan Ikan Pangkep		14.000.000	77.729.000
	- Kerjasama Sewa Tambak		110.000.000	68.050.000
	- Sewa Rumah Dinas		20.000.000	23.075.000
2	<i>Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemerintah Prov. Sulsel</i>	Perda No. 4 Tahun 2008	50.000.000	78.285.000
3	<i>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</i>	Perda No. 3 Tahun 2008	172.000.000	169.950.000
	- Penjualan Benih Ikan dan Udang		172.000.000	285.310.000
TOTAL			1.209.025.000	1.276.687.404

Sumber : Subag Keuangan

IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Sesuai dengan Visi dan Misi, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan sesuai dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi (Penguatan Kelembagaan dan kesejahteraan Sosial)
2. Meningkatkan kelestarian lingkungan
3. Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global
4. Meningkatkan lapangan pekerjaan usaha perikanan yang berkeadilan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
5. a. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa
b. Mewujudkan pemerintahan yang baik

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan
2. Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
3. Meningkatnya perlindungan fungsi lingkungan dan penanganan dampak lingkungan hidup.
4. Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar jawa
5. a. Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan Perikanan
b. (1). Terwujudnya kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
(2). Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib
(3). Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
(4). Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal

4.2. Kebijakan dan Program Strategis

a. Kebijakan

Pada Tahun 2015 legislatif baru dan kabinet baru mulai berjalan. Karena itu, sebagian dari kebijakan akan menyesuaikan diri dengan arahan dari kabinet baru tersebut. Pembangunan tahun 2015 sebagian masih melanjutkan prioritas tahun 2014 yakni pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah. Selain itu, ditambahkan prioritas baru yakni :

- Peningkatan Kelestarian dan Penanganan dampak Lingkungan :
 - Perlindungan fungsi lingkungan;
 - Penanganan dampak lingkungan;
 - Konservasi dan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - Antisipasi perubahan iklim
- Pengembangan Kerjasama Daerah dan Daya Saing Daerah :
 - Pengembangan kerjasama Provinsi Sul-Sel dengan Provinsi Luar Negeri;
 - Pengembangan kerjasama Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Luar Negeri;
 - Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi komoditas strategis;
 - Penguatan system inovasi daerah;
 - Pengembangan dukungan MP3EI dan BKPRS.

b. Program Strategis

Dengan memperhatikan Analisis lingkungan strategis asumsi dan faktor penentu keberhasilan disamping visi, misi dan kebijakan dengan tetap berpedoman kepada program pembangunan pusat, maka Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Renstra 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
4. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Disiplin Aparatur
8. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja

Untuk mendukung keberhasilan Program Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan beberapa kegiatan yang dananya bersumber dari dana Dekonsentrasi dan APBD.

Dana Dekonsentrasi

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

- Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP
- Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP di Provinsi
- Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI)
- Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Tangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan
- Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap
- Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan
- Penguatan Kelembagaan
- Tata Kelola Informasi dan Sentral/Kampung Nelayan
- Peningkatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pengembangan Administrasi Keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan

3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

- Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
- Pengendalian Lingkungan Budidaya
- Data Monitoring Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan dan Komoditas Strategis nasional
- Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
- Pendampingan Produksi Induk Unggul
- Pembinaan Produksi bibit/benih dan induk unggul
- Produksi Induk Unggul
- Pengelolaan Sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan
- Pengelolaan Sistem Produksi pembudidayaan ikan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
- Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan
- Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan
- Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

5. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan

- Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan
- Penguatan dan Perluasan akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan
- Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
- Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan
- Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

6. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
- Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
- Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
- Penataan Ruang dan perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K.

Dana APBD

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pengembangan Induk Unggul Air Payau dan Laut
- Operasional Produksi Benih Udang Bandeng dan Ikan Lainnya
- Pengembangan Induk Unggul Ikan Air Tawar
- Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Sistem Perbenihan Ikan Air Tawar
- Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Ikan Air Tawar
- Pelayanan Pengujian Hama dan Penyakit Ikan
- Pembinaan, Pemantauan dan Penanggulangan Terhadap Hama Penyakit Udang dan Ikan
- Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (Paket Bibit)

- Pembinaan Pembudidaya Ikan Air Tawar
- Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Paket Bibit Ikan Air Tawar
- Pengembangan Budidaya Udang dan Bandeng (Paket Bibit)
- Pembinaan Pembudidaya Udang dan Bandeng dalam Pemanfaatan Paket Bibit
- Koordinasi Pengembangan Teknologi dan Kawasan Pembudidayaan Laut dan Payau
- Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Paket Bibit Udang dan Bandeng
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut(Paket Bibit)
- Pembinaan Pembudidaya Rumput Laut dalam Pemanfaatan Paket Bibit
- Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Paket Bantuan Bibit Rumput Laut
- Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi CPIB
- Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi CBIB
- Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
- Pembinaan dan Pemantauan Distribusi OIKB dan Rekomendasi Eskport Import Induk dan Benih
- Pembinaan dan Pengembangan Prasarana Irigasi Tambak dan Fasilitas Pendukungnya
- Penyusunan Data Statistik Perikanan Budidaya

2. Program Perikanan Tangkap

- Pembinaan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di wilayah laut Kewenangan provinsi
- Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Serta Teknologi Penangkapan Spesifik Daerah
- Pemantauan dan Pembinaan Penggunaan Kapal Perikanan berukuran 10 sampai dengan 30 GT
- Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan Tangkap
- Pelatihan Penerapan Teknologi, Peralatan, Mesin Kapal Perikanan dan Jasa Kelautan
- Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil Serta Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Pembinaan Usaha Masyarakat Pulau-Pulau Kecil
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir
- Pengembangan Usaha Garam Rakyat
- Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan
- Pembinaan Sistem Mitigasi Bencana dan Ketahanan Terhadap Bencana diwilayah Pesisir
- Pembinaan dan Penguatan Masyarakat pesisir Terhadap Kelembagaan Konservasi
- Penyusunan Dokumen Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Laut

4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha perijinan
- Bimtek Perizinan Usaha Perikanan
- Bimtek Pengelolaan, Kerjasama Usaha dan Promosi Usaha
- Layanan Administrasi dan Bimbingan Pemasaran dan Promosi Produk Perikanan baik dalam maupun Luar Negeri
- Pembinaan Produk Nilai Tambah
- Pembinaan dan Peningkatan Daya Saing Mutu dan Produk
- Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
- Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
- Pembinaan Standar Mutu Hasil Perikanan
- Bimtek Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya, Penangkap Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan
- Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- Bimtek Penguatan Kelembagaan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Kegiatan Pengawasan
- Peningkatan Koordinasi dan SDM Aparat Pengawas
- Inventarisasi Data Pengawas Perikanan dan Kelompok Siswasmas
- Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pengawasan
- Penyusunan dan Publikasi Data Pengawasan dan Pengendalian Perikanan
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan
- Pengawasan dan koordinasi Penegakan hukum diwilayah Laut kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan

- Penyuluhan hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian SDKP

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- Penyediaan Makan Minum Rapat
- Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
- Penyediaan Jasa Sopir
- Penyediaan Bahan Pengujian Laboratorium UPTD PPMHP
- Penyediaan Bahan Bibit dan Induk PPBAT
- Penyediaan Bahan Pengujian Lab. UPTD PPSKI
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas
- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

7. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor UPTD PPBLP
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor UPTD PPBAT
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas
- Pengadaan Meubeler
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- Bimtek Workshop Kepegawaian
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Sosialisasi PUG Sektor Kelautan dan Perikanan
- Pembangunan Gedung Kantor

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

- ✦ Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- ✦ Pertemuan Pra Monev Terpadu
- ✦ Penyusunan Dokumen Analisis Gender
- ✦ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✦ Penyusunan Laporan Monev
- ✦ Publikasi dan Informasi Data Pembangunan KP
- ✦ Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan KP

4.3. Sumber Pembiayaan

4.3.1. Dana Dekonsentrasi

Pada tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola dana sebesar Rp. 9.947.549.000 atau terjadi penurunan sebesar 44,9 % dari tahun anggaran 2015 Rp. 14.418.310.000. Anggaran tersebut dialokasikan pada satuan kerja yaitu :

- 4.3.1. Sekretaris Jenderal (01) Rp. 970.000.000
- 4.3.2. Ditjen Perikanan Tangkap (03) Rp.1.798.985.000
- 4.3.3. Ditjen Perikanan Budidaya (04) Rp.3.545.655.000
- 4.3.4. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05) Rp.793.520.000
- 4.3.5. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) (06) Rp.1.558.789.000
- 4.3.6. Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (07) Rp.1.280.600.000

4.3.2. Dana Tugas Pembantuan

Pada tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.831.495.000 dengan realisasi Rp. 1.791.755.100 (97,8 %) yang terdiri dari:

- ◆ Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp. 600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 562.965.500
- ◆ Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp.1.231.495.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.228.789.000

4.3.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah penerima dana DAK untuk Tahun Anggaran 2016 sebanyak 24 kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 60.390.103.595 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 99.290.064.672,- mengalami penurunan sebesar 39,2 %, sedangkan untuk DKP Provinsi mendapatkan dana DAK pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.194.143.000 dengan realisasi dana DAK sebesar Rp. 1.183.677.000

Tabel 10. Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2016

No	Kabupaten	DAK (Rp)	Realisasi	%
1	Gowa	4.666.472.000	4.637.884.400	99,4
2	Takalar	2.420.450.000	2.402.450.000	99,3
3	Bulukumba	2.661.320.000	2.657.740.000	99,9
4	Bantaeng	1.278.513.500	1.273.778.500	99,6
5	Jeneponto	466.209.000	439.844.000	94,3
6	Bone	4.340.915.000	4.340.915.000	100
7	Sinjai	2.901.830.000	2.845.782.500	98,1
8	Selayar	1.950.272.000	1.945.257.000	99,7
9	Wajo	5.058.080.000	5.042.770.000	99,7
10	Luwu	2.881.250.000	2.863.401.000	99,4
11	Palopo	2.370.446.000	2.370.446.000	100
12	Luwu Utara	2.049.432.095	788.087.900	38,5
13	Tana Toraja	1.814.980.000	856.339.575	52,2
14	Enrekang	1.974.370.000	1.971.050.900	99,8
15	Soppeng	915.081.000	717.302.000	78,4
16	Sidrap	3.667.333.000	2.270.959.000	61,9
17	Pare - Pare	3.512.981.000	3.173.767.400	90,3
18	Barru	5.349.790.000	5.320.460.000	99,5
19	Pangkep	3.512.981.000	3.173.767.400	90,3
20	Maros	508.833.000	508.833.000	100
21	Pinrang	1.981.071.000	1.706.448.400	86,1
22	Toraja Utara	1.330.541.000	1.306.041.000	98,2
23	Luwu Timur	1.241.810.000	1.139.909.000	91,8
24	Makassar	341.000.000	325.400.000	95,4
Jumlah		60.390.103.595	55.262.310.975	90,8

Sumber : Subag Perencanaan

4.3.4. Dana Daerah

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selain di danai dekonsentrasi juga didukung pendanaan APBD, untuk tahun 2016 total anggaran sebesar Rp. 87.935.891.420,78 -dengan rincian belanja langsung

Rp. 69.747.742.155,78,- dan belanja tidak langsung Rp. 18.188.149.265,- ini berarti terjadi kenaikan sebesar 19,1 % dari tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 73.862.574.206,-

a. Belanja Langsung

Belanja langsung yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 69.747.742.155,78 dengan realisasi Rp. 62.332.854.689 (89,4 %).

Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan. Alokasi dana tersebut terdapat pada delapan program kegiatan yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 6.141.850.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.213.246.251 (84,9%).
- Program Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD sebesar Rp. 7.167.261.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.755.502.132 (94,3%).
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja sebesar Rp. 1.739.732.772 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.722.451.875 (99,0 %).
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 5.423.223.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.690.490.620 (86,5 %).
- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan sebesar Rp. 3.983.693.384 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.729.457.967 (93,6%).
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan sebesar Rp. 23.731.874.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.477.918.178 (86,3 %).
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 14.197.935.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.696.161.900 (96,5 %).
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan sebesar Rp. 7.362.172.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.047.625.766,- (82,1 %).

b. Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan rutin dan gaji Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun 2016 dialokasikan dana sebesar Rp.18.188.149.265 dengan realisasi Rp. 16.815.795.645 (92,5 %).

4.4. Kegiatan Pembangunan

4.4.1. Perikanan Budidaya

a. Kegiatan Budidaya Laut dan Payau

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan kedepan lebih diarahkan kepada pengembangan agribisnis dengan sasaran utamanya adalah pemberdayaan masyarakat pembudidaya, melalui pengembangan kerjasama antara pembudidaya dan dunia usaha.

Sebagai salah satu komoditi unggulan ekspor non migas dari sektor Kelautan dan Perikanan yaitu udang dan rumput laut. Untuk dapat mewujudkan usaha budidaya udang sebagai penghasil devisa negara, dimana budidaya udang merupakan salah satu kegiatan perikanan terbesar yang dapat dikatakan sebagai suatu industri karena telah ditunjang oleh sebagian besar industri hulu hingga hilir dan identik dengan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya, disamping itu, dengan tidak mengabaikan masalah sosial ekonomi.

Tabel 11. Laporan Hasil Produksi Penerima Paket Bantuan Benur, Nener, Pakan, Saponin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

A. Komoditi Udang dan Bandeng

No	Kabupaten	Jml Klp	Jml Paket	Paket Bantuan				Hasil Produksi		Keterangan
				Benur (Ekor)	Nener (Ekor)	Pakan (Kg)	Saponin (Kg)	Udang (Kg)	Bandeng (Kg)	
1	Barru	6	200	-	913.400	5.100	-	-	55.040	
2	Jeneponto	17	326	700.000	1.596.162	5.580	-	-	-	Gagal Panen
3	Maros	12	471	2.992.500	1.922.100	6.000	-	7.031	105.305	
4	Pangkep	7	189	3.307.500	378.000	-	-	23.080	70.796,3	
5	Pinrang	9	356	4.086.000	328.000	6.400	5.120	8.049	5.600	
6	Bone	8	111	1.942.500	222.000	-	-	6.132	-	Bandeng Proses Bdy
7	Takalar	41	1.538	11.177.500	6.464.495	11.550	-	4.600	79.130	
8	Bulukumba	21	600	3.500.000	2.226.800	12.000	-	-	-	Proses Bdy
9	Gowa	2	194	4.850.000	-	-	-	1.225	-	
10	Bantaeng	4	82	-	374.464	2.460	-	-	-	Proses Bdy
11	Selayar	5	100	1.750.000	200.000	-	-	-	-	Proses Bdy
12	Sinjai	10	204	949.000	718.666	2.600	2.080	-	-	Proses Bdy

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Jml Klp	Jml Paket	Paket Bantuan				Hasil Produksi		Keterangan
				Benur (Ekor)	Nener (Ekor)	Pakan (Kg)	Saponin (Kg)	Udang (Kg)	Bandeng (Kg)	
13	Luwu Utara	3	45	410.625	22.500	1.125	900	2.238	-	Bandeng Proses Bdy
14	Makassar	8	200	-	913.200	6.000	-	-	18.471	
Total		153	4.616	35.665.625	16.279.787	58.815	8.100	52.355	334.342,3	

Sumber : Seksi Budidaya Laut dan Payau

Tabel 12. Laporan Hasil Produksi Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Perikanan (Udang Vannamei) Diprovinsi SulSel Tahun 2016

B. Komoditas Udang Vannamei

No	Kab/Kota	Penerima Paket		Paket Bantuan			Hasil Produksi (kg)	Keterangan
		Jml Klp	Jml Paket	Benur (ekor)	Pakan (Kg)	Saponin (Kg)		
1	Barro	9	220	5.280.000	5.500	4.400	35.156	
2	Pinrang	7	303	7.272.000	7.575	6.060	23.197	
3	Pare – Pare	4	100	2.400.000	2.500	2.000	4.819	
4	Luwu Utara	5	114	3.800.000	-	-	4.281	
Total		25	737	18.752.000	15.575	12.460	56.900	

Sumber : Seksi Budidaya Laut dan Payau

Tabel 13. Laporan Hasil Produksi Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut Diprovinsi SulSel Tahun 2016

C. Komoditas Rumput Laut

No	Kab/Kota	Jml Klp	Jml Paket	Bibit (Kg)	Tali No. 9,10 & 12 (Kg)	Tali No.4 & 5 (Kg)	Tali No.1 (Kg)	Produksi	Ket
1	Bantaeng	25	260	50.830	2.600	4.160	520	3.755	
2	Pangkep	12	154	30.107	1.540	2.464	308	274.825	
3	Luwu Utara	12	124	24.242	1.240	1.984	248	18.006,2	
4	Sinjai	18	220	45.320	2.200	4.400	440	51.660	
5	Bulukumba	10	100	19.550	1.000	1.600	200	38.150	
6	Takalar	29	380	121.407	2.800	2.800	560	25.320	
7	Selayar	7	75	14.662,5	750	1.200	150	47.590	
8	Jeneponto	7	178	58.550	1.000	1.600	200	151.600	
9	Pinrang	8	87	17.008,5	870	1.392	174	172.596	
10	Barro	7	80	15.640	800	1.280	160	113.301	
11	Luwu	12	110	21.505	1.100	1.760	220	67.800	
Total		147	1.768	418.822	15.900	24.640	3.180	926.453,2	

Sumber : Seksi Budidaya Laut dan Payau

Permasalahan yang dihadapi oleh seksi Budidaya Laut dan Payau selama tahun 2016 yaitu :

- ❑ Rata-rata kelompok CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) belum memenuhi persyaratan administrasi kelengkapan kelompok sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang belanja barang hibah dansosial yang diserahkan kemasyarakat.,
- ❑ Rata-rata penyaluran paket bantuan sarana produksi masuk pada musim tanam ke-2
- ❑ Kawasan budidaya di Sulawesi Selatan pada umumnya didominasi oleh tambak tradisional
- ❑ Kurangnya ketersediaan bibit yang berkualitas
- ❑ Dukungan prasarana irigasi tambak belum mampu menjamin ketersediaan air, baik kuantitas maupun kualitas
- ❑ Dukungan pembinaan oleh kab/kota belum optimal
- ❑ Kawasan/hamparan tidak memungkinkan untuk menerapkan CBIB

Upaya pemecahan yang dilakukan yaitu :

- ❑ Dibutuhkan Peraturan Gubernur untuk mengatur tentang penyaluran paket bantuan belanja barang yang diserahkan kemasyarakat
- ❑ Mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada kelompok tani pembudidaya baik dengan sosialisasi, pelatihan tentang teknologi kepada kelompok tani
- ❑ Senantiasa melakukan pembinaan kepada petani oleh tenaga pendamping ataupun penyuluh perikanan lapangan untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait, aktif mencari informasi
- ❑ Bantuan sarana dan prasarana secara bertahap setiap tahun diberikan oleh pihak terkait termasuk DKP kab/kota dan dari DKP Provinsi Sulawesi Selatan
- ❑ Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat oleh instansi terkait dengan inovasi teknologi rumput laut menjadi olahan ataupun teknologi pengolahan rumput laut menjadi bahan setengah jadi (ATC) sebelum dijual keindustri sehingga meningkatkan nilai jual
- ❑ Perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari pihak pemerintah untuk menstabilkan harga rumput laut seperti dengan adanya industri pengolahan rumput laut yang dimiliki oleh pemerintah agar dapat mengendalikan fluktuasi harga ditingkat petani.

b. Kegiatan Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum

Pada Tahun 2016, Seksi Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum mengelola kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

APBD

a. Pengembangan Budidaya Air Tawar (Paket Bibit)

Bantuan paket budidaya air tawar kepada kelompok pembudidaya berupa benih ikan air tawar dan pakan pellet, dengan total kelompok yang dibantu 60 kelompok atau 745 paket yang tersebar pada 13 kab/kota di Sulawesi Selatan.

b. Pembinaan Pembudidaya Ikan Air Tawar

1. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 23 Mei 2016
Lokasi : Kabupaten Enrekang
2. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 09 April 2016
Lokasi : Kabupaten Luwu Timur
3. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 21 Mei 2016
Lokasi : Kabupaten Sidrap
4. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 18 April 2016
Lokasi : Kota Palopo
5. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 11 April 2016
Lokasi : Kabupaten Luwu Utara
6. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 22 Maret 2016
Lokasi : Kabupaten Bone
7. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 02 April 2016
Lokasi : Kabupaten Toraja Utara
8. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 19 Maret 2016
Lokasi : Kabupaten Tana Toraja

9. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 03 November 2016
Lokasi : Kabupaten Gowa
10. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 16 April 2016
Lokasi : Kabupaten Luwu
11. Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
Waktu : 10 – 11 November 2016
Lokasi : Kabupaten Wajo
12. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Air Tawar
Waktu : 28 Oktober 2016
Lokasi : Kabupaten Sidrap
13. Kegiatan : Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar
Waktu : Oktober 2016
Lokasi : Makassar dan Kunjungan Lapangan di Depok
14. Kegiatan : Workshop Agribisnis Budidaya Ikan Air Tawar
Waktu : 30 September – 02 Oktober 2016
Lokasi : Makassar dan Kunjungan Lapangan di Jogjakarta
- c. Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Paket Budidaya Air Tawar
Kegiatan : Temu Evaluasi Budidaya Air Tawar
Waktu : 8 – 9 Desember 2016
Lokasi : Makassar
Jumlah Peserta : 40 Orang

Tabel 14. Alokasi Paket Budidaya Air Tawar yang bersumber dari Dana APBD Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Kinerja			Ket
		Input (Rp)	Output (benih Ikan)	Outcome	
Budidaya Ikan Air Tawar					
1	Kabupaen Bone <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	40.000.000	20 Pkt	Meningkatnya Hasil produksi Budidaya Air Tawar	
2	Kabupaten Luwu <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	100.000.000	50 Pkt		
3	Kabupaten Luwu Utara <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	80.000.000	40 Pkt		
4	Kabupaten Luwu Timur <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	80.000.000	40 Pkt		

No	Kabupaten/Kota	Kinerja			Ket
		Input (Rp)	Output (benih Ikan)	Outcome	
Budidaya Ikan Air Tawar					
5	Kota Palopo <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	100.000.000	50 Pkt		
6	Kabupaen Enrekang <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	200.000.000	100 Pkt		
7	Kabupaen Toraja Utara <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	140.000.000	70 Pkt		
8	Kabupaen Sidrap <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	200.000.000	100 Pkt		
9	Kabupaen Barru <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	80.000.000	40 Pkt		
10	Kabupaen Gowa <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	100.000.000	50 Pkt		
11	Kabupaen Pangkep <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	100.000.000	100 Pkt		
12	Kabupaen Maros <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	200.000.000	100 Pkt		
13	Kabupaen Sinjai <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	75.000.000	38 Pkt		

Sumber : Seksi Budidaya Air Tawar Dan Perairan Umum

APBN

- Kegiatan : Pertemuan Koordinasi Perbenihan Ikan Air Tawar diProvinsi Sulawesi Selatan

Waktu : 22 – 23 Agustus 2016

Lokasi : Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Peserta : 30 orang
- Kegiatan : Pertemuan Usaha Ikan Hias Air Tawar Tingkat Provinsi

Waktu : 20 – 21 Agustus 2016

Lokasi : di Mall GTC Makassar

Jumlah Peserta : 30 orang
- Kegiatan : Pertemuan Pra Sehatkan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Waktu : 03 – 04 Juni 2016

Lokasi : Hotel Quality, Makassar

Jumlah Peserta : 30 orang

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2016 pada seksi budidaya Air Tawar dan Perairan Umum Yaitu :

1. Terbatasnya dana yang teralokasi untuk pengembangan budidaya air tawar
2. Ketidaksesuaian musim budidaya ditingkat kelompok dengan waktu pengadaan ditingkat satker sehingga pelaksanaan kegiatan budidaya dilapangan sering terlambat.
3. Banyaknya Pokdakan yang tidak bersedia memenuhi kelengkapan administrasi berupa SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

Tindak lanjut permasalahan yang dilakukan pada seksi budidaya Air Tawar dan Perairan Umum yaitu :

- ✦ Untuk mengatasi terbatasnya dana yang teralokasi untuk pengembangan budidaya air tawar, maka seksi budidaya air tawar melakukan seleksi yang ketat terhadap usulan/proposal yang masuk.
- ✦ Mengatasi permasalahan ketidaksesuaian musim budidaya di tingkat kelompok dengan waktu pengadaan ditingkat satker sehingga pelaksanaan kegiatan budidaya dilapangan sering mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya, telah diupayakan penyesuaian jadwal kegiatan dengan musim tanam dikab/kota.

c. Kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

- a. Kegiatan : Apresiasi Pembinaan Mutu CPIB
Waktu : Tanggal 16 s/d 17 Maret 2017
Lokasi : Hotel Quality Plaza, Makassar
- b. Kegiatan : Manajer Pengendalian Mutu (PMP) CPIB
Waktu : Tanggal 19 s/d 20 April 2016
Lokasi : Hotel Quality Plaza, Makassar
- c. Kegiatan : Pengembangan Kawasan Budidaya
Waktu : Tanggal 25 s/d 26 Mei 2016
Lokasi : Hotel Quality Plaza, Makassar
- d. Kegiatan : Temu Koordinasi Penerapan CBIB
Waktu : Tanggal 14 September 2016
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulSel
- e. Kegiatan : Sosialisasi Penerapan CBIB
Lokasi : Kab. Jeneponto, Takalar, Gowa dan Maros

- f. Kegiatan : Temu Koordinasi Distribusi OIKB
Waktu : Tanggal 30 September s/d 02 Oktober 2016
Lokasi : Hotel Quality Plaza, Makassar
- g. Kegiatan : Pelatihan Operator Hama dan Penyakit Ikan
Waktu : Tanggal 26 Oktober 2016
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel
- h. Kegiatan : Temu Teknis Pengembangan Irigasi Tambak
Waktu : Tanggal 09 November s/d 11 November 2016
Lokasi : Hotel Grand Palace, Makassar
- i. Kegiatan : Validasi Data Statistik Perikanan
Waktu : Tanggal 22 s/d 23 Februari 2016
Lokasi : Hotel Grand Palace, Makassar
- j. Kegiatan: Apresiasi Data Statistik Perikanan
Waktu : Tanggal 25 s/d 26 Juli 2016
Lokasi : Hotel Grand Palace, Makassar

APBD

➤ Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya

- ✦ Pengadaan Calon Induk Ikan di Kabupaten Takalar dan Pakan Ikan Induk Ikan Mas di kabupaten Gowa dengan 2 Kelompok Penerima yaitu Kelompok Mina Sejahtera Desa Timbuseng Kec. Patalasang dan Kelompok Tetetanrang Desa Komara Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar.
- ✦ Pengadaan Artemia bagi HSRT Naplius dan Pakan Larva di Kec. Balusu Kabupaten Barru dengan kelompok penerima Pantai Palie dan Kelompok Masengerang Kec. Balusu Kab. Barru
- ✦ Pengadaan Jalan Produksi

No	Kabupaten	Desa	Kec/Kel
1	Takalar	Punaga	
		Cikoang	
		Laikang	Mangarabombang
		Mappakasunggu	
		Sanrobone	Mangarabombang
		Lagaruda	
		Mangindaran	Mappakasunggu
		Kaluku Bodo	Mappakasunggu

APBN

1. Sertifikasi CBIB

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Competent Authority Lokal, telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian sertifikasi CBIB dan tahun 2016 Sulawesi selatan telah mencapai penilaian sertifikasi dimana target yang diberikan oleh Dirjen Perikanan Budidaya Cq. Diektorat Produksi sebanyak 100 unit dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan mencapai dan melebihi target yang diberikan sebanyak 119 unit. Adapun realisasi perkembangan CBIB periode tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 15. Perkembangan Sertifikasi CBIB Periode Tahun 2016

No	Tahun	Target	Penilaian CBIB	Realisasi
1	2016	120 Unit		
	Tahap 1		36 Unit	58 Unit
	Tahap 2		68 Unit	12 Unit
	Tahap 3		15 Unit	56 Unit
Jumlah		120 Unit	119 Unit	119 Unit

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

2. Sertifikasi CPIB

Upaya dalam rangka meningkatkan kualitas benih ditempuh dengan menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan sebagai langkah awal melatih petugas atau operator perbenihan menjadi Manajer Pengendali Mutu (MPM) CPIB. Adapun realisasi Pembina Mutu Perbenihan sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Daftar Nama – Nama Manajer Pengendali Mutu (MPM) pada Unit Perbenihan di Sulawesi selatan sampai Tahun 2016

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Alamat	Ket
1	Muh. Furqun Ramdani	PT. Jajaran Pantai Nusantara	Monumen Emmy Saelan IV No. 20 Mksr	BS
2	Andrew Teng kawan	PT. Sentosa Takalar	Dusun Parappa, Desa Laguruda Kec. Mappasunggu, Takalar	BS SERT
3	Abdullah Fudail, S.Si	PT. Esaputli Prakarsa Utama	Dsn Jalange, Desa Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru	SERT/ISO
4	Ir. H. Muh. Ishak		Jl. A. Mappanyukki No 9 Mksr	
5	Fatimah Sakka		Jl. Prs Mks-Parepare Km 138	
6	Amri Said	UPR Cakkempong	Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat	BS
7	Alesman	PT. Saniri Jaya	Ujung Indah, Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru	BS
8	Yulianto			
9	Bambang Kusbiantoro			
10	Margono	PT. Surya Monodon	Jl. Sangir No. 69 Mksr	BS
11	Arif Sudirman		Dsn. Sawakung, Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara Takalar	BS
12	Rizal, S.Pi	PT. Puncak Sinunggal	Jl. Prs Mksr-Parepare Kel. Mallawa Kab. Barru	BS
13	Asse Bandu	UPR Mattapa	Desa Manurung Kec. Bola Kab. wajo	BS
14	Darmawan	UPTD PPBAT Lajoa Soppeng	Jennae, Lajoa Kabupaten Soppeng	BS
15	M. Hasby Rasyad S.Pi			
16	H. Abdullah, S.Pi			
17	Guno Gumelar	BBAP Takalar	Galesong Selatan Kab. Takalar	BS
18	Mutmainna		Ujung Indah, Desa Cilellang Kec. Mallusetasi	BS
19	Sirajuddin, S.St.Pi		Galesong Selatan Kab. Takalar	BS
20	Muh. Darwis Nur	Backyard UD. Anugrah Bumi Hero Barru	Kabupaten Barru	BS
21	Christhoper, SE	PT. Andatu Pinrang	Suppa Kabupaten Pinrang	BS
22	Pangki Panar	UPR Tang Okke Sidrap	Kabupaten Sidrap	BS
23	Masyur Amin, S.Pi	BBi limbung Kab. Gowa	Kabupaten Gowa	BS
24	Kail Yasir, S.Pi	UPTD BBI Ompo	Kab. Soppeng	BS
25	Baharuddin, SP	BBi Kalosi Alau, Kab. Sidrap	Kab. Sidrap	BS
26	Ir. Muh. Saleh	UD. Mahkota Windu Pinrang	Suppa, Kab. Pinrang	BS
27	Mirayanti	PT. Phisindo	Kab. Barru	BS
28	M. Natsir, S.Pi	BBi Bontomanai Kab. Gowa	Bontomanai, Kab. Gowa	BS
29	Ir. Andi Mustamin, MP	BBU Bojo Barru	Bojo, Kab. Barru	BS
30	Bahtiar Abtar	PT. Hakata Marine Barru	Kab. Barru	BS
31	Ashar Rijal, Spd	UPR Mamminasae Kab. Soppeng	Jennae, Kab. Soppeng	BS
32	Ir. Taufik Sabir	Hatchery Mini Mandiri Pinrang	Suppa Kab. Pinrang	BS
33	Abdul Salam Nurdin	UD. Sinar Benur Lembae	Kab. Barru	BS
34	H. Rijal Nappa	Backyard Sinar Baru Takalar	Kab. Takalar	BS

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Catatan : BS = Belum Sertifikasi
 Sert/Iso = Sertifikasi/Iso
 BP Sert = Belum Perpanjangan Sertifikasi

Adapun realisasi dari sertifikasi CPIB sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Daftar Unit Pembenihan yang Bersertifikat CPIB Sulawesi selatan Tahun 2016

No	Kabupaten	Unit Pembenihan	Komoditas	Grade
1	Barru	1. HSRT Turikale (Aziz, M) 2. HSRT Bintang Benur (Taufik Hidayat) 3. HSRT Siperennu Benur (Marwan) 4. HSRT Arkan Benur (Asri) 5. HSRT Nadia Benur (Suparman) 6. HSRT Aldi Putra Benur 7. HSRT Naufa Benur 8. HSRT Anugerah Benur 9. HSRT Anugerah Bumi Hero 10. HSRT Halim Asri Bahari 11. HSRT Nur Rahmat Benur Palie (NBP) 12. CV. Saniri Jaya 13. HSRT Aura Benur 14. UPTD PPBL DKP SulSel 15. HSRT Benur Afiat 16. HSRT Rezky Bersama 17. HSRT Armina Benur Palie 18. UD. Segar 19. HSRT Benur Bahari 20. HSRT Rezky Benur mandiri 21. HSRT Windu Pasifik 22. PT Esaputli Prakasa Utama	Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Vannamae Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Vannamae	Sangat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik
2	Wajo	UPTD Kalola	Ikan Mas	Sangat Baik
3	Pinrang	1. UD. Buana Windu 2. Benur Utama 3. HSRT Mahkota Windu	Udang Windu Udang Windu Udang Windu	Baik Sangat Baik Baik
4	Takalar	HSRT Diamond Benur Mappakalombo	Udang Windu	Sangat Baik
5	Palopo	UPTD BBI Salupao DKP Palopo HSRT. Lim Sejahtera	Ikan Mas Udang Vannamae	Baik Cukup

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

3. Sistem Pengendalian OIKB (Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi)

Pengembangan Sistem Pengendalian OIKB diimplementasikan dalam 3 (Tiga) kegiatan pokok yaitu 1) Pelayanan Pendaftaran Obat Ikan, 2) Perizinan Usaha Obat Ikan dan 3) Pembinaan, Pemantauan (Pengendalian) dalam hal penyediaan dan Peredaran OIKB.

Adapun hasil Monitoring OIKB di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Hasil Monitoring dan Surveillance OIKB Pada Distributor & Toko/Depo Obat Ikan – DKP Provinsi SulSel Tahun 2016

No	Objek Pantauan	Alamat	Nama OIKB	Produsen	Keterangan
A	Distributor				
1	PT. Bina San Prima	Jl. Yos Sudarso, 27 Mksr	<ul style="list-style-type: none"> - Bioivit Aquatic - C-san Aquatic - Destan Aquatic - Ex-Am Aquatic - Premium – C Aquatic - Protect Aquatic - Thionil Aquatic - San O₂ Aquatic - Probiobac Aquatic 	PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Caprifarmino Labs	Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar
B	Toko/Depo				
1	Toko Wira Tani	Jl. Mangga No. 64 Palopo	<ul style="list-style-type: none"> - Ursal - EM4 - Lakonin (Serbuk Biji Teh) 	CV. Bunga Tani PT. Songgo Langit	Terdaftar Terdaftar Diizinkan digunakan
2	Toko Tani Putra	Jl. Yos Sudarso Palopo	<ul style="list-style-type: none"> - Bentan - Raphane (Cair) - Green Tama (Pupuk Cair) - Lodan - Ursal - Raja Bandeng - Color Maid 	CV. Agro Nusantara CV. Scorlet CV. Putra Agro Mandiri CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Tdk Terdaftar
3	Toko Ikram	Suli, Kec. Suli Kab. Luwu	<ul style="list-style-type: none"> - Benstan - Pegasus - Raja Bandeng - Lakonin (Serbuk Biji Teh) 	CV. Agro Nusantra CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar Diizinkan digunakan
4	Toko Karya Sejahtera	Pasar Belopa Luwu	<ul style="list-style-type: none"> - Dursban - Raphane (Cair) - Raja Bandeng 	- CV. Scorlet CV. Bunga Tani	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar
5	Toko Tunas Tani	Jl. Pasar Sentral Sinjai	<ul style="list-style-type: none"> - Bio Sulation - Super NB - Raja Bandeng 	PT. Marindo Lab PT. Songgo langit PT. SHS	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar
6	Toko Tani Abadi	Jl. Lasinrang Pare-Pare	<ul style="list-style-type: none"> - Eornakol (bubuk) - EM4 - Raja Bandeng - Lodan - Lakonin (Serbuk Biji Teh) - Benstan 	CV. Scorlet PT. Songgo Langit CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani CV. Agro Nusantara	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar Terdaftar Diizinkan digunakan Tdk Terdaftar
7	Toko Harapan Tani	Jl. A. Makkasau Pinrang	<ul style="list-style-type: none"> - Ursal Cair - Lodan - Raja Bandeng - Eotnakol (bubuk) - Petrogrow 	CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani CV. Scorlet PT. Petrokimia Kayaku	Terdaftar Terdaftar Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar

Lanjutan.....

No	Objek Pantauan	Alamat	Nama OIKB	Produsen	Keterangan
8	Toko Tani	Jl. Poros Barru	- Dursban - Raphane (Cair) - Raja Bandeng	- CV. Scorlet CV. Bunga Tani	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar
9	Toko Medicapit	Jl. Kemakmuran Kab. Pangkep	- C- San Aquatic - Destan Aquatic - Ex-Am Aquatic - Premium - C Aquatic - Protect Aquatic - Thionil Aquatic - San O ₂ Aquatic - Probiobac Aquatic	PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Caprifarmindo Labs	Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Dalam upaya pengembangan sarana dan prasarana budidaya masih banyak permasalahan ataupun kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- Khususnya untuk pengembangan parasarana baik perbenihan maupun irigasi alokasi dana yang tersedia masih sangat kecil. Sehingga upaya untuk mengoptimalkan kondisi fasilitas atau bangunan prasarana tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama karena terkendala dana yang minim.
- Dalam pelaksanaan pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sebagian besar petani pembudidaya ikan belum mengetahuinya, walaupun sosialisasi telah dilakukan namun ini hanya terbatas pada petani tertentu saja.
- Pengendalian distribusi OIKB juga belum optimal dilakukan terutama terhadap Depo/Toko Obat Ikan yang berada dikab/kota karena keberadaan depo/toko obat ikan tersebut bukan spesifik menjual kebutuhan untuk budidaya perikanan saja.

4.4.2. Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan APBD

1. **Pertemuan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir dikabupaten Kepulauan Selayar**
 - ✦ Pertemuan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir dilaksanakan dipulau Pasi Desa Menara Indah
 - ✦ Tujuan Pertemuan ini adalah menumbuh kembangkan KUB menjadi wadah usaha perekonomian nelayan yang dapat mengakomodasikan perkembangan usaha nelayan

- ✦ Kegiatan pertemuan pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Selayar diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten Selayar, Aparat Desa dan Masyarakat Desa Menara Indah.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesungguhan para pembina dan pengelola KUB diseluruh Provinsi Sulawesi Selatan dalam menumbuhkembangkan Kub menjadi wadah usaha perekonomian nelayan yang dapat mengakomodasikan perkembangan usaha nelayan di Desa Menara Indah.

2. Pertemuan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai

- ✦ Pertemuan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir dilaksanakan di Pulau Kanalo, Kabupaten Sinjai
- ✦ Tujuan Pertemuan ini adalah menumbuhkembangkan KUB menjadi wadah usaha perekonomian nelayan yang dapat mengakomodasikan perkembangan usaha nelayan
- ✦ Kegiatan pertemuan pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten Sinjai, Aparat Desa dan Masyarakat Desa pulau Kanalo.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesungguhan para pembina dan pengelola KUB diseluruh Provinsi Sulawesi Selatan dalam menumbuhkembangkan Kub menjadi wadah usaha perekonomian nelayan yang dapat mengakomodasikan perkembangan usaha nelayan di Desa Kanalo
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola KUB, maka diperlukan adanya kegiatan yang dapat memberikan dorongan bagi peningkatan kinerja pengelolaan KUB, yang antara lain dapat ditempuh melalui kegiatan Pembinaan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama di Pulau Kanalo Kabupaten Sinjai.

3. Pertemuan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Barru

- Pertemuan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir dilaksanakan di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
- Tujuan Pertemuan ini adalah menumbuhkembangkan KUB menjadi wadah usaha perekonomian nelayan yang dapat mengakomodasikan perkembangan usaha nelayan
- Kegiatan pertemuan pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Barru diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten Barru, Aparat Desa dan Masyarakat Desa Lasitae.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesungguhan para pembina dan pengelola KUB diseluruh Provinsi Sulawesi Selatan dalam menumbuhkembangkan KUB menjadi wadah usaha perekonomian nelayan yang dapat mengakomodasikan perkembangan usaha nelayan di Desa Lasitae
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola KUB, maka diperlukan adanya kegiatan yang dapat memberikan dorongan bagi peningkatan kinerja pengelolaan KUB, yang antara lain dapat ditempuh melalui kegiatan Pembinaan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama di Pulau Kanalo Kabupaten Barru.

4. Pertemuan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pangkep

- Pertemuan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir dilaksanakan di Pulau Sabangko Kec. Tuppabiring Utara Kabupaten Pangkep.
- Tujuan Pertemuan ini adalah menumbuhkembangkan KUB menjadi wadah usaha perekonomian nelayan yang dapat mengakomodasikan perkembangan usaha nelayan
- Kegiatan pertemuan pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pangkep diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten Pangkep, Aparat Desa dan Masyarakat Pulau Sabangko, Kec. Tuppabiring Utara Kabupaten Pangkep.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesungguhan para pembina dan pengelola KUB diseluruh Provinsi Sulawesi

Selatan dalam menumbuhkembangkan Kub menjadi wadah usaha perekonomian nelayan yang dapat mengakomodisikan perkembangan usaha nelayan di Pulau Sabangko

- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola KUB, maka diperlukan adanya kegiatan yang dapat memberikan dorongan bagi peningkatan kinerja pengelolaan KUB, yang antara lain dapat ditempuh melalui kegiatan Pembinaan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama di Pulau Sabangko Kabupaten Pangkep

5. Pertemuan Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pangkep

- ✦ Pertemuan Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir dilaksanakan dipulau Salemo Kecamatan Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep.
- ✦ Tujuan Pertemuan ini adalah sebagai mata pencaharian alternatif untuk menambah penghasilan ibu – ibu nelayan.
- ✦ Kegiatan pertemuan pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pangkep diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten Pangkep, Aparat Desa dan Masyarakat Pulau Salemo, Kec. Tupabiring Utara Kabupaten Pangkep
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang pengembangan diversifikasi usaha produk perikanan dipulau Salemo Kecamatan Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah program pemberdayaan masyarakat pesisir yang diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri mereka sehingga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan secara sejajar dengan kaum prianya.

6. Pertemuan Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai

- ✦ Pertemuan Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir dilaksanakan dipulau Kanalo Kabupaten Sinjai.
- ✦ Tujuan Pertemuan ini adalah meningkatnya pendapatan rumah tangga nelayan dan sebagai mata pencaharian alternatif untuk menambah penghasilan ibu-ibu nelayan.
- ✦ Kegiatan pertemuan pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten Sinjai, Aparat Desa dan Masyarakat Pulau Kanalo Kabupaten Sinjai

- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang pengembangan diversifikasi usaha produk perikanan dipulau Pulau Kanalo Kabupaten Sinjai
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah program pemberdayaan masyarakat pesisir yang diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri mereka sehingga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan secara sejajar dengan kaum prianya.

7. Pertemuan Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir di Kabupaten Barru

- ✦ Pertemuan Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir dilaksanakan didesa Lasitae, kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
- ✦ Tujuan Pertemuan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan nelayan, merubah sikap dan pola pikir kearah yang lebih maju bagi wanita nelayan, meningkatnya pendapatan rumah tangga nelayan dan sebagai mata pencaharian alternatif untuk menambah penghasilan ibu-ibu nelayan.
- ✦ Kegiatan pertemuan pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Barru diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten Barru, Aparat Desa dan Masyarakat Desa Lasitae
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang pengembangan diversifikasi usaha produk perikanan didesa Lasitae
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah program pemberdayaan masyarakat pesisir yang diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri mereka sehingga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan secara sejajar dengan kaum prianya.

8. Pertemuan Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir di Kabupaten Selayar

- ✦ Pertemuan Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir dilaksanakan didesa Menara Indah Kabupaten Selayar
- ✦ Tujuan Pertemuan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan nelayan, merubah sikap dan pola pikir kearah yang lebih maju bagi wanita nelayan, meningkatnya pendapatan rumah tangga nelayan dan sebagai mata pencaharian alternatif untuk menambah penghasilan ibu-ibu nelayan.

- ✦ Kegiatan pertemuan pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir di Kabupaten Selayar diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten Selayar, Aparat Desa dan Masyarakat Desa Lasitae
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang pengembangan diversifikasi usaha produk perikanan didesa Lasitae.
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah program pemberdayaan masyarakat pesisir yang diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri mereka sehingga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan secara sejajar dengan kaum prianya.

9. Pertemuan Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Masyarakat Pesisir di Kota Makassar

- ✦ Pertemuan Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Masyarakat Pesisir di Kota Makassar dilaksanakan di Hotel Kondotel Karebosi
- ✦ Tujuan Pertemuan ini adalah sebagai upaya pemerintah membuka peluang akses permodalan bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan melalui alternatif sumber permodalan baik sumber permodalan konvensional maupun kredit komersil, mensosialisasikan berbagai alternatif sumber permodalan bagi nelayan dan petani ikan.
- ✦ Kegiatan Pertemuan Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Masyarakat Pesisir di Kota Makassar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari DKP Kab/Kota, Aparat Desa dan Masyarakat Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang adanya program yang dapat membantu modal usaha para nelayan sehingga kedepan masyarakat yang berkecimpung didalamnya dapat memanfaatkan atau mengakses kredit sebagai modal usaha.
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dilakukan dengan pendekatan manajemen kawasan dengan prinsip : integritas, efisiensi, kualitas dan akselerasi, permasalahan permodalan atau pembiayaan masih belum menjadi salah satu aspek strategis di daerah sehingga masih kurang mendapatkan perhatian.

10. Pertemuan Penguatan Kelembagaan KUB dalam Rangka Pengembangan Menjadi Koperasi di Kota Makassar

- Pertemuan Penguatan Kelembagaan KUB dalam Rangka Pengembangan Menjadi Koperasi di Kota Makassar dilaksanakan di Hotel Grand Asia Makassar.
- Tujuan Pertemuan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota kelompok tentang manfaat dan fungsi koperasi.
- Kegiatan Pertemuan Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Masyarakat Pesisir di Kota Makassar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari DKP Kab/Kota, KUB, Koperasi Nelayan dan Masyarakat Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah peningkatan pembinaan KUB dalam upaya menumbuhkan kembangkan kerjasama kelompok usaha bersama dalam bentuk pemanfaatan Forum KUB serta meningkatnya manajemen pengelolaan KUB dalam rangka pengembangan menjadi koperasi.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dilakukan dengan pendekatan manajemen kawasan dengan prinsip : integritas, efisiensi, kualitas dan akselerasi, permasalahan permodalan atau pembiayaan masih belum menjadi salah satu aspek strategis di daerah sehingga masih kurang mendapatkan perhatian.

11. Pertemuan Kegiatan Training Of Trainer (TOT) Kartu Nelayan di Makassar

- Pertemuan Training of Trainer (TOT) Kartu Nelayan dilaksanakan di Hotel Demelia.
- Tujuan Pertemuan ini adalah melakukan Updating data dan perbaikan modul aplikasi registrasi kartu nelayan dan untuk meningkatkan kemampuan aparat DKP kab/Kota yang telah ditetapkan sebagai operator data aplikasi pengembangan usaha penangkapan ikan memahami tugas dan fungsinya dari segi kebijakan maupun teknis.
- Kegiatan Pertemuan Training of Trainer (TOT) kartu Nelayan diikuti oleh 50 (Lima Puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kab/Kota dan Operator Kartu Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah penyajian informasi dan data yang lebih tepat dan akurat melalui pemberian identitas profesi lainnya secara individu pada setiap nelayan yang bertujuan identitas pembinaan, basis data nelayan dalam rangka pengembangan usaha nelayan dan melindungi profesi nelayan.

- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dilakukan dengan pendekatan manajemen kawasan dengan prinsip : integritas, efisiensi, kualitas dan akselerasi, permasalahan permodalan atau pembiayaan masih belum menjadi salah satu aspek strategis di daerah sehingga masih kurang mendapatkan perhatian.

12. Bimtek Pengelolaan Produksi Garam Rakyat di Makassar

- ✦ Pertemuan Bimtek Pengelolaan Produksi Garam Rakyat dilaksanakan di Hotel Prima, Makassar
- ✦ Tujuan Pertemuan ini adalah memberikan informasi pengetahuan tentang penerapan teknologi tepat guna Usaha garam Rakyat, meningkatkan produksi secara kuantitas dan kualitas yang baik agar memiliki nilai jual yang memadai.
- ✦ Kegiatan Pertemuan Bimtek Pengelolaan Produksi Garam Rakyat diikuti oleh 60 (Enam.Puluh) peserta yang terdiri dari penggarap/petambak garam dan pengusaha garam rakyat.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan produksi secara kuantitas dan kualitas yang baik agar memiliki nilai jual yang memadai
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah memfasilitasi kapasitas dan kompetensi petani garam melalui pelatihan/pertemuan, sosialisasi maupun workshop tentang Pengembangan Teknologi Tepat Guna pada Usaha Garam Rakyat (Teknologi TUF dan Geomembran).

Kegiatan APBN

1. Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Kenelayanan Melalui Basis Data Asuransi Nelayan dan Bantuan Kapal di Makassar

- ✦ Pertemuan Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Kenelayanan melalui Basis Data Asuransi Nelayan dan Bantuan Kapal dilaksanakan di Hotel Demelia, Makassar
- ✦ Tujuan Pertemuan ini adalah memberikan pembinaan dan pengelolaan informasi kenelayanan melalui asuransi nelayan dan bantuan kapal, untuk meningkatkan kemampuan petugas enumerator dan aparat dinas Kab/Kota yang telah ditetapkan dalam melakukan pengimputan dan pemutakhiran data asuransi nelayan dan bantuan kapal.

- Manfaat dari kegiatan ini adalah penyajian informasi dan data yang lebih tepat dan akurat melalui basis data nelayan untuk asuransi nelayan dan bantuan kapal penangkap ikan

2. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kota Makassar

- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar.
- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.
- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kota Makassar diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Barombong dan Untia Kota Makassar
- Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 100 bidang tanah di Kota Makassar.

3. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Takalar

- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di kantor Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai

agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.

- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di kabupaten Takalar diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan desa sawakung, Campagaya, Beba, Borong Calla Kabupaten Takalar
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Takalar.

4. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Jeneponto

- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Jeneponto
- ✦ Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.
- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di kabupaten Jeneponto diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Desa Garassikang, Arungkeke, Tanrusampe, Biringkassi, Palajau, Boyong Kabupaten Jeneponto.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Jeneponto.

5. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Bulukumba

- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Bulukumba
- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.
- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di kabupaten Bulukumba diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Herlang, Teuku Umar, Turungan Beru, Kajang, Yos Sudarso, Tanuntung, Bintarore, Manjaling, Kassi Kabupaten Bulukumba
- Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Bulukumba.

6. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Selayar

- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Kantor Desa Yurinda Kecamatan Bontomatene Kabupaten Selayar
- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan

lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.

- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di kabupaten Selayar diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Pangarangan, Padangogi, BT. Talloso Kabupaten Selayar.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Selayar

7. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Sinjai

- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Kantor Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur.
- ✦ Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.
- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di kabupaten Sinjai diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Desa Tongke-Tongke, Campae, Maroangin, Babana Kabupaten Sinjai.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Sinjai.

8. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Bone

- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Kantor Desa Carigading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.
- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.
- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di kabupaten Bone diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Desa unra, Carigading, Malela, Kajuara Kabupaten Bone
- Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Bone

9. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Pangkep

- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep.
- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala

kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.

- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dikabupaten Pangkep diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari Nelayan P. Bontosua, P. Bondong Bali, P. Sanane, P. Balang Caddi Kabupaten Pangkep
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Pangkep

10. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Pinrang

- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang.
- ✦ Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.
- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dikabupaten Pinrang diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Minakke, Pallameang, Langnga Kabupaten Pinrang.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 100 bidang tanah di Kabupaten Pinrang.

11. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Luwu

- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu.
- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.
- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di kabupaten Luwu diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Belopa, Mario Kabupaten Luwu.
- Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Luwu.

12. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Luwu Utara

- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala

kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.

- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di kabupaten Luwu Utara diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Waelawi, Pengkajoang Takkalala Panasae Kabupaten Luwu Utara.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Luwu Utara.

13. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kabupaten Luwu Timur

- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Malili Kabupaten Luwu Timur
- ✦ Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.
- ✦ Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di kabupaten Luwu Timur diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Desa Balipu, Balantang, Lampenai, Benteng Kabupaten Luwu Timur.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 200 bidang tanah di Kabupaten Luwu Timur.

14. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kota Palopo

- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo
- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan adalah memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat.
- Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Kota Palopo diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari nelayan Benteng, Ratulangi, Surutanga, Binturu Kota Palopo
- Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan kepada 100 bidang tanah di Kota Palopo.

Adapun kegiatan SeHAT yang dilaksanakan di 18 Kab/Kota sebanyak 2.500 bidang tanah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

B. Seksi Kelautan dan Konservasi

Kegiatan APBD

1) Pertemuan Koordinasi Rehabilitasi KKPD

- Pertemuan Koordinasi Rehabilitasi KKPD dilaksanakan pada Tanggal 21 – 22 April 2016 bertempat di Grand Palace Hotel Jl. Tentara pelajar No.50 Makassar
- Tujuan dari kegiatan Koordinasi rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) adalah tercapainya kesepakatan bersama dalam upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan Konservasi Perairan Daerah oleh Pemerintah Daerah beserta stakeholders dalam rangka rehabilitasi perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah yang ada di kab/kota
- Kegiatan ini diikuti oleh 70 (tujuh Puluh) peserta yang terdiri dari BPSPL Makassar, BKKPN Kupang DKP Prov. Sulsel, Instansi terkait, DKP Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan LSM.
- Rekomendasi dari kegiatan ini bahwa perlu adanya KKPD di setiap wilayah kab/kota untuk itu setiap informasi tentang kawasan yang potensi untuk dijadikan KKPD dapat diberikan ke provinsi sebagai penanggung jawab wilayah pesisir dan laut di Sulawesi Selatan.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah berkembangnya kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara bijaksana dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Pertemuan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat akan Kelestarian Ekosistem

- Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat akan Kelestarian Ekosistem dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 bertempat di Pulau Pasi', Desa Menara Indah, Kec. Bonto Mate'ne Kab. Selayar.
- Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kelestarian suatu ekosistem, membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan gerakan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang bertanggung jawab dan memberi motivasi bagi masyarakat dalam rangka peningkatan upaya pengawasan yang berbasis masyarakat terhadap praktek yang sifatnya "Destructive".

- ✦ Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat akan Kelestarian Ekosistem diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta, yang terdiri dari DKP Kab Pangkep, Aparat kecamatan dan Desa, Tokoh Masyarakat dan Nelayan.
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah terciptanya ketahanan lingkungan di wilayah pesisir karena meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

3) Workshop Pengelolaan Ekosistem pada Kawasan Terdegradasi Berat

- ✦ Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 29 Juli 2016 bertempat di Hotel Dynasty, Jl. Lombok No. 30 Makassar.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pertemuan workshop sehingga tercipta rumusan terkait dukungan dalam mewujudkan ketahanan kawasan metropolitan tahan bencana dan perubahan iklim ditinjau dari aspek kelembagaan, sosial budaya, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur.
- ✦ Kegiatan ini diikuti oleh 100 (seratus) peserta yang terdiri dari DKP provinsi Sulsel, Instansi terkait tingkat provinsi, DKP Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Masyarakat Pesisir dan LSM
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholders terkait dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang sifatnya merusak.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah terciptanya ketahanan lingkungan di wilayah pesisir karena meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

4) Penanaman Mangrove pada Kegiatan Pelestarian KKPD

- ✦ Penanaman mangrove dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 berlokasi di Desa Tokke, Kec. Malangke Kab. Luwu Utara
- ✦ Tujuan kegiatan ini adalah untuk melestarikan fungsi dan kemampuan sumberdaya ekosistem mangrove guna menjalin kesinambungan dan pemanfaatannya dengan tetap berpedoman pada asas manfaat dan kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya alam, memulihkan peran dan fungsi ekosistem

mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi, tsunami degradasi dan erosi pantai.

- ✦ Keluaran dari kegiatan ini adalah terehabilitasinya kawasan pesisir seluas ± 1,5 Ha dengan penanaman mangrove sebanyak 16.000 batang dengan sistem berbaris.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah terjaganya wilayah pesisir dari kerusakan lingkungan seperti pencemaran, abrasi dan sebagainya.

5) Penanaman Mangrove pada Kegiatan Pengelolaan Ekosistem pada Kawasan Terdegradasi Berat

- ✦ Penanaman mangrove dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 berlokasi di kelurahan salakoe, kec. Wara timur kota Palopo.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah melestarikan fungsi dan kemampuan sumberdaya ekosistem mangrove guna menjalin kesinambungan dan pemanfaatannya dengan tetap berpedoman pada asas manfaat dan kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya alam
- ✦ Keluaran dari kegiatan ini adalah terehabilitasinya kawasan pesisir seluas ± 1,5 Ha dengan penanaman mangrove sebanyak 15.500 batang dengan sistem berbaris.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah terjaganya wilayah pesisir dari kerusakan lingkungan seperti pencemaran, abrasi dan sebagainya

6) Sosialisasi Pencadangan Kawasan Konservasi

- ✦ Kegiatan Sosialisasi Pencadangan Kawasan Konservasi dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2016 bertempat di Ruang pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bulukumba
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya keberadaan suatu kawasan konservasi perairan, Membangun Inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu kawasan konservasi perairan, mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan yang lestari dan bertanggung jawab.
- ✦ Kegiatan Sosialisasi Pencadangan Kawasan Konservasi diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kab. Bulukumba, Kepala Kelurahan/Desa, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Pengawas.

- ✦ Rekomendasi yang diberikan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat memberikan informasi kondisi pesisir dan perairan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keberadaan suatu kawasan konservasi sehingga dapat memotivasi mereka dalam mewujudkan terbentuknya KKP diwilayah tinggal mereka yang nantinya dapat mendukung tercapainya kesejahteraan hidup mereka.

7. FGD Pencadangan Kawasan Konservasi

- ✦ Kegiatan FGD Pencadangan Kawasan konservasi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 bertempat di ruang Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menerima masukan dari stakeholders terkait tentang lokasi dan arahan kawasan konservasi yang akan dibentuk di kabupaten Pangkep yang merupakan lokasi tambahan; untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konservasi diwilayah Kawasan Konservasi Perairan Daerah kabupaten Pangkep.
- ✦ Kegiatan FGD Pencadangan Kawasan Konservasi diikuti sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, Kepala Kelurahan/Desa, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Pengawas
- ✦ Rekomendasi pertemuan ini agar masyarakat dapat memberikan informasi kondisi pesisir dan perairan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi .
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keberadaan suatu kawasan konservasi sehingga dapat memotivasi mereka dalam mewujudkan terbentuknya KKP diwilayah tinggal mereka yang nantinya dapat mendukung tercapainya kesejahteraan hidup mereka.

8. Sosialisasi Sistem Informasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

- ✦ Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2016 bertempat di Hotel Grand Palace, Makassar
- ✦ Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah 1). Agar masyarakat pesisir, nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya memiliki akses informasi terkait bencana, perubahan iklim dan lingkungan, 2). Membangun kesadaran dalam masyarakat untuk peduli akan pentingnya keselamatan kerja dalam aktivitas

mereka, 3). Meminimalkan terjadinya kecelakaan khususnya dilaut yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Kegiatan ini diikuti oleh 100 (Seratus) peserta yang terdiri dari DKP Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Rekomendasi yang diberikan pada kegiatan ini adalah perlu secepatnya melakukan pengadaan Sistem Informasi Mitigasi bencana di provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.
- Manfaat kegiatan ini adalah terciptanya ketahanan lingkungan diwilayah pesisir dan meminimalkan kecelakaan dilaut karena meningkatnya antisipasi dan kewaspadaan masyarakat akan bencana diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. Pengadaan Tukik Penyu pada Sosialisasi Kesadaran Masyarakat akan Kelestarian Ekosistem

- Pelaksanaan kegiatan ini di pihak ketigakan yang dikerjakan oleh CV. Amal Abadi dengan lokasi kegiatan di Pulau Pasi' Kabupaten Selayar pada bulan Mei 2016
- Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah 1). Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi SulSel dalam mendukung pelestarian satwa langka, 2). Salah satu upaya membantu memperbesar peluang hidup penyu dihabita alamnya, 3) dan menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap satwa yang harus dilestarikan keberadaanya agar tidak punah, 4). Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kelestarian suatu ekosistem.
- Pada kegiatan ini dilakukan pelepasan tukik kelaut sebanyak 250 ekor
- Manfaat kegiatan ini adalah terjaganya keberadaan spesies penyu dipeairan yang tetap menjamin keseimbangan alam.

10. Pembuatan Artificial Reef (Rumah Ikan) di Kawasan Konservasi Perairan Daerah

- Pelaksanaan kegiatan ini dipihak ketigakan yang dikerjakan oleh CV. Mitra Bahari, CV. Enalindo Utama di Perairan Kota Palopo dan CV. Bunga Daeng di perairan Luwu Utara pada bulan Desember 2016, namun sebelumnya telah dilakukan sosialisasi Rumah Ikan dilaksanakan di 3 (Tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Palopo pada tanggal 11 November 2016 dan Kabupaten Pangkep pada tanggal 9 Desember 2016.

- ✦ Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan daerah sekitar terumbu karang sebagai tempat koloni ikan dan biota laut lainnya yang dalam jangka panjang struktur bangunan terumbu karang buatan akan dipenuhi tumbuhan laut dan karang alami
- ✦ Output dari kegiatan ini adalah Rumah Ikan yang masing-masing terdiri dari 40 buah bangunan yang menempati dasar perairan dengan luasan ± 1 Ha.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah Meningkatnya perekonomian masyarakat wilayah pesisir dalam rangka menciptakan objek wisata bahari bawah laut selain itu memberikan fungsi mitigasi bencana dalam mencegah terjadinya abrasi pantai.

11. Studi Banding RZWP-3K Sulawesi Selatan di Provinsi Banten

- ✦ Pelaksanaan kegiatan studi banding dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 bertempat di Aula pertemuan DKP Provinsi Banten.
- ✦ Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah tim Pokja RZWP-3K Provinsi Banten dalam melakukan tahapan-tahapan penyusunan Dokumen RZWP-3K sehingga dapat meminimalkan kendala-kendala yang akan didapatkan dalam proses finalisasi dokumen.
- ✦ Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 (Dua puluh) peserta yang terdiri dari DKP Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Pokja dan tim Teknis RZWP-3K Provinsi Sulawesi Selatan
- ✦ Rekomendasi yang diberikan pada pertemuan ini agar tim Teknis dan Tim Pokja dapat lebih aktif untuk memaksimalkan adanya perda RZWP-3K Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2017.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab.

Kegiatan APBN

1. Penyiapan Daerah Terkait Dengan Izin Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- ✦ Penyiapan Daerah terkait Dengan Izin Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016 bertempat di Hotel Grand Town, Makassar

- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berkaitan reklamasi pantai dan agar tercipta pemahaman dari peserta mengenai peraturan perundang-undangan yang harmonis dan selaras dan dapat diimplemntasikan oleh pemerintah daerah beserta stakeholders dalam menerapkan prinsip perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- ✦ Peserta Kegiatan Penyiapan Daerah Terkait dengan Izin Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang yang berasal dari BPSPL Makassar, Bappeda Provinsi, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman provinsi Sulawesi Selatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), DKP Sulsel, Kab/Kota dan Perguruan Tinggi.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan dan pembangunan diwilayah P3K yang bijaksana dan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada khususnya.

2. Pertemuan Valuasi Ekosistem Mangrove

- ✦ Pertemuan Valuasi Ekosistem Mangrove dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Mei 2016 bertempat di Hotel Grand Imawan Makassar
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah 1). Meningkatkan pemahaman pengelola dengan adanya pedoman pengelolaan data statistik kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, 2). Mengidentifikasi poetnsi dan valuasi ekonomi mangrove serta data kelautan, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan alur proses penilaian ekonomi.
- ✦ Peserta kegiatan terdiri dari DKP kabupaten/Kota dan Provinsi. Jumlah peserta sebanyak 20 (Dua puluh) orang yang mewakili masing-masing institusi/lembaga.
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlu untuk mengetahui semua nilai valuasi dari ekosistem yang ada di wilayah P3K agar dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan diwilayah tersebut.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah terwujudnya suatu pengelolaan dan pemanfaatan SDA di wilayah P3K khususnya ekosistem mangrove yang bertanggung dengan mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan.

3. Penanaman Mangrove pada kegiatan Rehabilitasi Pesisir

- Penanaman Mangrove dilaksanakan pada Bulan Agustus 2016 berlokasi dikelurahan Salakoe, Kecamatan wara Timur Kota Palopo Sulawesi Selatan.
- Tujuan dari kegiatan ini adalah 1). Melestarikan fungsi dan kemampuan sumberdaya ekosistem mangrove guna menjalin kesinambungan dan pemanfaatannya dengan tetap berpedoman pada asas manfaat dan kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya alam, 2). Memulihkan fungsi dan peran ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi, tsunami, degradasi dan erosi pantai.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah terehabilitasinya kawasan pesisir seluas ± 1 Ha dengan penanaman mangrove sebanyak 10.000 batang dengan sistem berbaris.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah terjaganya wilayah pesisir dari kerusakan lingkungan seperti pencemaran, abrasi dan sebagainya.

4. Sosialisasi Mitigasi Bencana

- Kegiatan Sosialisasi Mitigasi bencana dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 November 2016 bertempat di Hotel Grand Asia Makassar
- Tujuan dari kegiatan ini adalah 1). Meningkatkan pemahaman masyarakat akan mitigasi bencana, 2). Membangun kesadaran kolektif didalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan gerakan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang bertanggung jawab, 3). Memberi motivasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan yang berbasis masyarakat terhadap aktivitas diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sifatnya "Destructive"
- Peserta dari pertemuan ini diikuti oleh 50 (Lima Puluh.) peserta yang terdiri dari DKP kab/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah Pengelolaan bencana didaerah pesisir harus dilakukan secara komprehensif sehingga dapat memveri manfaat dalam jangka panjang
- Manfaat kegiatan ini adalah terwujudnya kesadaran masyarakat dalam perlakuan/pemafaatan lingkungan disekitarnya sehingga dapat terlaksana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab.

5. Fasilitas RZWP-3K

- Kegiatan Fasilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 bertempat di Hotel Grand Asia, Makassar
- Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi kepada stakeholders terkait perkembangan penyusunan RZWP-3K Sulawesi Selatan dan menampung masukan maupun informasi dari stakeholders sebagai bahan rujukan percepatan penyusunan RZWP-3K SulSel.
- Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima Puluh) peserta yang terdiri dari instansi terkait ditingkat provinsi, DKP Kab/Kota, UPTD Pusat dan Perguruan Tinggi.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah agar tim Pokja RZWP-3K SulSel dapat memaksimalkan hasil yang telah diperoleh pada pertemuan ini, selain itu koordinasi terus dilakukan dengan KKP, dan DKP Kab/Kota untuk menyempurnakan dokumen awal RZWP-3K yang dibuat
- Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya dokumen RZWP-3K SulSel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K

6. FGD Harmonisasi Pengelolaan KKP/KKP3K

- FGD Harmonisasi Pengelolaan KKP/KKP3K dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2016 bertempat dihotel Raising, Makassar
- Kegiatan ini bertujuan untuk 1). Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konservasi diwilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan, 2). Mendorong dan menginisiasi terbentuknya lembaga pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), 3). Untuk menerima masukan dari stakeholders terkait tentang kelembagaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Selatan
- Pertemuan ini diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari DKP Provinsi, DKP Kab/Kota, Instansi terkait, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Rekomendasi dari pertemuan ini adalah untuk segera menyusun suatu model kelembagaan dan membentuk kelembagaan KKP/KKP3K di Provinsi Sulawesi Selatan

- Manfaat kegiatan ini adalah terbentuknya suatu kelembagaan yang dapat mengelola kawasan konservasi dengan baik sehingga pemanfaatannya dapat secara berkelanjutan dan menjamin tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir.

7. Sosialisasi Draft RZWP-3K Sulawesi Selatan

- Pelaksanaan Sosialisasi Draft RZWP-3K Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 09 November 2016 bertempat di Hotel Raising Makassar.
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan tanggapan dan masukan daripada stakeholders sebagai upaya klarifikasi dan juga koordinasi terhadap rencana pemanfaatan lahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dibuat dalam bentuk draft.
- Kegiatan Sosialisasi Draft RZWP-3K Sulawesi Selatan diikuti sebanyak 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari UPTD Pusat. Instansin terkait di tingkat provinsi, DKP Kab/Kota, Perguruan Tinggi dan LSM
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah disarankan agar kegiatan ini terus dikembangkan/dilaksanakan dipulau-pulau kecil lainnya, dengan tentunya memberikan dukungan materi yang maksimal sebagai upaya pendidikan dan penyadaran masyarakat.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah terwujudnya kelompok rehabilitasi dan kelompok mitigasi bencana/perubahan iklim yang mandiri dipulau-pulau kecil sehingga terciptanya pulau-pulau kecil yang memiliki ketahanan bencana/perubahan iklim.

8. Pertemuan Fasilitasi penyusunan RZWP-3K

- Kegiatan Pertemuan Fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) dilaksanakan pada tanggal 10 November 2016 bertempat di Hotel Raising, Makassar
- Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan klarifikasi, masukan dan juga koordinasi terhadap rencana pemanfaatan lahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah direncanakan sehingga dokumen yang nanti dihasilkan dapat lebih tepat dan efektif pemanfaatannya.
- Kegiatan ini diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari instansi terkait ditingkat provinsi, DKP Kab/Kota, UPTD Pusat dan Perguruan Tinggi.

- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah agar tim Pokja RZWP-3K SulSel dapat memaksimalkan hasil yang telah diperoleh pada pertemuan ini, selain itu koordinasi terus dilakukan dengan KKP, dan DKP Kab/Kota untuk menyempurnakan dokumen awal RZWP-3K yang dibuat
- Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya dokumen RZWP-3K SulSel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K

9. Pertemuan Fasilitasi dan Koordinasi Legislasi SK Kelembagaan KKP/KKP3K

- Pertemuan Fasilitasi dan Koordinasi .Legislasi SK Kelembagaan KKP/KKP3K dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016 bertempat di Hotel Grand Palace, Makassar.
- Tujuan kegiatan ini adalah adanya kesepakatan pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga adanya komitmen pembentukan kelembagaan untuk pengelolaan KKp/KKP3K di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pertemuan ini diikuti sebanyak 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari DKP Provinsi Sulawesi Selatan, DKP Kab/Kota, Instansi terkait tingkat Provinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah untuk segera menyempurnakan SK Kelembagaan yang dibuat agar pengelolaan KKPD yang ada di Sulawesi Selatan dapat lebih cepat berjalan/aktif
- Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

☞ Permasalahan

Pada pelaksanaan program kerja ditahun 2016, berbagai permasalahan yang didapatkan antara lain :

- Belum maksimalnya target peserta yang diharapkan kehadirannya di beberapa pertemuan.
- Keterlambatan beberapa proses administrasi kegiatan yang di pihak ketigakan.

- Adanya perubahan anggaran pada akhir semester pertama kegiatan

☞ Upaya pemecahan

Dalam memaksimalkan pencapaian target program kerja yang telah direncanakan, beberapa upaya pemecahan permasalahan yang dilaksanakan antara lain:

- Memaksimalkan kehadiran peserta pertemuan dengan mendatangkan stakeholder yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- Memantau pelaksanaan untuk kegiatan yang dipihak ketigakan untuk memaksimalkan target yang diinginkan.
- Memaksimalkan output yang diinginkan dalam perencanaan kegiatan tambahan yang ada setelah perubahan anggaran.

C. Seksi Perikanan Tangkap

APBD

- Pembinaan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap diwilayah Laut kewenangan Provinsi

a. Peningkatan Pengetahuan Nelayan Terhadap Layak Simpan Hasil Tangkapan

Kegiatan Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Nelayan Terhadap Layak Simpan Hasil dilaksanakan di beberapa kab/kota yaitu :

1. Kabupaten Sidrap

Waktu Pelaksanaan : 12 s/d 13 April 2016

Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Sidrap

Peserta : Nelayan

Maksud dan Tujuan : Untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan penanganan, Pengolahan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan sesuai dengan kaidah keamanan pangan sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkapan.

Hasil :

- 1). Perlunya disosialisasikan cara penanganan ikan hasil tangkapan layak simpan secara manual/teknologi yang sederhana yang disesuaikan dengan kondisi kapal nelayan yang sebagian besar adalah nelayan kecil dengan ukuran kapal antara 1 s/d 5 GT,
- 2). Palka ikan yang digunakan untuk kapal nelayan kecil sebaiknya dirancang sesuai dengan kondisi kapal/perahu apakah hanya berupa coolbox atau

modifikasi lainnya tetapi memenuhi persyaratan secara higienis untuk mempertahankan mutu ikan hasil tangkapan,

- 3). Perlu pembinaan secara berkesinambungan terhadap nelayan, khususnya terkait mutu hasil tangkapan dalam rangka peningkatan nilai jual dan peningkatan taraf hidup nelayan

2. Kabupaten Wajo

Waktu Pelaksanaan : 17 s/d 18 Mei 2016

Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Wajo

Peserta : Nelayan

Maksud dan Tujuan : Untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan penanganan, Pengolahan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan sesuai dengan kaidah keamanan pangan sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkapan.

Hasil :

- 1). Mutu ikan hasil tangkapan akan berpengaruh pada harga jual, sehingga dalam kegiatan usaha produksi akan berpengaruh pada:
 - Biaya usaha operasional penangkapan ikan yang telah dikeluarkan
 - Keuntungan yang diperoleh sebagai penghasilan usaha nelayan
 - Kelangsungan untuk membiayai operasi trip selanjutnya, biaya lainnya yang harus dikeluarkan seperti perawatan kapal, mesin, alat tangkap, penguatan hasil perikanan dan sebagainya.
- 2). Sebagian besar nelayan penangkap ikan dengan perahu dayung, kapal layar atau perahu motor kecil yang jarang memberikan es ikannya sehingga sesampainya dipasar sering ikan tersebut busuk sehingga dapat mempengaruhi harga jualnya
- 3). Usaha lain untuk mempertahankan kesegaran ikan adalah menutupinya dengan kain atau daun basah. Dengan menguapnya air pada lapisan penutup, suhu ikan tersebut akan menurun selain itu ikan harus terlindung dari pengaruh panas matahari, debu, dan kotoran lainnya.

b. Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan

Waktu Pelaksanaan : 27 s/d 29 November 2016

Tempat Pelaksanaan : Raising Hotel Makassar

Peserta : Petugas Teknis Bidang Perikanan Tangkap
Kab/Kota serta petugas Teknis Dinas Kelautan
dan Perikanan Prov. SulSel

Maksud dan Tujuan : Untuk meningkatkan pengetahuan nelayan terkait efektifitas penggunaan alat tangkap yang memenuhi standar secara teknis dan ramah lingkungan serta faktor-faktor produksi perikanan tangkap lainnya untuk meningkatkan hasil tangkapan sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Hasil

- 1) Pemilihan Teknologi Penangkapan Ikan didasarkan pada kriteria :
 - ◆ Selektivitas tinggi
 - ◆ Tidak destruktif terhadap habitat
 - ◆ Menghasilkan ikan yang bermutu baik
 - ◆ Produk tidak membahayakan konsumsi
- 2) Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan terdapat 8 jenis alat tangkap, termasuk dalam 4 kategori yaitu :
 - ◆ Sangat ramah lingkungan (Pancing)
 - ◆ Ramah Lingkungan (Bubu, Jaring Insang Permukaan)
 - ◆ Merusak (Jala, Jaring Insang Dasar)
 - ◆ Sangat merusak (Bom, Bius dan bameti)

c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap meliputi Kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Pangkep, Barru, Selayar, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Bulukumba
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap meliputi : Kabupaten Bulukumba, Wajo, Sinjai, Baru dan Kota Pare-Pare
- Identifikasi Alat Penangkapan Ikan meliputi Kabupaten Pinrang, Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Wajo, Bone, Luwu, Takalar, Jeneponto, Kota Palopo dan Pare-Pare

➤ Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

a. Bimtek Pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Waktu Pelaksanaan : 02 s/d 04 Agustus 2016

Tempat Pelaksanaan : Hotel Jolin Makassar

Peserta : Kepala Dinas DKP Kab/Kota, Pengelola Pelabuhan Perikanan Kab/Kota serta petuga teknis DKP Prov. SulSel

Maksud dan Tujuan : Untuk memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan bagin aparat pemerintah yang menangani pelabuhan perikanan dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan.

Hasil

- 1) Pembangunan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pengembangan ekonomi
- 2) Pembangunan pelabuhan perikanan dilingkar luar wilayah kepulauan Indonesia dan daerah perbatasan
- 3) Konektivitas/jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan dengan strategi integrasi sistem informasi antar pelabuhan perikanan
- 4) Pembangunan Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung hasil perikanan yang memenuhi standar mutu
- 5) Pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan

b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Evaluasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan meliputi Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, Pinrang, Luwu Timur, Jeneponto, Pangkep
- Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan meliputi Kota Pare-Pare, Palopo, Kabupaten Sidrap, Luwu, Bantaeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Barru, Takalar, Jeneponto, Selayar.

➤ Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap serta Teknologi Penangkapan Ikan Spesifik Daerah

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap serta Teknologi Penangkapan Ikan Spesifik Daerah terdiri dari belanja kursus-kursus singkat/pelatihan dan paket yang diserahkan kemasyarakat.

Kegiatan kursus-kursus singkat meliputi : 1). Pengembangan Kelembagaan Kelompok Plasma Penangkapan Tuna, Tongkol Cakalang, 2). Pertemuan pengembangan Produksi Hasil Tangkapan, 3). Pertemuan Tata Kelola Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman, 4). Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat

➤ **Pemantauan dan Pembinaan Penggunaan Kapal Perikanan Berukuran 10 s/d 30 GT**

- Monitoring dan Evaluasi meliputi Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, Pinrang, Luwu Timur, Jeneponto, Pangkep Bone
- Cek fisik dan penandaan Kapal Perikanan meliputi Kota Pare-Pare, Kab. Maros, Sinjai, Pangkep, Bone

➤ **Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap**

- Pengumpulan data sarana dan prasarana Perikanan Tangkap meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Pinrang, Wajo, Bantaeng dan Kota Pare-Pare
- Monev KUBH penerima paket meliputi kabupaten Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai dan Bone
- Verifikasi KUB Calon Penerima Paket meliputi kabupaten Luwu, Sinjai, Bulukumba, Pinrang, Luwu Utara

➤ **Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap**

Kegiatan penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap meliputi kegiatan pengumpulan data statistik di Kab/Kota serta cetak buku statistik perikanan tangkap tahun 2015

APBN

1. Rancang Bangun Kapal Perikanan

Waktu Pelaksanaan : 22 September 2016
Tempat Pelaksanaan : Grand Town Hotel Makassar
Peserta : Petugas Teknis DKP Kab/Kota, Pengrajin Kapal
serta ptugas Teknis DKP Prov. SulSel

Maksud dan Tujuan :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas teknis kab/kota dan pengrajin kapal perikanan tentang rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan
- 2) Menyamakan persepsi tentang kontruksi, rancang bangun kualitas serta materi yang digunakan untuk pembuatan sebuah kapal perikanan
- 3) Meningkatkan pengetahuan petugas teknis tentang persyaratan dokumen, prosedur pengawasan, perlengkapan kapal dan keselamatan kapal

Hasil :

- 1) Proses perencanaan pembangunan kapal hampir dapat dipastikan sebagian besar pelaksanaannya tidak berdasarkan gambar rancang bangun dan spesifikasi teknis.
- 2) Pemilik kapal harus menentukan target ikan apa dan hasil tangkapan seperti apa yang akan didaratkan. Informasi ini akan mempengaruhi kriteria teknik penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, perlengkapan penangkapan ikan, jumlah awak kapal, akomodasi, kecepatan kapal, ukuran palka, jenis palka dan pengawetan ikan yang diinginkan.
- 3) Kapal perikanan harus mempunyai kemampuan jelajah untuk menempuh jarak yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan perairan.
- 4) Dalam pembangunan kapal perikanan dimasa mendatang, aspek keselamatan kapal akan mendapat perhatian yang lebih besar dan lebih baik lagi sehingga setiap kapal perikanan yang dibangun dapat memenuhi ketentuan layak laut, layak tangkap dengan mengacu pada prinsip keamanan, kenyamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan.

2. Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Waktu Pelaksanaan : 09 – 11 Mei 2016

Tempat Pelaksanaan : Grand Town Hotel Makassar

Peserta : Pengurus/anggota Kelompok Nelayan Kab/Kota

Maksud dan Tujuan : untuk meningkatkan kompetensi awak kapal dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, penanganan, pengolahan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan sehubungan dengan tuntutan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan adanya pengakuan resmi dari lembaga independen terhadap profesi awak kapal perikanan dalam penanganan ikan yang bertanggung jawab.

Hasil :

- 1) Kegiatan penangkapan ikan dilaut merupakan pekerjaan yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pentingnya peningkatan kesadaran awak kapal tentang keselamatan kerja.
- 2) Mengingat karakteristik pekerjaan pada kapal penangkap ikan berbeda dengan kapal lainnya, maka disarankan pengaturan keselamatan awak

kapal, standar kapal penangkap ikan, pendidikan dan pelatihan, pengawakan, persyaratan kerja pada kapal penangkap ikan.

- 3) Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses penanganan diatas kapal diantaranya adalah: alat penanganan, media pendingin, teknik penanganan, keterampilan pekerja.
- 4) Perlunya pembinaan secara berkesinambungan terhadap nelayan, khususnya terkait mutu hasil tangkapan dalam rangka peningkatan nilai jual dan peningkatan taraf hidup nelayan.

3. Rapat Identifikasi Kelompok Penerima Kapal, Evaluasi Operasional dan Produktifitas Kapal Bantuan

Waktu Pelaksanaan : 28 – 29 Juni 2016

Tempat Pelaksanaan : Jolin Hotel Makassar

Peserta : Kepala Dinas Kab/Kota , Pengurus koperasi calon penerima kapal bantuan tahun 2016 dan KUB penerima kapal Inka Mina

Maksud dan Tujuan :

- 1) Mengevaluasi pengelolaan kapal bantuan tahun 2010 – 2014
- 2) Menginventarisasi data operasional dan produktivitas kapal dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan kapal bantuan tahun 2010 – 2014
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan data entry aplikasi monitoring kapal bantuan

Hasil :

Program kegiatan Inka Mina berlangsung pada tahun 2010 – 2014, beberapa permasalahan kapal Inka Mina di Sulawesi Selatan antara lain :

- Penerbitan Dokumen Kapal
Belum terbitnya surat ukur, Gross Akte sampai dengan berakhirnya tahun waktu pembangunan
- Penerbitan SIUP dan SIPI
Belum terbit sampai dengan akhir tahun pembangunan
- Sumberdaya Manusia
Nelayan sudah terbiasa mengoperasikan kapal dengan GT kecil, sehingga untuk mengoperasikan kapal diatas 30 GT perlu dilakukan pelatihan/peningkatan keterampilan

➤ Biaya Operasional

Biaya operasional untuk kapal Inka Mina cukup besar

4. Harmonisasi Implementasi Pelaksanaan Cath Sertificate di PP dalam rangka Mencegah IUU Fishing

Waktu Pelaksanaan : 29 – 30 Juni 2016

Tempat Pelaksanaan : Jolin Hotel Makassar

Peserta : Instansi terkait dan peserta dari DKP Kab/Kota

Maksud dan Tujuan :

- 1) Memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa
- 2) Membantu upaya Nasional atau Internasional dalam memberantas kegiatan IUU Fishing
- 3) Memastikan penelusuran hasil tangkapan ikan pada tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran
- 4) Melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan

Hasil :

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulSel dan DKP Kab/Kota berkomitmen untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan meningkatkan produksi dan pendapatan, untuk menuju cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan.

5. Sosialisasi Pemanfaatan Data PIPP

Waktu Pelaksanaan : 12 Mei 2016

Tempat Pelaksanaan : Grand Town Hotel Makassar

Peserta : Petugas Teknis Pelabuhan dan syahbandar yang menangani Data pelabuhan perikanan di kab/kota

Maksud dan Tujuan :

- 1) Menyediakan data dan informasi tentang profil pelabuhan perikanan diseluruh Indonesia, proses bongkar muat dipelabuhan perikanan, jenis ikan yang dilakukan bongkar muat pada pelabuhan.

- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi dan efisien.
- 3) Mendukung Operasional pelabuhan perikanan di Sulawesi Selatan
- 4) Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Hasil : Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) sebagai suatu sistem informasi yang dibangun oleh KKP patut diapresiasi dengan membangun sistem pendataan lapangan yang valid, dimana kunci dari kualitas data yang dihasilkan terletak pada enumerator dan petugas pendataan yang melakukan input data pada sistem ini. Bilamana sistem ini telah berjalan dengan baik, maka interkoneksi dan integrasi antar pelabuhan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

6. Peningkatan Pelayanan Perizinan di Provinsi (SIM Daerah)

Waktu Pelaksanaan : 15 – 16 April 2016

Tempat Pelaksanaan : Max One Hotel Makassar

Peserta : Petugas yang menangani perizinan kapal atau pencatatan kapal perikanan dikab/kota, Syahbandar PPI Paotere, Staf pengawas SDKP dan Bina Usaha, Staf PTSP BKPMMD yang menangani Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)

Maksud dan Tujuan :

- 1) Melakukan sosialisasi terhadap regulasi termasuk peraturan perundang-undangan tentang izin kapal perikanan, mekanisme dan tatacara memperoleh izin bagi kapal perikanan serta kewenangan pemberian izin kapal perikanan.
- 2) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penerbitan izin kapal perikanan khususnya untuk izin kapal kewenangan daerah.
- 3) Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin di daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses perizinan.
- 4) Meningkatkan ketertiban pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap di daerah untuk kapal perikanan, mengetahui kelengkapan dokumen penting sebagai syarat dalam penerbitan izin kapal perikanan

Hasil :

- 1) Mendukung upaya penanggulangan IUU Fishing.
- 2) Mendapatkan data dan informasi untuk penilaian tingkat kepatuhan suatu kapal perikanan terhadap penerapan logbook, VMS, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasi (SLO). Hasil penilaian menjadi salah satu pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan SIPI/SIK bagi Pelayanan Penerbitan SHTI, pelaksanaan Logbook, penerbitan SPB dan aplikasi pendukung pengelolaan perikanan tangkap
- 3) Kondisi basis data integrasi yang diharapkan adalah adanya integrasi sistem izin pusat dengan daerah, daerah dengan daerah akan lebih mudah untuk menentukan pengambilan kebijakan.

7. Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap

Waktu Pelaksanaan : 14 – 15 April 2016

Tempat Pelaksanaan : Max One Hotel Makassar

Peserta : Petugas pengolah data statistik perikanan
Tangkap kab/kota

Maksud dan Tujuan :

- 1) Kegiatan pertemuan Validasi Data Statistik Perikanan tangkap kab/kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas data statistik perikanan tangkap.
- 2) Mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengambilan data dilapangan.

Hasil : Tahapan yang dilalui dalam proses penyajian data adalah dimulai dari pelaksanaan pengumpulan data dilapangan, pemeriksaan data, pengolahan data, penyusunan data kuartalan dan tahunan serta pengiriman data ke tingkat Provinsi. Data yang dikirim ke provinsi selanjutnya akan diperiksa dan diolah kembali dan selanjutnya akan diteruskan ke tingkat pusat untuk dipublikasikan secara Nasional

8. Sosialisasi Rumah Ikan di Kabupaten Wajo

Waktu Pelaksanaan : 17 Mei 2016

Tempat Pelaksanaan : Ruang Aula Kantor Desa Cenrae Kelurahan
Akkajaeng, Kec. Sajoanging Kab. Wajo

Peserta : Masyarakat nelayan yang bermukim disekitar Desa Cenranae kelurahan Akkajeng Kec. Sajoanging kab. Wajo yang melakukan penangkapan ikan disekitar Teluk Bone, anggota kelompok Pokmaswas, kelompok Konservasi dan aparat dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo

Maksud dan Tujuan :

- 1) Menyampaikan informasi kepada masyarakat dan nelayan disekitarnya tentang fungsi rumah ikan, manfaat rumah ikan bagi nelayan dan bagi keberlanjutan stok ikan diperairan sekitar penempatan rumah ikan tersebut
- 2) Rumah ikan berfungsi menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan melalui introduksi struktur buatan sebagai area khusus yang diharapkan dapat mempengaruhi atau menggantikan sebagian peran/fungsi ekologis habitat alami sumberdaya ikan
- 3) Melakukan restocking disekitar areal rumah ikan

Hasil :

- 1) Dengan adanya rumah ikan diharapkan bahwa tujuan pengembangan rumah ikan untuk melindungi organisme terutama sumberdaya ikan, melindungi area asuhan dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas alami melalui suplai habitat baru bagi ikan dan organisme dapat terwujud pada akhirnya meningkatkan produksi tangkapan nelayan dan kesejahteraan nelayan disekitar perairan tersebut.
- 2) Respon masyarakat Desa Cenrae Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo sangat positif dan antusias dalam mendukung program rumah ikan dan yang paling penting adalah pengawasan ekosistem sekitarnya agar tidak terjadi IUU Fishing.

9. Sosialisasi Rumah Ikan di Kabupaten Selayar

Waktu Pelaksanaan : 26 Mei 2016

Tempat Pelaksanaan : Ruang Aula Kantor Desa Manara Indah
Kec. Bontomate'ne Kab. Selayar

Peserta : Masyarakat nelayan yang bermukim disekitar perairan di Pulau Pasik. Desa Manara Indah, Kec. Bontomate'ne kab. Selayar, anggota kelompok Pokmaswas, kelompok Konservasi dan aparat dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar

Maksud dan Tujuan :

- 1) Menyampaikan informasi kepada masyarakat dan nelayan disekitarnya tentang fungsi rumah ikan, manfaat rumah ikan bagi nelayan dan bagi keberlanjutan stok ikan diperairan sekitar penempatan rumah ikan tersebut
- 2) Rumah ikan berfungsi menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan melalui introduksi struktur buatan sebagai area khusus yang diharapkan dapat mempengaruhi atau menggantikan sebagian peran/fungsi ekologis habitat alami sumberdaya ikan
- 3) Melakukan restocking disekitar areal rumah ikan

Hasil : Dengan adanya rumah ikan diharapkan bahwa tujuan pengembangan rumah ikan untuk melindungi organisme terutama sumberdaya ikan, melindungi area asuhan dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas alami melalui suplai habitat baru bagi ikan dan organisme dapat terwujud pada akhirnya meningkatkan produksi tangkapan nelayan dan kesejahteraan nelayan disekitar perairan tersebut dan yang paling penting adalah pengawasan rumah ikan agar tidak terjadi lagi IUU Fishing.

Permasalahan yang dihadapi oleh Seksi Perikanan Tangkap selama tahun 2016 yaitu:

- 1) Pengurusan SIUP, SIPI dan SIKPI harus dilampirkan laporan cek fisik kapal perikanan, sedangkan petugas cek fisik kapal perikanan sangat terbatas
- 2) Nelayan tidak dapat melakukan andon karena belum ada perjanjian kerjasama antar gubernur
- 3) Logbook kapal perikanan belum berjalan dengan baik
- 4) Pelabuhan Perikanan yang tidak operasional meskipun memiliki fasilitas yang layak operasional disebabkan :
 - Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas untuk pengelolaan pelabuhan perikanan
 - Adanya pelabuhan tangkahan dari masing-masing punggawa nelayan

- Lokasi pelabuhan jauh dari pemukiman nelayan dan bukan lokasi konsentrasi nelayan
- Pemilihan lokasi peencanaan pelabuhan tidak selektif

Upaya Pemecahan yang akan dilakukan yaitu :

- 1) Perlu penambahan petugas cek fisik kapal serta membuka gerai perizinan
- 2) Tindak lanjut draf kerjasama antara provinsi oleh Biro Kerjasama
- 3) Perlunya sosialisasi terkait penerapan logbook kapal perikanan
- 4) Peningkatan SDM dalam pengelolaan Pelabuhan perikanan.

4.4.3 Pengawasan dan Pengendalian SDKP

Tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan dibidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah :

- Meningkatkan pelestarian SDKP melalui perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Destructive fishing* dan *Illegal fishing*.
- Mewujudkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan.

Sasarn pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan adalah : (1) Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP diwilayah pengelolaan perikanan Sulawesi Selatan secara terintegrasi, (2) Meningkatkan tertib usaha sesuai ketentuan, (3) Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang bebas *Illegal fishing* dan *Destruktif fishing*, (4) Terlaksananya penyelesaian tindak pidana perikanan secara akutabel dan tepat waktu.

Strategi pengawasan SDKP : (1) *Preventive* adalah pencegahan offense sebelum terjadinya pelanggaran diwilayah kelautan dan perikanan, (2) *Persuasif* adalah pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkan kesadaran tidak melanggar hukum, (3) *Responsif* adalah reaksi cepat dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana.

Ada 3 (tiga) kegiatan pokok yang terdapat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP yaitu :

a. Sarana dan Prasarana Pengawasan

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, masih banyak permasalahan yang dialami seperti kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir termasuk kerusakan terumbu karang, pencemaran diberbagai kawasan pesisir dan laut.

Guna mendukung pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, ada beberapa program yang dilaksanakan oleh seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Penyusunan dan publikasi data pengawasan dan pengendalian pengawasan
2. Koordinasi dan pembinaan sarana dan prasarana pengawasan
3. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

Adapun Data hasil Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kabupaten Takalar

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Pos Pengawasan	Sanrobone	Ujung Baji	1 unit	2014	-	-	-	Baik	
		Galesong	Boddia	-	-	-	-	-	-	
		Marbo	Topejawa	-	-	-	-	-	-	
		Mapsu	Mattirobaji	-	-	-	-	-	-	
		Sanrobone	Laguruda	-	-	-	-	-	-	
		Mapsu	Takalar	2 unit	2010	-	-	-	1 unit rusak	
2	Speed Boat	Galesong	Boddia	1 unit	-	-	-	-	Baik	Dipinjam TNI-AL
		Gal-Baru	1 unit	2011	-	-	-	-	Rusak	
3	Perahu Fiber	Gal. Kota	1 unit	-	-	-	-	-	-	
		Boddia	1 unit	-	-	-	-	-	-	
		Bonto Kanang	1 unit	-	-	-	-	-	-	
		Gal-Ut	Tamasaju	1 unit	-	-	-	-	Baik	
		Mapsu	Takalar	1 unit	-	-	-	-	-	
		Marbo	Laikang	1 unit	-	-	-	-	-	
4	Perahu Jalepa	Mapsu	Rewataya	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
		Mattiro Baji	1 unit	-	-	-	-	-	-	
		Maccini Baji	1 unit	-	-	-	-	-	-	
		Tompo Tanah	1 unit	-	-	-	-	-	-	
		Balang Datu	1 unit	-	-	-	-	-	-	
5	Kamera Digital	-	-	16 unit	2014	-	2014	-	-	Untuk POKMASWAS
6	HT	-	-	10 unit	2014	-	-	-	-	Untuk POKMASWAS
7	HP	Mapsu	Balang Datu	2 unit	-	-	2015	-	-	Bantuan DKP Prov.
				1 buah	-	-	2015	-	-	Bantuan DKP Prov.

– SDM Pengawasan

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Ir. Abd. Hakim Ishak	√		

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGO	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KETERANGAN
1.	Sipakatau	15	Ibnu Hajar	Desa. Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara	SK. Bupati Takalar Tahun 2006	Perikanan	Aktif
2	Veri Sejahtera	20	Saharuddin Dg. Tunru	Desa Tamalate, Kec. Galesong Utara	SK. Bupati Takalar No. 401 Tahun 2006 Tgl. 29 Sept 2006	Perikanan	Aktif
3	Sitalassi	10	Aswandi Dg. Duni	Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara	SK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 523.2/023/I/2011 Tgl 11 Januari/2011	Perikanan	Aktif
4	Sanrobengi	15	Ripai Nai	Desa Galesong Baru Kec. Galesong Kota	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523.2/15.a/I/2008 Tgl 24 Jan 2008	Perikanan	Aktif
5	Hunter	30	M. Ramli Liong	Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523.2/15.a/I/2008 Tgl 24 Jan 2008	Perikanan	Aktif
6	Perintis Bahari	30	Mustari Tantu	Desa Bontomarannu Kec. Galesong Selatan	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523.2/309.c/XII/2008 Tgl 4 Des 2008	Perikanan	Aktif
7	Tottallasa	30	Amaluddin Dg. Pasang	Kel. Takalar Kec. Mappakasunggu	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523.2/15.a/I/2008 Tgl 24 Jan 2008	Perikanan	Aktif
8	Mattirobaji	13	Abdul Rahim	Desa Mattiro Baji Kec. Mappakasunggu	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523/120.c/IV/2010 Tgl 21 Apr 2010	Perikanan	Aktif
9	Maccinibaji	12	Rusli Dg. Sutte	Desa Maccini Baji Kec. Mappakasunggu	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523/120.c/IV/2010 Tgl 21 Apr 2010	Perikanan	Aktif
10	Rewataya	11	Abdul Aziz Dg. Tunru	Desa Rewataya Kec. Mappakasunggu	SK. Kepala Dinas KP No. SK. 523/14.c/I/2013Tgl 08 Januari 2013	Perikanan	Aktif
11	Balang Datu	13	Abd. Malik Dg. Ngewa	Desa Balang Datu Kec. Mappakasunggu	SK. Kepala Dinas KP No. SK. 523/14.c/I/2013Tgl 08 Januari 2013	Perikanan	Aktif
12	Tompo Tanah	13	Haris Dg. Nangga	Desa Tompo Tanah Kec. Mappakasunggu	SK. Kepala Dinas KP No. SK. 523/14.c/I/2013Tgl 08 Januari 2013	Perikanan	Aktif
13	Garudayya	30	Hasanuddin Sila	Desa Laikang Kec. Mangarabombang	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523.2/15.a/I/2008 Tgl 24 Jan 2008	Kelautan	Aktif
14	Intel Bahari	30	Saifulla Eppe	Desa Topejawa Kec. Mangarabombang	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523.2/309.c/XII/2008 Tgl 4 Des 2008	Perikanan	Aktif
15	Buser Bahari	30	Sayye Dg. Ngampa	Desa Galesong Kota Kec. Galesong	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523.2/309.c/XII/2008 Tgl 4 Des 2008	Perikanan	Aktif
16	Lestari Bahari	30	Saharuddin Dg. Tayang	Desa Boddia Kec. Galesong	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523.2/309.c/XII/2008 Tgl 4 Des 2008	Perikanan	Aktif
17	Bahari Bersatu	30	Jamaluddin Sutte	Desa Laqaruda kec. Sanrobone	SK. Kepala Dinas KP Kab. Takalar No. 523.2/309.c/XII/2008 Tgl 4 Des 2008	Perikanan	Aktif
18	Lestari alam Samudra	15	Achmad Yusuf Mile	Desa Ujung Baji Kec. Sandrobone	SK. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan No. SK. 523/494/III/2014 Tgl 10 Maret 2014	Perikanan	Aktif
JML		377					18 Aktif

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove				964	964				
2	Terumbu Karang				2,650	2,650				
3	Padang Lamun				1,500	1,500				

– Tindak Pidana Perikanan

NO	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT	WAKTU	PELAKU	BARANG BUKTI	INSTANSI YANG MENANGANI	SANGKAAN PASAL	TINDAK LANJUT	KET
1	DESTRUCTIVE FISHING		11/4/2016					P21	

KET: P21: Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap dari kepolisian ke kejaksanaan

2. Kabupaten Maros

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II	
1	Speed Boat	-	-	1 unit	-	-	-	2010	Rusak Parah
2	Handy Talk	Maros Baru	Borimasunggu	1 unit	-	-	-	2014	Baik
		Lau	Soreang	1 unit	-	-	-	2014	Baik
		Marusu	Nisombalia	1 unit	-	-	-	2014	Baik
		Bontoa	Pajukukung	1 unit	-	-	-	2014	Baik
3	Handy Talk	Maros Baru	Borimasunggu	1 unit	-	-	-	2015	Baik
		Lau	Soreang	1 unit	-	-	-	2015	Baik

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO	NAMA KELOMPOK	JML ANGGO	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	ket
1.	Mina Bahari	10	M. Ruslan Manye	Desa Nisombalia Kec. Marusu	SK Bupati No. 55/KPTS/523.1/1/2008/ Tgl 7 Januari 2008	Perikanan	Aktif
2	Minasa Baji	10	Supriadi	Kel. Bori Masunggu Kec. Maros Baru	SK Bupati No. 55/KPTS/523.1/1/2008/ Tgl 7 Januari 2008	Perikanan	Aktif
3	Sejahtera	10	Arsyad Rauf	Kel. Soreang Kec. Lau	SK Bupati No. 55/KPTS/523.1/1/2008/ Tgl 7 Januari 2008	Perikanan	Aktif
4	Sipakatau	10	H. Syarifuddin P. Ngesa	Desa Pajukukung Kec. Bontoa	SK Bupati No. 55/KPTS/523.1/1/2008/ Tgl 7 Januari 2008	Perikanan	Aktif
		40					4 Aktif

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove	Kec. Maros baru		Borimasunggu	42.20	22.8	5.4	14		
		Marusu		Nisombalia	42.20	23.4	4.8	14		
				Pabbentengan	45.00	19.6	10.4	15		
		Bontoa		Bonto Bahari	15.70	8.7	3	4		
				Pa'jukukung	12.20	6.8	2.4	3		
				Ampekale	96.00	48.7	24.3	23		
		Lau		Marannu	31.40	16.4	5	10		
				Luas Total	284.70	146.4	55.3	83		

– Tindak Pidana Perikanan

NO	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT	WAKTU	PELAKU	BARANG BUKTI	INSTANSI YANG MENANGANI	SANGKAAN PASAL	TINDAK LANJUT	KET
1	Pelanggaran Dokumen		agust. 2016					P21	
2	Pelanggaran Dokumen		agust. 2016						
3	Pelanggaran Dokumen		agust. 2016						

KET: P21: Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap dari kepolisian ke kejaksaan

3. Kabupaten Pangkep

- a. Data Sumberdaya Perikanan
– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Speed Boat	-	-	2 unit	-	-√	-	-	-	
2	Speed Boat	-	-	1 unit	-	-	-	√	-	
3	Pelampung	-	-	25 buah	2015	-	-	-	Baik	
4	GPS	-	-	4 buah	2015	-	-	-	Baik	
5	Alat Diving	-	-	10 unit	2014	-	-	-	Baik	
6	Teropong	-	-	1 buah	2010	-	-	-	Baik	
7	Kantor Pos PSDKP	Labakkang	Pundata baji	1 unit	2015	-	-	-	Baik	

- SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Asrul S.Pi	√		aktif
2	Sanawiah ST	√		aktif

- Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KET
1	Mattiro Bintang	12	Nasir	Desa Mattiro Bintang, Kec.Liukang Tupabbiring Utara	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
2	Mattiro Bombang	9	Jumardi	Desa Mattiro Bombang Kec.Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
3	Mattiro Walle	10	Jamaluddin	Desa Mattiro Walle, Kec.Liukang Tupabbiring Utara	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
4	Sinar Bahari	10	M. Haris, A.Md	Desa Mattiro Deceng Kec.Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
5	Mattiro Matae	10	Syarifuddin	Desa Mattiro Matae Kec. Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
6	Mattiro Labangeng	12	Syarifuddin Dg. Takko	Desa Mattiro Labangeng Kec. Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
7	Mattiro Dolangeng	7	Muh. Ilyas	Desa Mattiro Dolangeng Kec.Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
8	Mattiro Kanja	7	Abd. Rahman	Desa Mattiro Kanja Kec. Liukang Tupabbiring Utara	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
9	Mattiro Langi	19	Rahimi	Desa Mattiro Langi Kec. Liukang Tupabbiring Utara	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
10	Komando	15	Muh. Ridwan	Desa Mattiro Bone Kec. Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
11	Mattiro Uleang	5	Dg. Mitu	Desa Mattiro Uleang Kec. Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
12	Mattiro Adae	8	Ali Ansar S.Pd	Desa Mattiro Adae Kec. Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
13	Mattiro Ujung	9	Sarifuddin	Desa Mattiro Ujung Kec. Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
14	Mattiro Sompe	10	Makmur	Desa Mattiro Sompe Kec. Liukang Tupabbiring Utara	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
15	Mattiro Baji	11	Hamirullah	Desa Mattiro Baji Kec. Liukang Tupabbiring Utara	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
16	Mattiro Bulu	5	H. Anwar	Desa Mattiro Bulu Kec. Liukang Tupabbiring	SK Kadis KP Kab. Pangkep No.08/I/Tahun 2015 Tgl. 02 Januari 2015	Konservasi	Aktif
		159					16 Aktif

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove	-	-	-	1,627	164.6	67	1,395	89.9	
2	Terumbu Karang	-	-	-	37,400	7,480	11,220	18,700	80.0	
3	Padang Lamun	-	-	-	3,857	1,721	323	1,813	55.4	
Luas Total					42,884	9,366	11,610	21,908		

– Tindak Pidana Perikanan

NO	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT	WAKTU	PELAKU	BARANG BUKTI	INSTANSI YANG MENANGANI	SANGKAAAN PASAL	TINDAK LANJUT	KET
1	Pembiasan Ikan (Potassium) 5 kasus		2016					Lidik. (tidak cukup bukti / terbukti)	
2	Dokumen		2016					Lidik/Sidik (T.P Ringan)	
3	Handak (Bom) 4 kasus		2016					P21	

KET: P21: Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap dari kepolisian ke kejaksaan

4. Kabupaten Barru

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Speed Boat	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2006	-	-	-	Rusak berat	
2	Global Positioning System	Barru	Sumpang Binangae	3 unit	2008	-	-	-	Rusak berat	
3	(GPS)	Barru	Sumpang Binangae	2 unit	2013	-	-	-	Baik	
4	Speed Boat	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
5	Radio Oldband	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
6	TV Flat LED Toshiba	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
7	Bak Penampungan air	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
8	Teropong binokular	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
9	Lemari kayu	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
10	Tangga kayu	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
11	Pengaman jendela	Barru	Sumpang Binangae	9 unit	2013	-	-	-	Baik	
12	Pengaman pintu	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
13	Handy talkie	Barru	Sumpang Binangae	3 unit	2013	-	-	-	Baik	
14	Kapal Motor Pengawasan	Mallusetasi	Sumpang Binangae	1 unit	2014	-	-	-	Baik	
15	Kamera	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2014	-	-	-	Baik	
16	Handy Talkie	Barru	Sumpang Binangae	3 unit	2014	-	-	-	Baik	
17	Sepeda motor	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
18	Mobil Kendaraan Operasional	Barru	Sumpang Binangae	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
19	Perahu Pokmaswas	Tanete Rilau	Sumpang Binangae	1 unit	2015	-	-	-	Baik	

– SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Ir. Andi Sidda		√	
2	Muh. Ibrahim, S.Sos	√		
3	Hendra, S.Pi		√	
4	Drs. Ramli Lacca		√	
5	Nasri, S.Sos		√	
6	Muh. Kasim		√	
7	Nasriadi		√	
8	Agus		√	
9	A. Fadli		√	

– Tindak Pidana Perikanan

NO	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT	WAKTU	PELAKU	BARANG BUKTI	INSTANSI YANG MENANGANI	SANGKAAN PASAL	TINDAK LANJUT	KET
1	TRAWL MINI		14/07/2016					P21	
2	TRAWL MINI		14/07/2016					P21	
3	TRAWL MINI		14/07/2016					P21	

KET: P21: Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap dari kepolisian ke kejaksaan

5. Kota Pare Pare

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II	
1	Speedboat Pengawas	-	-	1 unit	2007	-	-	-	Rusak

– SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Hj. Mardianawati	-	√	
2	Abdillah, S.Pi	-	√	
3	Iswahyuddin, S.Pi	-	√	

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KET
1	Bagan Lolo	16	Ali Hafid	Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang	SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Pare-Pare No. 523/255a/ Tahun 2014 Pada Tgl 8 Agustus 2014	Perikanan	Aktif
2	Lai Balessa	11	Ahmad Yani	Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat	SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Pare-Pare No. 523/35 Tahun 2014 Pada Tgl 8 Agustus 2014	Perikanan	Aktif
		27					2 Aktif

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove	-	-	-	1	1	-	-	-	
2	Terumbu Karang	-	-	-	3	3	-	-	-	
3	Pasir Laut	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	

6. Kabupaten Pinrang

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Peralatan alat komunikasi	Wt. Sawitto	-	-	2012	-	-	2012	Baik	
2	Pos Pengawasan		-	-	-	-	-	-	Baik	
3	Gedung Pos Pengawasan	Suppa	Ujung Labuang	1 unit	2012-2013	-	-	2012-2013	Baik	
4	Speed Boat	Suppa	Wiring Tasi	1 unit	2015	-	-	-	Baik	Pinjam pakai dari provinsi
5	Gedung Pos Pengawasan	Lembang	Sabbang paru	1 unit	2014-2015	-	-	2014-2015	Baik	
6	Peralatan Toolkit (GPS)	Wt. Sawitto		2 unit	2015	-	-	2015	Baik	
7	Kendaraan roda dua	Wt. Sawitto		2 unit	2015	-	-	-	Baik	
8	Rompi Pokwasmas	Duampanua	Kel. Data	20 unit	-	-	-	2015	Baik	Diserahkan ke klp (hibah)
9	Kasco Speed Boat	Suppa	Kel. Tellumpanua	1 unit	2015	-	-	2015	Baik	

– SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Ir. Budaya	-	√	
2	Drs. Amir kawa, M.Si	-	-	
3	Hj. Suriani, M.Si	-	√	
4	Yohanis	-	√	
5	Pahmi, S.Pi	√	-	
6	H. Lutfi, S.Pi	√	-	

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOT	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KETERANGAN
1	Bina Bahari	23	Muh. Basir Basiru	Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang	DKP No. 523/270/DKP	Penangkapan Ikan	AKTIF
2	Bina Bahari	17	Syarifuddin	Desa Sabang Paru Kec. Lembang	Kepala Desa No. 16/DSP-LB/2013	Penangkapan Perikanan	AKTIF
3	Sinar Bahari	26	Herman	Kel. Langnga Kec. MT. Sompe	Lurah No. 04/KL/X/2013	Penangkapan Ikan	AKTIF
4	Bahari	31	H. Muh. Ahmad	Desa Lero Kec. Suppa	SK Kepala Dinas KP Kab. Pinrang No 523/238/DKP	Penangkapan Ikan	AKTIF
5	Samaturue	25	ibnu Hajar	Kel. Pallameang Kec. MT. Sompe	SK Kepala Dinas KP Kab. Pinrang No 523/238/DKP Tgl 7 Maret 2010	Penangkapan Ikan	TIDAK AKTIF
6	Matunru-tunrue	25	Muh. Rum	Desa Maroneng Kec. Duampanua	SK Kepala Dinas KP Kab. Pinrang No 523/238/DKP	Penangkapan Ikan	AKTIF
7	Mario Marennu	31	Muliadi	Desa Waetuwoe Kec. Lanrisang	SK Kepala Dinas KP Kab. Pinrang No 523/238/DKP	Penangkapan Ikan	AKTIF
8	Latong Salo	19	Abiding	Desa Latong Salo Kec. Suppa	Sk Kepala Dinas KP Kab. Pinrang No. 523/431/DKP Tgl. 17 Mei 2016	Penangkapan Ikan	AKTIF
9	Siamassei	19	Erwin Daming	Desa Ujung Labuang Kec. Suppa	Sk Kepala Dinas KP Kab. Pinrang No. 523/290/DKP Tgl. 11 Maret 2015	Penangkapan Ikan	AKTIF
10	Bina Taruna	27	Ir. Saiful	Desa Mattirotasi Kec. MT. Sompe	Lurah MT. Tasi No. 80/DMT/VIII/2014	Penangkapan Ikan	AKTIF
11	Sahabat Pesisir	26	H. Akib Sidda	Kel. Data Kec. Duampanua	Lurah MT. Tasi No. 80/DMT/VIII/2014	Penangkapan Ikan	AKTIF
		269					10 AKTIF

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove			Suppa	24.7	-	-	24.7	-	
				Mat Sompe	8.8	-	-	8.8	-	
				Lanrisang	3.5	3.5	-	-	-	
				Cempa	2	2	-	-	-	
				Duampanua	10.4	-	-	10.4	-	
				Lembang	2.4	-	-	2.4	-	
				Luas Total	6	5.5		12.8		
2	Terumbu Karang			Suppa	4.53	4.53	-	-	-	
				Mat Sompe	0.2	0.2	-	-	-	
				Lanrisang	2.5	2.5	-	-	-	
				Cempa	0.1	0.1	-	-	-	
				Duampanua	3.1	3.1	-	-	-	
				Lembang	3.5	3.5	-	-	-	
				Luas Total	14	13.9				
3	Padang Lamun			Suppa	63.1	63.1	-	-	-	
				Duampanua	2.5	2.5	-	-	-	
				Lembang	3.5	3.5	-	-	-	
				Luas Total	69	69.1				
4	Tambak				15,026					
5	Laut				1,000					
6	Kolam				1,972.8					

– Tindak Pidana Perikanan

NO	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT	WAKTU	PELAKU	BARANG BUKTI	INSTANSI YANG MENANGANI	SANGKAAAN PASAL	TINDAK LANJUT	KET
1	Pembusuan Ikan		2016					P21 di POLRES	
2	Illegal Fishing		29/04/2016					P21 di POLRES	
3	Illegal Fishing		29/04/2016					P21 di POLRES	

KET: P21: Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap dari kepolisian ke kejaksanaan

7. Kota Palopo

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Speed Boat	Wara Utara	Kel. Penggoli	2013	-	-	-	-	Baik	
2	Perahu Kayu	Wara Timur	Kel. Pontap	2014	-	-	-	-	Rusak	

– SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Fatahillah, S.Pi, MM	√	-	
2	Muh. Nur, A.Md	√	-	
3	Mustadir, S.Pi	-	√	
4	Rasyid S, AN	-	√	
5	Rizal Angge	-	√	

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KETERANGAN
1	Salu Tompotikka	25	Idris	Kelurahan Benteng Kec. Wara Timur	SK Kepala Dinas Kp No. 523/692/DKP/VII/2015 Tgl. 06 Juli 2015	Perikanan	AKTIF
2	Sipatuo	27	Usman S	Desa Penggoli Kec. Wara Utara	SK Kepala Dinas Kp No. 523/1664/DKP/XII/2013	Perikanan	AKTIF
3	Seroja	29	Alfian	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur		Perikanan	TIDAK AKTIF
4	Retona	15	Basmi	Kelurahan Sampoddo Kec. Wara Selatan	SK Kepala Dinas Kp No. 523/688/DKP/VII/2015 Tgl.03 Juli 2015	Perikanan	AKTIF
5	Salotangga	25	Sabil	Kelurahan Songka Kec. Wara Selatan	SK Kepala Dinas Kp No. 523/688/DKP/VII/2015 Tgl.03 Juli 2015	Perikanan	AKTIF
6	Salu Karo	24	Awaluddin	Kelurahan Takkalala Kec. Wara Selatan	SK Kepala Dinas Kp No. 523/688/DKP/VII/2015 Tgl.03 Juli 2015	Perikanan	AKTIF
7	Baja Pole	25	Drs. Hamruddin, SE	Kelurahan Malatunrung Kec. Wara Timur	SK Kepala Dinas Kp No. 523/692/DKP/VII/2015 Tgl. 06 Juli 2015	Perikanan	AKTIF
		170	7				6 AKTIF

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove	Wara Timur	Benteng		5	-	-	3.7	-	
			Malatunrung		0.25	-	-	0.15	-	
			Salekoe		0.5	-	-	0.5	-	
			Ponjalae		0.25	-	-	0.25	-	
			Salotellue		0.5	-	-	0.5	-	
		Wara Selatan	Takkalala		9	9	-	-	-	
		Wara Utara			3.5	3.5	-	-	-	
		Telluwanua	Sallubattang		8.5	8.5	-	-	-	
			Batu		1	-	-	-	-	
			Walentrang		1	1	-	-	-	
		Bara	Balandai		10	10	-	-	-	
			Luas Total		39.5	32		5.1		
2	Terumbu Karang	Wara Timur	Benteng		10	-	-	2	-	
			Malatunrung		1	-	-	1	-	
			Salekoe		2	-	-	0.5	-	
			Ponjalae		0.8	-	-	0.5	-	
			Salotellue		1	-	-	0.5	-	
			Luas Total		93.8			4.5		
3	Padang Lamun	Wara Timur	Benteng		1	-	-	0.5	-	
			Luas Total		1			0.5		

8. Kabupaten Luwu Utara

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Speed Boat	Malangke Barat	Desa Waelawi	1 buah	2011	-	-	-	Rusak Berat	
2	Meubeleur Pondok jaga Pokmaswas	Tana Lili	Desa Munte	1 Paket	-	-	-	-	Baik	
			Desa Poreang	1 Paket	-	-	-	-	Baik	
		Bone-Bone	Desa Tamuku	1 Paket	-	2011	-	-	Baik	
		Malangke	Desa Takkalala	1 Paket	-	-	-	-	Baik	
			Desa Tokke	1 Paket	-	-	-	-	Baik	
3	Pondok Jaga Pokmaswas	Tana Lili	Desa Munte	1 unit	-	-	-	-	Baik	
			Desa Poreang	1 unit	-	-	-	-	Baik	
		Bone-Bone	Desa Tamuku	1 unit	-	2011	-	-	Baik	
		Malangke	Desa Takkalala	1 unit	-	-	-	-	Baik	
			Desa Tokke	1 unit	-	-	-	-	Baik	
4	Pondok Jaga Pokmaswas	Malangke Barat	Desa Pao	1 unit	-	-	-	-	Baik	
			Desa Waelawi	1 unit	-	-	-	-	Baik	
			Desa Pombakka	1 unit	2012	-	-	-	Baik	
			Desa Pengkajoang	1 unit	-	-	-	-	Baik	
		Malangke	Desa Benteng	1 unit	-	-	-	-	Baik	
5	Kapal Fiber	Tana lili	Desa Munte	1 unit	-	-	-	-	Ada yang Baik dan ada yang rusak	
			Desa Poreang	1 unit	-	-	-	-		
		Bone-Bone	Desa Tamuku	1 unit	-	-	-	-		
		Malangke	Desa Takkalala	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Tokke	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Benteng	1 unit	-	-	-	2012		
		Malangke Barat	Desa Waelawi	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Pombakka	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Pao	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Pengkajoang	1 unit	-	-	-	-		
6	Pondok jaga Pokmaswas	Sukamaju	Desa Subur	1 unit	-	-	-	-	Baik	
		Bone-Bone	Desa Batang Tongka	1 unit	2012	-	-	-	Baik	
		Malangke	Desa Saleko	1 unit	-	-	-	-	Baik	
7	Alat Komunikasi Pokmaswas	Kec. Samba	Kantor DKP	1 Paket	2013	-	-	-	Baik	
8	Alat Komunikasi Pokmaswas	Malangke	Desa Tokke	1 unit	-	-	-	-	Baik	
		Tana lili	Desa Poreang	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
		Malangke Barat	Desa Waelawi	1 unit	-	-	-	-	Baik	
9	Perahu Patroli Pokmaswas	Tana lili	Desa Munte	1 unit	-	-	-	2014	Rusak	

– SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Naharuddin Nabaing, S.Kel	-	√	

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KET
1	Bajak Laut	17	Jasmin S	Desa Tokke Kec. Malangke	523/495/DKP/27 Mei 2010 DKP Luwu Utara	Perikanan	Aktif
2	Mamminasae	15	Syamsuddin	Desa Benteng Kec. Malangke	523/497/DKP/27 Mei 2010 DKP Luwu Utara	Kelautan Perikanan	Aktif
3	Bone Pute	15	Juswan	Desa Takkala Kec. Malangke	523/492a/DKP/27 Mei 2010 DKP Luwu Utara	Kelautan Perikanan	Aktif
4	Pao Raja	18	Marsuki	Desa Pao, Kec. Malangke Barat	523/496/DKP/4 Juni 2010 Dkp Luwu utara	Kelautan Perikanan	Aktif
5	Pulau Indah	16	Jisman	Desa Waelawi Kec. Malangke Barat	532/491/DKP/4 Juni 2010 DKP Luwu Utara	Kelautan Perikanan	Aktif
6	Mantalinga Indah	13	H. Annas	Desa Pengkajoang Kec. Malangke Barat	532/493/DKP/4 Juni 2010 DKP Luwu Utara	Kelautan Perikanan	Aktif
7	Pombakka Afair	15	Mursalin	Desa Pombakka Kec. Malangke Barat	532/494/DKP/4 Juni 2010 DKP Luwu Utara	Kelautan Perikanan	Aktif
8	Bunga Karang	11	Aksan Siswili	Desa Poreang, Kec. Tanalili	523/492/DKP Luwu Utara	Perikanan	Aktif
9	Mappatunru	14	Hafid Hasan	Desa Tamuku Kec. Bone-Bone	523/241/DKP/23 23 Februari 2010 DKP Luwu Utara	Perikanan	Aktif
10	Sipatuo	9	M. Arif	Desa Batang Tongka, Kec. Bone - Bone	523/141/DKP Luwu Utara	Perikanan	Aktif
11	Harapan Baru	9	Darwis	Desa Subur, Kec. Sukamaju	523/351/DKP Luwu Utara	Perikanan	Aktif
12	Teluk Bone	9	Bahar	Desa Salekoe, Kec. Malangke	523/811/DKPn Luwu Utara	Perikanan	Aktif
13	Kuda Laut	15	Bahtiar Baso	Desa Munte Kec. Tanalili	523/242/DKP/23 23 Februari 2010 DKP Luwu Utara	Perikanan	Aktif
		176					13 AKTIF

b. Data Sumberdaya Kelautan
– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove			Tana Lili/ Rampoang	343.86	-	-	-	-	
				Bone-Bone/ Batang Tongka	439.57	-	-	-	-	
				Bone-Bone/ Pongko	685.64	-	-	-	-	
				Bone-bone/ Tamuku	887.53	-	-	-	-	
				Malangke/ Benteng	474.48	-	-	-	-	
				Malangke/ Pattimang	431.29	-	-	-	-	
				Malangke/ Salekoe	1,222.97	-	-	-	-	
				Malangke/ Takalalla	553.27	-	-	-	-	
				Malangke/ Tokke	371.01	-	-	-	-	
				Malangke Barat/ Pao	1,411.47	-	-	-	-	
				Malangke Barat / Pengkajoang	705.40	-	-	-	-	
				Malangke Barat/ Pombakka	2,691.78	-	-	-	-	
				Malangke Barat/ Waelawi	884.23	-	-	-	-	
				Luas Total	11,102.50					
2	Terumbu Karang			Malangke Barat/Waelawi	3.0	0.3	-	2,7	-	
				Tana Lili/ Poreang	20.0	2.0	-	18	-	
				Tan Lili/Munte	24.0	4.8	-	19,2	-	
				Luas Total	47.00	7.1		18		

– Tindak Pidana Perikanan

NO	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT	WAKTU	PELAKU	BARANG BUKTI	INSTANSI YANG MENANGANI	SANGKAAN PASAL	TINDAK LANJUT	KET
1	Penyetroman Ikan	Desa Waelawi Kec. Malbar	22/11/12	1. Parel 2. Andi Syam 3. Anugrah 4. Asri 5. Irfan	* 2 unit perahu * 2 unit mesin perahu * 1 buah mesin 10 PK * 1 buah Sero * Beberapa jenis ikan, dan barang bukti lain	POLRES LUTRA, DKP LUTRA, Kejaksaan	Pasal 8 UU No. 31 TH. 2004 dan Pasal 9 UU No. 45 TH. 2009 Tentang Perikanan	10 bulan penjara, denda 200 jt, subsider 2 bulan (vonis tgl 31/01/13)	
2	Penyetroman Ikan	Desa Subur, Kec. Sukamaju	25/07/13	1. Dahlan 2. Egi	* 1 unit perahu * 1 unit perahu * 1 buah mesin 10 pk * Beberapa jenis ikan, dan barang bukti lain	POLRES, PosMat AL, DKP, Kejaksaan	Pasal 8 UU No. 31 TH. 2004 dan Pasal 9 UU No. 45 TH. 2009 Tentang	Penjara 6 bulan 5 hari, denda 2,5 jt, subsider 2 bulan (vonis tgl 1/10/13)	

9. Kabupaten Luwu Timur

a. Data Sumberdaya Perikanan
– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Speed Boat	Malangke Barat	Desa Waelawi	1 buah	2011	-	-	-	Rusak Berat	
2	Meubleur Pondok jaga Pokmaswas	Tana Lili	Desa Munte	1 Paket	-	-	-	-	Baik	
			Desa Poreang	1 Paket	-	-	-	-	Baik	
		Bone-Bone	Desa Tamuku	1 Paket	-	2011	-	-	Baik	
		Malangke	Desa Takkalala	1 Paket	-	-	-	-	Baik	
			Desa Tokke	1 Paket	-	-	-	-	Baik	
3	Pondok Jaga Pokmaswas	Tana Lili	Desa Munte	1 unit	-	-	-	-	Baik	
			Desa Poreang	1 unit	-	-	-	-	Baik	
		Bone-Bone	Desa Tamuku	1 unit	-	2011	-	-	Baik	
		Malangke	Desa Takkalala	1 unit	-	-	-	-	Baik	
			Desa Tokke	1 unit	-	-	-	-	Baik	
4	Pondok Jaga Pokmaswas	Malangke Barat	Desa Pao	1 unit	-	-	-	-	Baik	
			Desa Waelawi	1 unit	-	-	-	-	Baik	
			Desa Pombakka	1 unit	2012	-	-	-	Baik	
			Desa Pengkajoang	1 unit	-	-	-	-	Baik	
		Malangke	Desa Benteng	1 unit	-	-	-	-	Baik	
5	Kapal Fiber	Tana lili	Desa Munte	1 unit	-	-	-	-	Ada yang Baik dan ada yang rusak	
			Desa Poreang	1 unit	-	-	-	-		
		Bone-Bone	Desa Tamuku	1 unit	-	-	-	-		
		Malangke	Desa Takkalala	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Tokke	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Benteng	1 unit	-	-	-	2012		
		Malangke Barat	Desa Waelawi	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Pombakka	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Pao	1 unit	-	-	-	-		
			Desa Pengkajoang	1 unit	-	-	-	-		
6	Pondok jaga Pokmaswas	Sukamaju	Desa Subur	1 unit	-	-	-	-	Baik	
		Bone-Bone	Desa Batang Tongka	1 unit	2012	-	-	-	Baik	
		Malangke	Desa Saleko	1 unit	-	-	-	-	Baik	
7	Alat Komunikasi Pokmaswas	Kec. Samba	Kantor DKP	1 Paket	2013	-	-	-	Baik	
8	Alat Komunikasi Pokmaswas	Malangke	Desa Tokke	1 unit	-	-	-	-	Baik	
		Tana lili	Desa Poreang	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
		Malangke Barat	Desa Waelawi	1 unit	-	-	-	-	Baik	
9	Perahu Patroli Pokmaswas	Tana lili	Desa Munte	1 unit	-	-	-	2014	Rusak	

– SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Ir. H. Muh. Gazali, S.Pi	√	-	
2	Anthonius. K, S.Pi	-	√	
3	Triwiyanto Achadi, S.Pi	√	-	

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOT	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KETERANGAN
1	Lalambate	22	Ansar M. Galib	Desa Lera, Bawalipu Lampenai, Bahari Kec. Wotu	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 006 Tahun 2011 Tgl 11 Jan 2011	Kelautan Perikanan	Aktif
2	Balo-balo	30	Nursam T	Kec. Wotu Desa Balo-Balo	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 017 Tahun 2013 Tgl 02 Des 2013	Kelautan Perikanan	Tidak Aktif
3	Bintang Timur	22	A. Wahyuddin S	Desa Lakawali Kec. Malili	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 006 Tahun 2011 Tgl 11 Jan 2011	Kelautan Perikanan	Aktif
4	Lampia	16	Rusdin	Desa Harapan Baru Kec. Angkona	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 017 Tahun 2013 Tgl 02 Des 2013	Kelautan Perikanan	Tidak Aktif
5	Pasi-pasi	10	Adam	Kec. Malili Desa Pasi-Pasi	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 017 Tahun 2013 Tgl 02 Des 2013	Kelautan Perikanan	Tidak Aktif
6	Teluk Bone	27	M. Yusuf	Desa Lauwo Kec. Burau	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 006 Tahun 2011 Tgl 11 Jan 2011	Kelautan Perikanan	Aktif
7	Pasir Putih	8	Saharuddin	Kec. Burau Desa Mabunto	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 017 Tahun 2013 Tgl 02 Des 2013	Kelautan Perikanan	Tidak Aktif
8	Burai Pantai	14	Ruslan	Kec. Burau Desa Burau Pantai	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 017 Tahun 2013 Tgl 02 Des 2013	Kelautan Perikanan	Tidak Aktif
9	Mattiro wale	6	Martin	Kec. Burau Desa Lauwo	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 017 Tahun 2013 Tgl 02 Des 2013	Kelautan Perikanan	Tidak Aktif
10	Harapan Baru	21	Jumhur	Kec. Angkona	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. 006 Tahun 2011 Tgl 11 Jan 2011	Kelautan Perikanan	Aktif
11	Parumpanai	25	Judel	Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	11 Mei 2008, Desa	Kelautan	Tidak Aktif
12	Bintang Arwana	20	Mulini	Desa Sekecamatan Kec. Kalaena	25 Nopember 2010, Kecamatan dan BPP	Kelautan	Tidak Aktif
13	Lestari Towuti	23	Yusufan, ST	Desa Timampu, Pekaia Kec. Towuti	5 Oktober 2010, Kecamatan dan BPP	Kelautan	Tidak Aktif
14	Jumbo Jaya	30	M. Sayuti	Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana	8 Oktober 2010, Kecamatan dan BPP	Kelautan	Tidak Aktif
		274					4 Aktif

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove		Burau		1,664.98	512.3	-	768.47	384.23	
			Wotu		416.25	-	-	416.25	-	
			Malili		5,800.23	3,625.13	-	2,175.08	-	
			Angkona		790.94	486.73	-	304.21	-	
			Luas Total		8,672.40	4624.16	-	3664.01	-	
2	Terumbu Karang		Burau		29.70	6.60	-	8.15	14,945	
			Wotu		6.83	-	-	6.83	-	
			Malili		99.89	9.28	-	19.99	70.62	
			Luas Total		136.42	15.88	-	34.97	15,016	
3	Padang Lamun		Malili		167.21	55.6	-	46.75	64.88	
			Luas Total		167.21	55.60	-	46.75	64.88	

10. Kabupaten Bone

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Meja Rapat	TR TIMUR	Lonrae	1 buah	2011	-	-	2011	Baik	
2	Mesin Ketik Manual	TR TIMUR	Lonrae	1 buah	2011	-	-	-	Rusak	
3	Power Supply	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2011	-	-	-	Baik	
4	Handy Talkie	TR TIMUR	Lonrae	2 set	2011	-	-	-	Rusak	
5	Camera Digital	TR TIMUR	Lonrae	1 buah	2011	-	-	-	Rusak	
6	AC Split	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2011	-	-	-	Baik	
7	Lemari es	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2011	-	-	-	Baik	
8	Kompor gas & Tabung	TR TIMUR	Lonrae	1 set	2011	-	-	-	Baik	
9	Rak Piring	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2011	-	-	-	Baik	
10	Dispenser Air Minum	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2011	-	-	-	Baik	
11	Tiang Antena SSB	TR TIMUR	Lonrae	2 set	2011	-	-	-	Baik	
12	Dermaga Speed Boat	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2011	-	-	-	Mulai Rusak	
13	Mesin Tempel Speed Boat (Tambahan)	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2011	-	-	-	Baik	
14	Kompas	TR TIMUR	Lonrae	1 buah	2011	-	-	-	Baik	
15	Baju Pelampung	TR TIMUR	Lonrae	8 buah	2011	-	-	-	Rusak	
16	Lampu Sorot Speed Boat	TR TIMUR	Lonrae	1 buah	2011	-	-	-	Rusak	
17	Mesin Genset 2000 W	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2011	-	-	-	Baik	
18	Tabung Pemadam Kebakaran	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2011	-	-	-	Baik	
19	Rabat Beton Jalan Masuk (Tambahan)	TR TIMUR	Lonrae	1 paket	2011	-	-	-	Rusak	
20	Teras Gedung Pengawasan	TR TIMUR	Lonrae	1 paket	2011	-	-	-	Rusak	
21	Pos Pokmaswas (dgn Mobiler)	TR TIMUR	Bajoe & Panyula	1 paket	2013	-	-	-	Baik	
22	Reel Pengangkat/Greed Speed Boat	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
23	Sepeda Motor Pengawas	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2013	-	-	-	Baik	
24	Perahu Pokmaswas Lengkap	TR TIMUR	Lonrae	1 set	2014	-	-	-	Rusak Sedang	
25	Perahu Pokmaswas Lengkap	TR TIMUR	Lonrae	1 set	2015	-	-	-	Baik	
26	Speed Boat Pengawasan	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2007	-	-	-	Rusak Sedang	
27	Gedung Pengawasan	TR TIMUR	Lonrae	1 buah	2009/2010	-	-	-	Baik	
28	Pos Pokmaswas Palette	TR TIMUR	Lonrae	1 buah	2010	-	-	-	Baik	
29	Radio SSB	TR TIMUR	Lonrae	1 buah	2010	-	-	-	Baik	
30	Teropong	TR TIMUR	Lonrae	1 unit	2010	-	-	-	Rusak Berat	

– SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Abd Rahman SE, S.Sos	✓		
2	Muh Adhar, S.Pi		✓	
3	Andi Muliani, S.Pi		✓	
4	Nuryamin, S.Pi		✓	

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KET
1.	Palette	26	Abdullah, A.Ma	Kel. Palette Kec. TR. Timur	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
2	Bintang Laut	23	Zulkifli Azroni	Kel. Bajoe Kec. TR. Timur	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
3	Mattiro Deceng	23	Suardi	Desa Kajura Kec. Awangpone	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
4	Mallari Ade	24	Mahyuddin, S.Ag	Desa Mallari Kec. AwangPone	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
5	Pattiro Sompe	22	Hasan	Desa Pattiro Sompe Kec. Sibulue	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
6	Bulu - Bulu	17	Arsyad	Desa Bulu - Bulu Kec. Tonra	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
7	Angkue	24	Alias	Desa Angkue Kec. Kajura	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
8	Panyula	20	Daeng Mangerre	Kel. Panyula Kec. TR. Timur	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
9	Lamuru	26	H. Nurdin Latif	Desa Lamuru Kec. Tellu Siattinge	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
10	Sipatokkong	24	Mujetaba	Desa Ujung Salangketo (Usto) Kec. Mare	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
11	Carigading	24	Herman Syukri	Desa Carigading, Kec. Awangpone	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
12	Manera	23	M. Asep Chanra	Desa Manera Kec. Salamekko	No. 157 Tahun 2007 Tgl 2 Maret 2007 Bupati Bone	Pengawasan	AKTIF
		276					12 Aktif

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Tindak Pidana Perikanan

NO	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT	WAKTU	PELAKU	BARANG BUKTI	INSTANSI YANG MENANGANI	SANGKAAN PASAL	TINDAK LANJUT	KET
1	TANPA DOKUMEN		5/4/2016					-	

KET: P21: Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap dari kepolisian ke kejaksaan

11. Kabupaten Sinjai

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Speed Boat	Sinjai Utara	Lappa	2 unit	2007	-	-	-	Rusak Berat	
2	Kapal Pokmaswas	Pulau Sembilan	Buhung Pitue	1 unit	2015	-	-	-	Baik	Kapal 3 GT
3		Tellulimpo	Pattongko	1 unit	2015	-	-	-	Baik	Kapal 3 GT
4	Handi Tolky	Pulau Sembilan	Pulau Harapan	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
			Persatuan	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
			Padaelo	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
			Buhung Pitue	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
			Lappa	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
		Sinjai Utara	Lappa	1 unit	2015	-	-	-	Baik	Alat Komunikasi Pokmaswas
		Sinjai Timur	Tongke-tongke	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
			Panaikang	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
			Pasir Marannu	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
			Sanjai	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
			Bua	1 unit	2015	-	-	-	Baik	
			Pattongko	1 unit	2015	-	-	-	Baik	Alat Komunikasi Pokmaswas
5	Reafiter	Sinjai	Lappa	1 unit	2015	-	-	-	Baik	Stasiun Penerima dan Pelempar Alat Komunikasi Pokmaswas

– SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Subandi	√	-	
2	Alam Nasrah, ST	-	√	
3	Amal Ahsan, S.Pi	-	√	
4	A. Nur Hidayat	-	√	

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KET
1	Bahari	23	Burhanuddin	Desa Lappa, Kec. Sinjai Utara	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
2	Tunreng Tellue	11	Amal Ma'ruf	Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Pelestarian	Aktif
3	Adapi Nagau	15	M. Yahar	Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
4	Mabbulo Sipeppa	24	Hasan	Desa Pasimarannu Kec. Sinjai Timur	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
5	Mattiro Deceng	16	Baharuddin, S.Sos	Desa Sinjai Kec. Sinjai Timur	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
6	Sipakainge	25	Bustam	Desa Bua Kec. Tellulimpo	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
7	Mattiro Walie	24	Harianto	Desa Pattongko Kec. Tellulimpo	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
8	Batu Maccidong	8	Umar	Desa Pulau Buhung Pitue Kec. Pulau Sembilan	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
9	Karang Merah	11	H. Dusing	Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
10	Siaseri	15	Rusyl	Desa Pulau Padaelo Kec. Pulau Sembilan	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
11	Mamminasae	21	Andi Darwis	Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan	SK Bupati Sinjai No. 1007 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014	Penangkapan	Aktif
		193					11 Aktif

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove	Sinjai Utara			73.1	73.1				
		Sinjai Timur			95.79	95.79	-	-	-	
		Tellu Limpoe			24	24	-	-	-	
				Luas Total	192.89	192.89				
2	Terumbu Karang	Sinjai Timur			19.23	-	-	-	19.23	
		Tellu Limpoe			72.61	-	-	-	72.61	
		Pulau Sembilan			3,728.05	-	-	3,728.05		
				Luas Total	3,819.89			3,728.05	91.84	
3	Pesisir Pulau-Pulau Kecil	Pulau Sembilan			753	-	-	753	-	
				Luas Total	753			753		

– Tindak Pidana Perikanan

NO	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT	WAKTU	PELAKU	BARANG BUKTI	INSTANSI YANG MENANGANI	SANGKAPAN PASAL	TINDAK LANJUT
1	Tidak Memiliki izin	Desa Pulau Harapan	8/1/2015	Warga Desa Pulau Harapan	1 unit Karamba beserta isinya	POLRES Sinjai	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)	Proses Penyidikan
2	Dokumen kapal tidak ada	Desa Pattongko, Kec. Tellulimpoe	12/1/2015	Warga Kab. Bantaeng	30 Unit Perahu Sopek-sopek bermesin dalam	PPNS Perikanan Sinjai	Pasal 92 Jo, Pasala 26 ayat (1)	Proses Penyidikan
3	Tidak Memiliki izin	Desa Padaelo, Desa Pulau Harapan dan Desa Buhung Pitue	-	Pengusaha, Pengumpul dan Pemasaran Ikan	26 Tempat usaha pengumpul dan pemasaran ikan	PPNS Perikanan Sinjai	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)	Proses Penyidikan
4	Bom Ikan	Peraliran Sinjai	12/10/2015	Kab. Bone	* KMN Rifai * Kompresor * 1 buah dakor * 1 rol selang * 1 psg sepatu betek * 1 buah kaca mata selam * 30 buah sumbu api rakitan * 10 botol bekas berisi amonium nitrat	Pol. Air POLDA Makassar	Pasal 84 ayat (1) Pasal 85 Jonto Pasal 53 KUHP	8 bulan tahanan

12. Kabupaten Bulukumba

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Speed Boat	Ujung Bulu	Bentenge	1 unit	2007	-	-	-	Rusak Berat	
2	Kapal Pengawas	Ujung Bulu	Bentenge	1 unit	2012	-	-	-	Baik	Kapal 3 GT
3	Perahu Karet	Ujung Bulu	Bentenge	1 unit	-	-	-	2015	Baik	Kapal 3 GT

– SDM Pengawas

LAPORAN TAHUNAN 2016

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Fachry Amal, S.Pi		√	
2	Taufik, S.Pi		√	
3	Syarifuddin. R		√	
4	Arwan		√	
5	Junaidi		√	

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOT	NAMA KETUA	ALAMAT SEKRETARIAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KET
1	Lestari	12	Sinyo	Kec. Liukang Loe	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tgl 14 Juli 2009	Kelautan	Tidak Aktif
2	Cakalang	12	Badorra	Kel. Eka Tiro Kec. Bonto Tiro	SK. Kepala Dinas KP No. Kpts.22.c/Din.Kp/IV/2012 Tanggal 02 April 2012	Kelautan	Aktif
3	Karaeng Sapu Batu	9	M.Bakri	Kel.Tri Tiro Kec. Bonto Tiro	SK. Kepala Dinas KP No.KPTS.30/Din.Kp/IX/2013 Tgl 11 September 2013	Kelautan	Aktif
4	Sampurna	15	Abd. Muin	Desa Manjalling Kec. Ujung Loe	SK. Kepala Dinas KP No.Kpts.22.d/Din.Kp/IV/2012 Tanggal 02 April 2012	Kelautan	Aktif
5	Tausurun	10	Muh. Tahir	Kel. Parangyelling Kec. Ujung Loe	SK. Kepala Dinas KP No.KPTS.35.1/Din.Kp/VI/2013 Tgl 16 Mei 2013	Kelautan	Aktif
6	Lumba-lumba Putih	21	H. Muh. Judar	Kel. Tana Jaya Kec. Kajang	SK. Kepala Dinas KP No. Kpts.54/Din.Kp/XI/2014 Tanggal 26 September 2014	Kelautan	Aktif
7	Lombok	10	Muh. Arif	Kel.Pantama Kec. Kajang	SK. Kepala Dinas KP No.KPTS.42/Din.Kp/XI/2013 Tgl 7 November 2013	Kelautan	Aktif
8	Tenggin	13	Basman	Kel. Bira Kec. Bonto Bahari	SK. Kepala Dinas KP No.Kpts.59/Din.Kp/XI/2014 Tanggal 30 Oktober 2014	Kelautan	Aktif
9	Al- Ikhlas	12	H. Hajerin	Desa Gusunge Kec. Gantarang	SK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tgl 21 Oktober 2008	Kelautan	Aktif
10	Karampung Jalanjang	14	Wardin	Desa Jalanjang Kec. Gantarang	SK. Kepala Dinas KP No. KPTS.48/Din.Kp/XII/2013 Tgl 6 Desember 2013	Kelautan	Aktif
11	Pantai Timur	18	Mustafa	Kec. Bonto Tiro	SK. Kepala Dinas KP No. Kpts.40/Din.Kp/VI/2014 Tanggal 05 Mei 2012	Kelautan	Aktif
12	Pantau Bahari	14	M. Thalib	Desa Gunturu Kec. Herlang	SK. Kepala Dinas KP No. Kpts.22.b/Din.Kp/IV/2012 Tanggal 02 April 2012	Kelautan	Aktif
13	Siamasei	11	Andi Rusdi	Kel.Bintarore Kec. Ujung Bulu	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tgl 4 Nov 2008	Kelautan	Aktif
14	Cumi-cumi Samudra	6	Suhardi	Kel. Ela - Ela Kec. Ujung Bulu	SK. Kepala Dinas KP No. KPTS.49/Din.Kp/XII/2013 Tgl 19 Desember 2013	Kelautan	Aktif
15	Katinroang Jangnan - Jangnan	9	Sangkali	Kec. Herlang	SK. Kepala Dinas KP No.Kpts.32/Din.Kp/IV/2014 Tanggal 22 April 2014	Kelautan	Aktif
16	Batu Mesu	15	Nurdin Patta	Kel. Sapolohe Kec. Bonto Bahari	SK. Kepala Dinas KP No.Kpts.12/Din.Kp/II/2013 Tanggal 24 Februari 2013	Kelautan	Aktif
17	Batu Totto	11	Umar Manggau	Desa Tanah Lemo Kec. Bonto Bahari	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tgl 25 Nov 2008	Kelautan	Aktif
18	Ujung Baru	9	H.Ali Imran	Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan No. KPTS.39/Din.Kp/IX/2013 Tgl 23 Spt 2013	Kelautan	Aktif
19	Bira	10	Pla Dessi Raja Cece	Kec. Bontobahari Kel. Bira		Kelautan	Tidak Aktif
20	Katu	8	Dr. Ahmad Yamin	Kec. Bontobahari Kel. Bira		Kelautan	Tidak Aktif
21	Borongang	15	Andi Makmur Apdy	Kec. Bontobahari Kel. Bira		Kelautan	Tidak Aktif
22	Kapongkolan Bahari	23	Irwansyah	Kel. Bira Kec. Bontobahari	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tgl 29 Mei 2007	Kelautan	Aktif
23	Kasuso Berjaya	9	Nurung Gau	Desa Darubia Kec. Bntobahari	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan No.KPTS.38.1/Din.Kp/VIII/2013 Tgl 22 agst 2013	Kelautan	Aktif
		286					19 Aktif

13. Kabupaten Bantaeng

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Speed Boat Pengawas	-	-	1 unit	2013	-	-	-	-	
2	Pos Pengawas	-	-	1 buah	2014	-	-	-	-	
3	Restel Steiger	-	-	1 buah	2014	-	-	-	-	

– Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

NO	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA	NAMA KETUA	ALAMAT	SK PENGUKUHAN	BIDANG	KET
				SEKRETARIAT			
1	Pantai Batunu	10	Subhan Yusuf	Desa Bonto Jai Kec. Bissapu	SK Kepala Dinas 523/59/DPK/IV/2011 Tgl 1 April 2011	Perikanan	Aktif
2	Pantai Selatan	7	Ikhsan	Kel. Lembang Kec. Bantaeng	SK Kepala Dinas 523/61/DPK/IV/2011 Tgl 1 April 2011	Kelautan	Tidak Aktif
3	Pinang Raya	10	M. Yunus	Desa Rappoa Kec. Pajukukang	SK Kepala Dinas 523/62/DPK/IV/2011 Tgl 1 April 2011	Perikanan	Aktif
4	Sikamaseang	25	Syahrir	Desa Bt. Lebang Kec. Biissapu	SK Kepala Dinas 523/60/DPK/IV/2011 Tgl 1 April 2011	Kelautan Perikanan	Aktif
5	Pantai Gading	10	Ahmad	Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang	SK Kepala Dinas No. 523/20/DPK/VI/2014 Tgl 2 Juni 2014	Kelautan Perikanan	Aktif
6	Blangkeke Berkarya	12	Ismail	Desa Blangkeke, Kecamatan Pajukukang	SK Kepala Dinas No. 523/19/DPK/VI/2014 Tgl 2 Juni 2014	Kelautan Perikanan	Aktif
7	Lumpangang Raya	7	Hasan	Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang	SK Kepala Dinas No. 523/22/DPK/VI/2014 Tgl 2 Juni 2014	Kelautan Perikanan	Aktif
8	Kuda Laut	9	Nasir	Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang	SK Kepala Dinas No. 523/21/DPK/VI/2014 Tgl 2 Juni 2014	Kelautan Perikanan	Aktif
9	Pajukukang Raya	9	Baso Pali	Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang	SK Kepala Dinas No. 523/23/DPK/VI/2014 Tgl 2 Juni 2014	Kelautan Perikanan	Aktif
10	Marina Indah	12	H. Nurung	Desa Borong Loe Kecamatan Pajukukang	SK Kepala Dinas No. 523/24/DPK/VI/2014 Tgl 2 Juni 2014	Kelautan Perikanan	Aktif
11	Timur Laut	7	Adi Wijayanto	Desa Palantikang Kecamatan Bantaeng	SK Kepala Dinas Tahun 2015	Kelautan Perikanan	Aktif
12	Papanloe Bersinar	10	H. Arif	Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang	SK Kepala Dinas No. 523/25/DPK/VI/2014 Tgl 2 Juni 2014	Kelautan Perikanan	Aktif
		128					11 Aktif

14. Kabupaten Jeneponto

a. Data Sumberdaya Perikanan

– Sarana dan Prasarana Pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Motor Pengawasan (Yamaha Vixion)	Binamu	Pabiringan	1 unit	2014	-	-	-	Baik	
2	Motor Pengawasan (Honda CBR 125)	Binamu	Pabiringan	1 unit	2014	-	-	-	Baik	
3	Pos Pengawasan	Binamu	Pabiringan	1 buah	-	2010	-	-	Rusak	
4	Garasi Speed	-	-	1 buah	-	-	-	-	Rusak	
5	Kapal Pokmaswas	-	-	1 unit	2015	-	-	-	Baik	Belum selesai (masuk dalam daftar hutang 2016)
6	Speed Boat Pengawas	Binamu	Pabiringan	1 unit	-	2009	-	-	Hilang	
7	Handy Talkie	-	-	2 buah	2015	-	-	-	Baik	
8	Meja 1/2 Biro	Binamu	Pabiringan	1 buah	-	-	-	-	Baik	Pengadaan
9	Kursi Kantor	Binamu	Pabiringan	1 buah	-	-	-	-	Baik	Pengadaan
10	Komputer PC	-	-	1 unit	-	-	-	-	Baik	
11	Printer	-	-	1 unit	-	-	-	-	Baik	

– SDM Pengawas

NO	SDM PENGAWASAN	PPNS	PENGAWAS	KET
1	Mustari, S.Pi		√	
2	Ibrahim, S.ST.Pi		√	
3	Ikbal M Syam, A.Md.Pi		√	

b. Data Sumberdaya Kelautan

– Sumberdaya Kelautan

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove	-	-	-	1,627	164.6	67	1,395	89.9	
2	Terumbu Karang	-	-	-	37,400	7,480	11,220	18,700	80.0	
3	Padang Lamun	-	-	-	3,857	1,721	323	1,813	55.4	
					Luas Total	42,884	9,366	11,610	21,908	

– Tindak Pidana Perikanan

NO	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT	WAKTU	PELAKU	BARANG BUKTI	INSTANSI YANG MENANGANI	SANGKAAN PASAL	TINDAK LANJUT
1	Pembusian Ikan (Potassium) 5 kasus		2016					Lidik. (tidak cukup bukti / terbukti)
2	Dokumen		2016					Lidik/Sidik (T.P Ringan)
3	Handak (Bom) 4 kasus		2016					P21

KET: P21: Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap dari kepolisian ke Kejaksaan

b. Penataan dan Penegakan Hukum SDKP

APBD

1. Pengawasan dan Koordinasi Penegakan Hukum di Wilayah laut Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan

a) Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

☞ Kabupaten Bulukumba

Kegiatan patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten Bulukumba dilaksanakan selama 3 hari, dititik beratkan pada kegiatan SDP (Pengawasan Tertib Perundang-Undangan) dan Pengawasan SDK (Destructive Fishing). Lokasi pengawasan dilakukan disebelah Barat Desa Bira dan juga dilakukan sampai perairan Pulau Liukang perbatasan Kabupaten Selayar.

Hasil kegiatan patroli dilakukan diperairan Kabupaten Bulukumba sosialisasi dan pembinaan masih dikedepankan mengingat Peraturan Menteri No, 2 tahun 2015 masih terbilang baru sehingga perlu disosialisasikan.

Berdasarkan hasil kegiatan patrol pengawasan SDKP di Perairan Kabupaten Bulukumba, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Masih banyak kapal dibawah 5 GT yang beroperasi diperairan Bulukumba tidak dilengkapi dengan surat tanda keterangan kapal perikanan.
- Jaringan nelayan bom dan bius masih sangat kuat sehingga sangat susah menangkap disaat sedang beroperasi
- Kapal dengan jenis alat tangkap purse seine tanpa dokumen masih marak beroperasi diperairan Kabupaten Bulukumba
- Masih dijumpai ketidaksesuaian antara alat tangkap yang tertulis dalam SIUP dan SIPI

Sedangkan saran yang dapat diberikan pada kegiatan ini yaitu :

- Pihak pemerintah Kab. Bulukumba harus mendata dan memberikan surat tanda pendaftaran kapal nelayan baik yang ada dipesisir
- Memberdayakan POKMASWAS dalam menjaga perairan dan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan cek fisik kapal harus dilakukan sebelum izin diterbitkan

☞ Kabupaten Bone

- Kegiatan patroli Pengawasan terpadu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diwilayah Perairan Kabupaten Bone dilaksanakan berdasarkan informasi bahwa intensitas kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl mini dikecamatan lamuru teluk bone makin tinggi, selain menggunakan alat trawl mini, penggunaan bahan peledak dan bahan kimia juga digunakan nelayan untuk kegiatan penangkapan ikan.
- Mengingat tingkat pelanggaran illegal fishing diperairan kabupaten Bone sangat tinggi sehingga kegiatan patroli pengawasan terpadu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dititikberatkan pada kegiatan pengawasan operasional kapal perikanan (penangkapan ikan secara destructive) serta pengawasan ekosistem terumbu karang dengan melaksanakan pemantauah serta pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
- Alat tangkap Trawl mini banyak digunakan oleh nelayan yang berasal dari desa Cappa ujung, Kecamatan Barebbo sehingga dilakukan kegiatan pemeriksaan
- Masih banyak ditemukan diperairan teluk bone penggunaan alat bantu seperti kompresor didalam kapal nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan sehingga penggunaan alat bantu seperti kompresor menjadi polemik khususnya dikabupaten Bone.
- Sejumlah kapal nelayan yang ditemukan dilapangan dilakukan henti riksa, selain pemeriksaan terhadap alat tangkap dan hasil tangkapan juga dilakukan pemeriksaan dokumen dalam rangka tertib administrasi.

- Dari hasil pemeriksaan beberapa kapal dari kegiatan operasi patroli Pengawasan Sumberdaya KP diperairan Kabupaten Bone khususnya berupa dokumen kapal, masih banyak nelayan yang tidak paham mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dalam melakukan pelayaran untuk kegiatan penangkapan ikan
- Uraian hasil pemeriksaan operasional kapal perikanan/pemantauan objek SDK

Tabel19. Kegiatan Pemeriksaan Kapal Selama Gelar Operasi di Kabupaten Bone

No	Nama Kapal	Dokumen yang ada	Tonaga Kpl	Alat Tangkap	Posisi Koordinat	Dugaan Pelanggaran	Jumlah ABK	Tindak Lanjut
1	KM. Mega Buana	PAS Kecil	5 GT	Pukat	S:04 27 618 E:120 24 704 ⁰	Hasil Tangkapan yang ditemukan tidak sesuai dengan alat tangkap yang digunakan	4 org	Dilakukan Penyidikan
2	KM. Madhani 01	Tidak Membawa Dokumen	24 GT	Kapal Pengangkut	S:04 25 416 E:120 25 505 ⁰	Tidak Membawa Dokumen kapal pada saat melakukan pelayaran	8 Org	Ad Hock ke Pelabuhan Bajoe dan diserahkan ke penyidik
3	KMN. Hasni Jaya	PAS Kecil, SLO, SIPI	16 GT	Purse Seine	S:04 25 416 E:120 27 872 ⁰	Surat Keterangan andon tidak ada dan SPB sudah kadaluarsa	10 Org	Penyitaan Dokumen dan Ad Hock ke Pelabuhan Bajoe
4	KMN. Bunga Nelayan Baru 01	Dokumen Lengkap	3 GT	Pukat	S:04 32 482 ⁰ E:120 24 839 ⁰	Jumlah ABK Tidak sesuai dengan Crew List	7 Org	Pembinaan
5	KMN. Gelora Indah	PAS Kecil	3 GT	Pukat	S:04 38 067 ⁰ E:120 26 441 ⁰	Dokumen Tidak Lengkap	4 Org	Perintah melengkapi dokumen
6	KMN. Air Kembali	PAS Kecil, Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan	3 GT	Purse Seine	S:04 32 933 ⁰ E:120 24 446 ⁰	Dokumen Lengkap	6 Org	-

Sumber : Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pinrang

Kegiatan patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dikabupaten Pinrang dilaksanakan dari adanya laporan dari masyarakat nelayan yang bermukim diwilayah pesisir pantai kabupaten Pinrang dimana dari data yang ada bahwa rata-rata nelayan kabupaten Pinrang menggunakan alat tangkap pancing sehingga dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil. Adapun dasar dari laporan itu bahwa banyak nelayan dari Polewali Mandar melakukan kegiatan penangkapan didaerah kabupaten Pinrang dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan bahkan sampai menggunakan bahan peledak (bom) dan bahan kima Sianida, akibatnya terjadi

penurunan hasil tangkapan yang disebabkan adanya aktifitas dari nelayan Polewali Mandar.

Tabel 20. Kegiatan Pemeriksaan Kapal Selama Gelar Operasi di Kabupaten Pinrang

No	Nama Kapal	Dokumen yang ada	Tonaga Kpl	Alat Tangkap	Posisi Koordinat	Dugaan Pelanggaran	Jumlah ABK	Tindak Lanjut
1	Bagan KM. Nur Puspita	Dokumen Tertinggal di rumah	-	Kapal Bagan	S:04 37 075 ⁰ E:120 27 394 ⁰	Dokumen Kapal tidak disertakan dikapal	11 Org	Diperintahkan diambil dan disimpan dikapal
2	KMN. Reni	PAS Kecil	1 GT	Kapal Pengangkut	S:04 40 265 ⁰ E:120 29 167 ⁰	Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan Tidak Ada	3 Org	Pengawas Perikanan Bone mencatat untuk ditindaklanjuti
3	KMN. Minasa Mekkah	PAS Kecil, Tanda Daftar Kapal Perikanan	1 GT	Pukat Ikan Campuran	S:04 30 083 ⁰ E:120 27 394 ⁰	Izin Tanda Daftar Kapal sudah Kadaluarsa	8 Org	Penyitaan Dokumen
4	KMN. Nurtang	PAS Kecil, Tanda Daftar Kapal Perikanan	2 Gt	Pukat	S:04 41 281 ⁰ E:120 28 035 ⁰	Izin Sudah Tidak Berlaku	7 Org	Penyitaan Dokumen
5	KMN. Kamrina	PAS Kecil	1 GT	Bagan	S:04 41 348 ⁰ E:120 29 629 ⁰	Dokumen Tidak Lengkap	11 Org	Perintah melengkapi dokumen
6	KMN. Cahaya Berkah	PAS Kecil, Tanda Daftar Kapal Perikanan	3 GT	Purse Seine	S:04 32 933 ⁰ E:120 24 446 ⁰	Dokumen Lengkap	6 Org	-

Sumber : Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

☞ Kabupaten Bantaeng

- Kegiatan Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di kabupaten Bantaeng dilaksanakan dari adanya laporan dari masyarakat nelayan yang bermukim dipesisir pantai Kabupaten Bantaeng bahwa banyak nelayan dari luar kabupaten Bantaeng melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan Bantaeng dibawah 4 mil. Banyak nelayan kecil yang merasa terganggu dengan keberadaan kapal dari luar tersebut.
- Lokasi Taka Bunte berada dijalur penangkapan iakn dinatara 0 – 4 mil dari pinggir pesisir pantai dan berada pada titik koordinat S; 05° 46' 285" E 119° 37' 15.7" yang masih dominan dari nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap sesuai dengan peruntukannya seperti pancing.
- Pada titik koordinat S: 05° 36' 1.21" E 119° 28' 194" ditemuak kapal KMN. Fikri Jaya melintasi lokasi tersebut dan dilakukan pemeriksaan antara lain

jenis alat tangkap yang digunakan alat bantu penangkapan, jumlah awak kapal dan pemeriksaan dokumen kapal

- Dari hasil pemeriksaan kapal tersebut berasal dari Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar menggunakan alat tangkap Purse Seine yang masuk daerah perairan Kabupaten Bantaeng, dari hasil pemeriksaan dokumen ditemukan pelanggaran karena kapal tersebut tidak membawa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Pengangkut Ikan (SIKPI).
- Tindakan yang diambil dengan menggiring kapal tersebut kedermaga PPI Birea dibantu dengan beberapa petugas yang mengawal kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Total jumlah kapal nelayan dengan alat tangkap Purse Seine yang berhasil diamankan dan di Ad Hock ke dermaga Birea berjumlah 12 Kapal
- Kapal-kapal yang sudah di adhock didermaga PPI Birea kemudian para nahkoda dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diproses lebih lanjut.
- Atas permintaan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng bahwa untuk kasus tersebut diserahkan oleh Pemda Kabupaten Bantaeng dengan difasilitasi dari Polsek Bantaeng untuk dilakukan pembinaan.

☞ Kabupaten Wajo

- Gelar operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dititik beratkan diperairan kecamatan Sajoangin teluk Bone dimana dilokasi tersebut banyak nelayan yang masih menggunakan alat tangkap Trawl Mini dalam melakukan penangkapan ikan
- Pada posisi koordinat S : 03°58' 447" dan E : 120° 23' 406" diperairan Keera dilakukan henti riksa terhadap KMN. Rangka Lestari yang dinahkodai oleh Syamsuddin Roma. Hasil pemeriksaan bahwa kapal tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring dengan hasil tangkapan ikan Kerapu.

- Dari hasil pemeriksaan lanjutan bahwa kapal tersebut berasal dari Pulau Badi Kabupaten Pangkep yang melakukan kegiatan penangkapan diperairan Kabupaten Wajo.
- Dilakukan henti riksa terhadap kapal KMN. Marannu pada posisi koordinat S: 03'25 46.2" dan E: 120' 25 505' diperairan Siwa. Dari hasil pemeriksaan bahwa kapal tersebut hendak melakukan kegiatan penangkapan tanpa membawa dokumen. Tindakan yang dilakukan dengan membawa kapal tersebut ke pelabuhan Siwa dan selanjutnya diserahkan ke penyidik.
- Dilakukan henti riksa terhadap KMN. Minasa Bone 01 yang berasal dari kabupaten Takalar yang sedang berlabuh disekitar Pasi Tapange. Menurut lokasi Pasi Tapange merupakan lokasi terumbu karang.
- Masih banyak ditemuakn diperairan Keera penggunaan alat bantu seperti Kompresor di kapal nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Sejumlah kapal nelayan yang ditemukan dilapangan dilakukan henti riksa, selain pemeriksaan terhadap alat tangkap dan hasil tangkapan juga dilakukan pemeriksaan dokumen dalam rangka tertib administrasi.
- Dari hasil pemeriksaan beberapa kapal dari kegiatan patroli khususnya berupa dokumen kapal, masih banyak nelayan yang tidak paham mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dalam melakukan pelayaran untuk kegiatan penangkapan ikan.

☞ Kabupaten Luwu

- Gelar operasi dititik beratkan diperairan teluk Bone Kecamatan Larompong dan Kecamatan Suli dimana dilokasi tersebut terdapat titik daerah rawan pelanggaran diantaranya Pasi Mangumba.
- Banyak nelayan masih menggunakan alat tangkap Trawal Mini dalam melakukan penangkapan ikan sehingga banyak nelayan kecil didaerah tersebut merasa terganggu.
- Pada Posisi Koordinat S : 03'38 03.3' dan E : 120' 25 496" diperairan Kecamatan Suli tepatnya disekitar Pasi Rede'e dilakukan henti riksa terhadap KMN. Manis Manja yang dinahkodai oleh Agil Dg tutu. Hasil

pemeriksaan bahwa kapal tersebut berasal dari Dusun Kampung Beru, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar.

- KMN. Manis Manja melakukan pelayaran keperairan Teluk Bone untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring dengan hasil tangkapan ikan Kerapu. Dari analisis lapangan bahwa ikan yang didapatkan tidak sesuai dengan alat tangkap yang digunakan.
- Pemeriksaan terhadap kapal tersebut dilaksanakan karena adanya dugaan bahwa Awak Kapal tersebut secara bersama-sama dan bersekutu atau sendiri-sendiri patut diduga telah melakukan tindak pidana perikanan.
- Dilakukan henti riksa terhadap kapal KMN. Mandar Madani pada posisi koordinat S: 03°25' 46.2" dan E: 120° 25' 50.5" diperairan Pasi Mangumba yang berasal dari Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang berprofesi sebagai pemancing ikan Tuna. Dari hasil pemeriksaan bahwa kapal tersebut hendak melakukan kegiatan penangkapan tanpa membawa dokumen.

b) Patroli Optimalisasi Kelautan dan Perikanan

☞ Kabupaten Barru

- Hasil Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman di wilayah perairan kabupaten Barru dan sekitarnya tidak menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap operasional kapal perikanan nasional yang telah diperiksa
- Hasil analisis dan juridis terhadap beberapa kapal perikanan nasional yang diperiksa menunjukkan kesimpulan para pelaku usaha tidak terindikasi mengancam kerusakan atau kelestarian sumberdaya ikan dan/atau tidak berbuat tindak pidana
- Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan yang diperiksa memberikan keterangan bahwa pada wilayah perairan kabupaten Barru dan sekitarnya tidak dijumpai adanya praktek destruktif fishing berupa penggunaan bom dan bius.

☞ Kabupaten Luwu Timur

- Gelar Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman dititik beratkan diperairan teluk Bone meliputi kecamatan Poreang sampai perairan

kecamatan Malangke dimana lokasi tersebut terdapat titik daerah rawan illegal fishing

- Pada posisi koordinat S: 02° 38' 03.3" dan E: 119° 50' 49.6" sekitar perairan Berau dilakukan henti riksa terhadap KMN. Bintang Kejora yang dinahkodai oleh Rusmin. Hasil pemeriksaan bahwa kapalm tersebut berasal dari kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.
- Dilakukan pemeriksaan terhadap KMN. Bintang Kejora terkait jenis alat tangkap yang digunakan dan hasil pemeriksaan bahwa kapal tersebut berukuran 3 GT dengan jenis alat tangkap Purse Seine.
- KMN. Bintang Kejora tidak dilengkapi dengan beberapa dokumen yang menjadi syarat yang wajib berada diatas kapal sehingga dilakukan tindakan berupa pembinaan
- Pada posisi S: 02° 23' 49.6" dan E: 119° 59' 32.0" disekitar perairan Bulu Kolo terdapat nelayan sedang melakukan aktifitas dengan beberapa jenis alat tangkap seperti pancing rawai dan Bagang Rambo
- Dilakukan pemeriksaan terhadap KMN> Akai yang megggunakan alat tangkap Bagang Rambo dalam rangka tertib administrasi
- Dari hasil pemeriksaan bahwa kapal tersebut memiliki kapal pengangkut ikan untuk mengangkut hasil tangkapan ikan ke PPI Malili namun tidak dilengkapi dengan surat izin pengangkut ikan.

☞ Kabupaten Maros

- Gelar Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman dilakukan disekitar Desa Nisombalia diposisi koordinat S : 4° 49' 24.36.24" E: 119° 28' 40.7568", dilokasi tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen kapal dan isi muatan KM. Maega Lorin dengan pemilik Haeruddin yang berasal dari Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong kab. Takalar dan membawa 4 orang ABK. Setelah dilakukan interogasi bahwa kapal tersebut hendak menuju pulau Balang lombo kabupaten Pangkep untuk melakukan penangkapan ikan. Kapal tersebut juga membawa beberapa karung garam yang digunakan untuk melumuri ikan. Dari hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan bahwa dokumen kapal tersebut lengkap dengan masa berlaku dan alat tangkap yang digunakan juga dinyatakan tidak merusak ekosistem dan terumbu karang.

- Pada titik koordinat pemantaun merupakan salah satu daerah bagi nelayan kecil yang melakukan kegiatan penangkapan kepiting dengan menggunakan kapal jolloro dengan ukuran dibawah 3 GT, disekitar dermaga Bontoa. Nelayan ini menggunakan umpak ikan Bete-Bete yang ditangkap oleh nelayan Cantrang disekitar pesisir kabupaten Takalar.

☞ Pulau Karangrang Kabupaten Pangkep

- Gelar Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman difokuskan terhadap Kapal Cantrang yang berasal dari Kabupaten Takalar dan Pulau Pondang-Pondang.
- Pada Posisi koordinat antara S: $04^{\circ} 36'987''$ dan E: $119^{\circ} 20' 231''$ dilakukan pemeriksaan terhadap kapal Cahaya Surga yang berasal dari Takalar dengan pemilik Daeng Patta
- Dari hasil pemeriksaan kapal Cahaya Surga, dimana pelabuhan pangkalan dari kapal tersebut Takalar dan Makassar tidak terindikasi melakukan pengrusakan lingkungan
- Pada Operasi yang dititik beratkan pada daerah zona inti kawasan konservasi ditemukan banyak kapal yang berasal dari kabupaten Pangkep yang tidak terdaftar di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep sehingga ini perlu mendapat perhatian untuk dilakukan pendataan.

☞ Pulau Langkai dan Lanjukang Kota Makassar

- Gelar Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman dimulai dari Makassar menuju Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang dengan titik koordinat S: $5^{\circ} 8'38''.3496''$ dan E: $119^{\circ} 24. 6744''$
- Dijumpai kapal penangkap ikan yang sedang menangkap menggunakan cantrang, dengan nama kapal KM. Fatima II dengan pemilik Nurdin yang bersala dari desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dan membawa 8 orang ABK. Setelah dilakukan introgasi bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen . Selanjutnya tim hanya memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap batas waktu penggunaan cantrang sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun titik koordinat pemeriksaan pada S: $4^{\circ} 49'23.2932''$ dan E: $119^{\circ} 27'9.3168''$.

- Kemudian tim melakukan pemeriksaan kembali terhadap kapal yang menggunakan compressor sebagai alat bantu menangkap ikan menggunakan panah, pada titik ini adalah salah satu daerah bagi nelayan kecil yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu jolloro dengan ukuran dibawah 3 GT. Adapun titik koordinat pemeriksaan pada S: 5° 1'19.5132" dan E: 119° 9'16.5708".
- Menurut informasi dari nelayan, bahwa masih banyak nelayan yang mengoperasikan alat tangkap cantrang dari nelayan kabupaten Takalar sehingga meresahkan nelayan kecil atau nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing dimana dengan penggunaan alat tangkap cantrang membuat pendapatan mereka menurun dan dikhawatirkan apabila tidak dikendalikan akan menimbulkan konflik social antara nelayan.

☞ Pulau Samalona dan Kodingareng Kota Makassar

- Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman difokuskan sekitar koordinat S: 05°04 987 dan E: 119°20 231" diperairan selat Makassar sekitar Pulau Samalona dan Pulau Kodingareng
- Pada koordinat S:05°04 987 dan E: 119°20 231" dilakukan henti risiko terhadap beberapa kapal dan salah satunya KMN. Fatimah.
- Dari hasil pemeriksaan ditemukan surat-surat kapal dibawah 6 GT dan sudah tidak berlaku
- Masih sedikitnya kapal yang mengurus Surat Laik Operasional (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
- Masih Banyak nelayan dari kab. Takalar yang menggunakan alat tangkap cantrang yang beroperasi disekitar Pulau Samalona sehingga dapat merusak beberapa rumpon yang sudah terpasang

☞ Perairan Pulau Pajenekep dan Bontosua Kabupaten Pangkep

- Tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal cantrang yang melakukan operasi penangkapan dengan hasil sebagai berikut :
Nama Kapal : KMN. Malomoe 01

Nomor Izin	: SIUP : 523.5/VI/4/2015
Nama Pemilik	: Syarifuddin
Nama Nahkoda	: Hasan
Ukuran Kapal	: 5 GT
Alat Tangkap	: Cantrang
Jumlah ABK	: 5 orang
Hasil Pemeriksaan	: Dokumen Kapal lengkap dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep

- Pada koordinat S: $04^{\circ}57'167^{\circ}$ dan E: $119^{\circ}18.081$ disekitar perairan dilakukan pengejaran terhadap sebuah kapal Jolloro, setelah dilakukan pengejaran tim melakukan pemeriksaan, hasilnya dokumen kapal tidak lengkap. Kapal Jolloro itu dilakukan pendataan dan akan dilaporkan kedinas DKP Kabupaten Pangkep

- Selain patrol diperairan, tim juga melakukan pemeriksaan dokumen terhadap kapal ikan yang sandar di Pulau Pajenekang, dari hasil pemeriksaan diperoleh data kapal sebagai berikut :

Nama Kapal	: KMN. Rafi'I Jaya
Nomor Izin	: SIUP : 523.5/78/5/2014
Nama Pemilik	: H. Mustafa
Nama Nahkoda	: Amin
Ukuran Kapal	: 29 GT
Alat Tangkap	: Penampungan
Jumlah ABK	: 15 orang
Hasil Pemeriksaan	: Dokumen Kapal lengkap dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep

☞ Perairan Pulau Pondang-Pondang Kabupaten Pangkep

- Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman dilakukan pada koordinat S : $04^{\circ}53'16.5''$ E : $119^{\circ}20'28.8''$ dimana dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap KMN Minasa Bone 02 dengan pemilik Abdul Gafur dengan menggunakan alat tangkap Cantrang.
- Pada koordinat S : $04^{\circ}55'060''$ E : $119^{\circ}34'56.2''$ Tim melakukan pemeriksaan terhadap KMN Bahari Utama dengan pemilik Matta dengan

menggunakan mesin merk Mitsubishi 135 PK dengan ukuran kapal 6 GT menggunakan alat tangkap Cantrang dan berasal dari Pulau Pondang-Pondang kabupaten Pangkep.

☞ Perairan Kabupaten Pangkep

Tabel 21. Kegiatan Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman di Perairan Kabupaten Pangkep

No	Nama Kapal	Nahkoda	Asal	Alat Tangkap	Posisi Koordinat	Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	KMN. Magrifah	Albar	Kota Makassar	Purse Seine	S:04°59'120" E:119°19'218"	Dokumen berupa SPI dan SIUP tidak lengkap	Memanggil Nahkoda untuk pemeriksaan
2	KMN. Reski Selamat	Abd Rasyid Dg Nya'la	Takalar	Purse Seine	S:04°37'118" E:119°32'316"	Dokumen sudah tidak berlaku lagi	Mengamankan dokumen kapal sebagai barang bukti
3	KMN. Belantara Jaya		Takalar	Purse Seine	S:04°36'1.21" E:119°28'194"	Tidak membawa SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dokumen tersebut wajib diatas kapal	Membawa kapal tersebut kepelabuhan Paotere untuk dilakuakn pemeriksaan

☞ Pulau Lumu-Lumu dan Botetambu Kota Makassar

Tabel 22. Kegiatan Patroli Optimalisasi Kelautan dan Kemaritiman di Pulau Lumu-Lumu dan Botetambu Kota Makassar

No	Nama Kapal	Nahkoda	Asal	Alat Tangkap	Posisi Koordinat	Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	KMN. Baji Minasa 02	H. Sija	Pangkep	Cantrang	S:5°3'8.9136" E:119°18'8.4816"		-
2	KMN. Hakuna		Takalar	Cantrang	S:5°1'4.4472" E:119°15'51.1992"		-
3	KMN. Mia Abadi		Takalar	Purse Seine	S:4°58'45.7248" E:119°14'51.3196"	Mata jaring alat tangkap cantrang dibawah 2 (dua) inci	Membawa kapal tersebut kepangkalan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

☞ Pulau Barrang Lompo dan Barrang Caddi Kota Makassar

- Tim menuju Pulau Barrang Caddi, dijumpai kapal penangkap ikan yang menggunakan panah. Adapun nama kapal tersebut KMN. Syamsuddin dengan pemilik Rate yang berasal dari Takalar dan membawa 6 orang ABK. Pemeriksaan dilakukan pada koordinat S: 5° 3'18.0252" E: 119° 21'16.6788"
- Tim Patroli juga melakukan pemeriksaan kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan cantrang diantara pulau Barrang Lompo dan Barrang Cadi. Kapal tersebut berasal dari Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Tim Patroli melakukan kegiatan

pemeriksaan dokumen dan isi muatan kapal serta melakukan sosialisasi sebagai penyadaran kepada nelayan mengenai dampak penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem dan terumbu karang.

c) Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

☞ Kabupaten Wajo

- Diperairan kabupaten Wajo masih banyak menggunakan alat tangkap yang merusak atau tidak ramah lingkungan yang digunakan nelayan disekitar Danau Tempe seperti penggunaan Strom atau Listrik untuk menangkap ikan.
- Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diperairan Kabupaten Wajo belum optimal, disebabkan masih banyaknya nelayan dari luar kabupaten Wajo melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Cantrang dan bahan peledak/bom
- Perlu adanya PPNS didaerah tersebut untuk mendukung upaya kegiatan pengawasan didaerah ini, serta lebih aktif melakukan sosialisasi kenelayan dan stakeholders tentang pengalihan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti cantrang yang dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan biota laut lainnya dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

☞ Kabupaten Takalar

- Penggunaan alat tangkap cantrang diperairan Takalar membuat sebagian besar nelayan kecil yang bermukim dipesisir pantai Galesong resah sehingga berpotensi terjadi konflik antara nelayan, dimana nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang beroperasi dijalur penangkapan nelayan kecil
- Adapun kasus tindak pidana perikanan yang terjadi dikabupaten Takalar sangat tinggi, dimana dari data inventarisasi data tindak pidana perikanan menunjukkan banyak nelayan asal kabupaten Takalar yang tertangkap dan diproses oleh pihak Polairut Polda SulSel dan PPNS Perikanan Provinsi SulSel

- Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan sangat diperlukan guna memelihara kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dari berbagai aktifitas yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran ekosistem pantai dan laut sehingga sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dikelola secara berkelanjutan dimasa yang akan datang

☞ Kabupaten Sinjai

- Kasus tindak pidana Perikanan di kabupaten Sinjai Tahun 2015, Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Suhardi Bin Ambo Akkang, dimana pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 30 (Tiga Puluh) potong sumbu api rakitan dan 10 (sepuluh) botol pupuk Amonium Nitrat, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang tidak dikenal dimana pupuk Amonium Nitrat seharga Rp. 750.000 dan 30 (Tiga Puluh) potong sumbu api rakitan seharga Rp. 60.000.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Makassar No Lab : 2463/BHF/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol kaca warna bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO).
- Pidana terhadap terdakwa Suhardi Bin Ambo Akkang dengan penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan Selama 1 (Satu) bulan.

2. Pertemuan Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

☞ Kabupaten Bone

Waktu Pelaksanaan : Tanggal 4 Maret 2016

Tempat Pelaksanaan : Desa Lamuru Kec. Tellusiattinge Kab. Bone

Peserta : 30 Orang

Hasil yang dicapai

- ✓ Sesuai dengan hasil kunjungan perjalan dinas yang dilaksanakan oleh PPNS dan pengawas Perikanan Provinsi selama dikabupaten Bone dalam rangka Monitoring dan Evaluasi kegiatan Illegal Fishing dan dinyatakan bahwa kabupaten Bone tidak terdapat kasus tindak pidana yang keterkaitan dengan penangkapan ikan dilaut, hal ini disebabkan oleh dukungan yang telah dilakukan PPNS dan Pengawas Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sangat baik
- ✓ Pada kesempatan ini Masyarakat Kelompok Nelayan di Kabupaten Bone akan diberi pemahaman tentang hukum lewat pertemuan penyuluhan tentang hukum bagi masyarakat perikanan dan kelautan dimaksudkan untuk memberikan atau membekali kesadaran tentang hukum bagi masyarakat kelompok nelayan setempat.

☛ **Kabupaten Bulukumba**

Waktu Pelaksanaan : Tanggal 15 Maret 2016

Tempat Pelaksanaan : Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Bulukumba

Peserta : 30 Orang

Hasil yang dicapai

- ✓ Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba, kegiatan penangkapan ikan diperairan Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan Bom dan Bius masih sering terjadi.
- ✓ Untuk itu pada kesempatan ini Masyarakat Kelompok Nelayan di Kabupaten Bulukumba akan diberi pemahaman tentang hukum lewat pertemuan penyuluhan tentang hukum bagi masyarakat perikanan dan kelautan dimaksudkan untuk memberikan atau membekali kesadaran tentang hukum bagi masyarakat kelompok nelayan setempat, agar dikemudian hari masyarakat melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang sesuai atau yang dianjurkan oleh pemerintah.

- ✓ Dari hasil pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi Perundang-undangan dapat dilihat bahwa masyarakat nelayan penangkap ikan di kabupaten Bulukumba ini sangat antusias dan sadar bahwa penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat nelayan penangkap ikan di daerah ini yang rata-rata menggunakan alat tangkap purse seine, gill net dan pancing.

3. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian SDKP

Waktu Pelaksanaan : Tanggal 26 s/d 27 September 2016

Tempat Pelaksanaan : Hotel Grand Mulia, Makassar

Peserta : 40 Orang

Hasil yang dicapai

- ✓ Aspek pengawasan dan pengendalian terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan memegang peranan penting dan strategis dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab
- ✓ Dari hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diharapkan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan
- ✓ Dengan dilaksanakannya Forum Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana bagi pengawas dan pemangku kepentingan di bidang pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

c. Pengembangan SDM Pengawasan SDKP

APBD

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat pengawas Dalam Kegiatan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas dilaksanakan sebanyak 6 paket di beberapa kabupaten/kota.

1.1. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas 6 paket

Kabupaten Barru

- Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Sekretariat Pokmaswas kelurahan Mallawa dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab
- Peserta Pertemuan dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat yaitu para pelaku usaha (pembudidaya, nelayan, pedagang ikan), tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa dan aparat penyuluh perikanan, aparat penyuluh perikanan, aparat dinas Kab Barru sebanyak 30 orang.
- Permasalahan peserta yang berkembang adalah belum terbangunnya kesepahaman guna mendapatkan penyamaan persepsi terkait aspek teknis, kebijakan dan regulasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan system pengawasan berbasis Masyarakat (Siswasmas) dan kelembagaan Pokmaswas.
- Pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas di Kab. Barru perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat kemampuan SDM anggota belum merata dan kondisi tersebut sangat mempengaruhi penguatan kelembagaan secara social.
- Salah satu alternatif untuk mengatasi kevakuman Pokmaswas agar tetap aktif dan dinamis sepanjang waktu adalah dengan memberikan pembinaan rutin melalui latihan dan kunjungan pembinaan Pokmaswas di daerah.

Kabupaten Takalar

- Pertemuan ini dilaksanakan di PPI Beba Galesong Utara, kabupaten Takalar
- Peserta Pertemuan dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat yaitu para pelaku usaha (pembudidaya, nelayan, pedagang ikan), tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa dan aparat penyuluh perikanan, aparat penyuluh perikanan, aparat dinas Kab Takalar sebanyak 30 orang
- Permasalahn teknis yang mengemuka adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran anggota Pokmaswas dalam mendukung pelestarian sumberdaya ikan, minimnya partisipasi dan kerjasama pengawasan antar anggota Pokmaswas dengan aparat, rendahnya pemahaman anggota Pokmaswas terhadap tugas dan fungsi Pokmaswas dan minimnya pemahaman Pokmaswas terhadap petunjuk pelaksanaan Siswasmas serta

masih maraknya praktek *Destructive Fishing* yang tidak dapat diatasi oleh Pokmaswas.

- Tindak pelanggaran yang sangat marak ditemukan Pokmaswas adalah pelanggaran penggunaan alat tangkap terlarang berupa Cantrang dan Handak.
- Salah satu alternatif untuk memperkuat kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat didaerah adalah dengan membentuk wadah/forum koordinasi Pokmaswas agar komunikasi antar Pokmaswas tetap berjalan secara alami diantara para pengurus khususnya dalam menyampaikan pelaporan kepada aparat kepolisian dan kerjasama antar Pokmaswas tetap saling membantu.

Kabupaten Bone

- Pertemuan ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Kajua, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.
- Objek pengawasan Pokmaswas mencakup pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara sinergitas, koordinatif, preemptive, dan preventif dengan bekerjasama pemerintah daerah, aparat gakum dan para pelaku usaha
- Sebahagian besar masyarakat nelayan merasa tidak percaya dengan kinerja kepolisian Resort Bone dalam penanganan tindak pidana perikanan sehingga lebih memilih passif dan bermasa bodoh untuk melaporkan.
- Umumnya masyarakat telah menyadari dan berpartisipasi melakukan pengawasan berbasis masyarakat, bahkan sangat geram dengan para pelaku handak yang bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum akibat lemahnya penegakan hukum oleh aparat kepolisian setempat.

Kabupaten Wajo

- Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Gedung 45 Desa Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo
- Peserta Pertemuan dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat yaitu para pelaku usaha (pembudidaya, nelayan, pedagang ikan), tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa dan aparat penyuluh perikanan, aparat penyuluh perikanan, aparat dinas Kab Wajo sebanyak 30 orang.
- Masyarakat mengeluhkan adanya nelayan pengguna alat tangkap yang merusak seperti alat tangkap jaring (*Bungku toddo/Lanra*) ukuran 5 cm

kebawah termasuk *Jebba, Bunre, Passoso, tongkang dan Racun*, berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dapat dipidana penjara 6 bulan atau denda 50 juta rupiah.

- ➔ Permasalahan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah (DKP Kab. Wajo terkait Danau Tempe sebagai sumber mata pencaharian masyarakat antara lain :
 - Perlunya memikirkan Danau Tempe Sebagai penyokong kehidupan masyarakat. Danau Tempe berfungsi sebagai penampung air, produksi ikan, sumber mata pencaharian. Oleh karenanya disaat masyarakat terancam kehilangan sumber mata pencaharian dan harus beralih terhadap sumber mata pencaharian lain akibat adanya pendangkalan dan pencemaran akibat banjir musiman.
 - Permasalahan manajemen yang mengemuka bagi Pokmaswas bentukan dinas adalah belum adanya kelengkapan administrasi kelompok berupa buku rencana kerja kegiatan tahunan, terbatasnya kemampuan Pokmaswas merencanakan program kegiatan, mengadakan sejumlah kebutuhan buku administrasi berupa buku laporan kegiatan, buku laporan kejadian pelanggaran, buku potensi, buku agenda surat masuk-keluar serta buku keanggotaan kelompok.

Kabupaten Maros

- ➔ Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat Pokmaswas Minasa Baji, Kelurahan Bori Masunggu, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros
- ➔ Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maros Ir. Ansarullah, MM menegaskan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh masyarakat (Pokmaswas) wajib mengedepankan prinsip pelestarian sumberdaya yang bertanggung jawab dan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.
- ➔ Menurut pengakuan para nelayan dan tokoh masyarakat, bahwa pelanggaran/pidana yang marak terjadi berupa penggunaan bius dan formalin yang diduga dilakukan oleh nelayan atau pedagang ikan dari luar kabupaten Maros
- ➔ Pokmaswas melaporkan keresahan anggotanya tentang maraknya pengguna pestisida dilahan pertanian dan budidaya serta penggunaan cantrang yang diduga dilakukan oleh nelayan pendatang serta aksi

penebangan mangrove yang ditenggarai dilakukan oleh warga sendiri yang hingga kini tidak mampu disikapi secara tegas oleh Pokmaswas.

- Anggota Pokmaswas mengharapkan adanya bimbingan dan pembinaan Pokmaswas secara berkelanjutan melalui kunjungan kelompok oleh aparat Pembina teknis dari DKP Kab dan Provinsi

Kabupaten Luwu Timur

- Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Pertemuan Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
- Peserta Pertemuan dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat yaitu para pelaku usaha (pembudidaya, nelayan, pedagang ikan), tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa dan aparat penyuluh perikanan, aparat penyuluh perikanan, aparat dinas Kab. Luwu Timur sebanyak 30 orang.
- Peserta dibekali materi Pokmaswas tentang pemahaman peraturan perundang-undangan, peraturan menteri KKP terbaru, materi teknis, social dan manajemen Pokmaswas
- Peserta dibimbing dan dimotivasi untuk dapat mewujudkan partisipasi, dan kerjasama pengawasan dalam kelembagaan Pokmaswas di daerah
- Peserta diberikan bimbingan teknis penanganan pelanggaran dalam hal tersangka tertangkap tangan, dibimbing pembuatan laporan kegiatan/laporan kejadian, serta pencatatan pembukuan administrasi sebagai bukti pelaksanaan tugas kelompok.
- Masalah yang ditemukan dalam kelembagaan Pokmaswas adalah belum adanya kelengkapan administrasi kelompok berupa buku rencana kerja kegiatan tahunan, terbatasnya kemampuan Pokmaswas dalam perencanaan dan penyusunan program kegiatan, pengadaan sejumlah kebutuhan buku administrasi, buku laporan kegiatan, buku laporan kejadian pelanggaran, buku potensi, buku agenda surat masuk-keluar serta buku keanggotaan kelompok.

1.2 Pertemuan Forum Komunikasi Pokmaswas 1 Kegiatan

Maksud pelaksanaan pertemuan Forum Komunikasi Pokmaswas lingkup provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 adalah terbentuknya wadah masyarakat pengawas di tingkat provinsi untuk terlaksananya simpul koordinasi pengawasan, penyamaan persepsi untuk terwujudnya keterpaduan gerak dan langkah serta kerjasama pengawasan melalui jaringan informasi dan

komunikasi antar Pokmaswas, antar pejabat pembina dan antar aparat perikanan dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat.

Tujuannya adalah meningkatnya kemampuan peran aktif kelembagaan Pokmaswas dalam mewujudkan terlaksananya sistem pengawasan SDKP yang berbasis masyarakat secara terpadu dalam rangka pencapaian efektifitas dan efesiensi pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan kab/kota provinsi Sulawesi Selatan.

Kesimpulan dan saran / hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pemerintah provinsi Sulsel bidang pengawasan SDKP memprioritaskan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan nelayan / masyarakat pesisir, sosialisasi penyadaran hukum, pengawasan dan penegakan hukum (*preventif dan repressif*).
- 2) Program Pengawasan SDKP yang diprioritaskan pemerintah provinsi Sulsel melalui renstra pembangunan Prov Sulsel adalah :
 - pemberdayaan masy pesisir, PPK & konservasi SDKP;
 - pemberdayaan masy dlm pengawasan & pengendalian SDKP;
 - sosialisasi penyadaran destruktive fishing;
 - pengendalian & pengawasan SDKP yg merusak;
 - pelatihan penyadaran masy dlm rangka pengendalian kerusakan SDKP;
 - pengembangan Pokmaswas di setiap daerah;
 - sosialisasi perlindungan terumbu karang & biota yang hampir punah (*biota cities*).
- 3) Sistem pelaksanaan pengawasan SDKP dilaksanakan dalam bentuk :
 - M : Monitoring/Pemantauan.
 - C : Controlling/Pengendalian.
 - S : Surveillance/Pengawasan Lapangan.
 - (i) : Investigasi/Penyelidikan.
- 4) Kendala pengawasan SDKP di WPP Sulsel sekarang ini adalah :
 - Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM aparat Pengawas Perikanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana operasional pengawasan perikanan.
- Terbatasnya dukungan biaya operasional pengawasan perikanan.
- Regulasi/instrumen hukum masih perlu disempurnakan
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan instansi terkait.
- Jejaring pengawasan belum mapan .

Untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas kelembagaan POKMASWAS di daerah Kab/Kota, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain : a) pemerintah daerah secara kontinuitas terhadap penguatan kelembagaan POKMASWAS secara menyeluruh; b) bimbingan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan jejaring sosial dan partisipasi Masyarakat Pengawas; c) dukungan sarana dan prasarana operasional masyarakat pengawas; d) terlaksananya pembinaan teknis sistem pengawasan berbasis masyarakat dan sistem pelaporan; e) terlaksananya kegiatan Pelatihan, Pemagangan, Workshop; f) terlaksananya pemecahan masalah dan kajian bersama/studi kasus terhadap permasalahan internal masyarakat pengawas.

1.3. Pengadaan public awareness 1 paket

Maksud kegiatan pengadaan public awareness 1 paket adalah terlaksananya dukungan penyampaian informasi penyadaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab kepada seluruh public masyarakat pesisir/pemanafaat melalui pesan-pesan tulisan/gambar/himbauan dalam bentuk pengadaan kalender duduk, poster, baju kaos, dan pin stop illegal fishing.

Tujuannya adalah meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga, melindungi dan mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan bertanggung yang bebas dari *illegal fishing* dan *destructive fishing* di wilayah pengelolaan perikanan kab/kota provinsi Sulawesi Selatan.

Sasarannya adalah terwujudnya kesepahaman dan kesadaran public bekerjasama menjaga, melindungi dan mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan bertanggung yang bebas dari

peraktek *illegal fishing* dan *destructive fishing* di wilayah pengelolaan perikanan kab/kota provinsi Sulawesi Selatan.

Bahan bahan yang digunakan dalam rangka pengadaan public awareness 1 paket meliputi pencetakan kalender duduk, poster, baju kaos dan pin stop illegal fishing yang ibagikan kepada seluruh stakeholders terkait, khususnya kepada masyarakat nelayan, pokmaswas dan aparatur Propinsi dan Kabupaten/Kota

1.4 Cetak kartu identitas Pokmaswas 200 buah.

- Maksud pencetakan kartu identitas Pokmaswas adalah untuk terlaksananya kontrol anggota masyarakat pengawas dan kelembagaan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah kepada setiap kelembagaan Pokmaswas dalam pelaksanaan pengawasan SDKP di daerah kab/kota.
- Tujuannya adalah untuk menunjukkandan memperkenalkan identitas resmi sebagai bukti legalitas Pokmaswas dan mitra pemerintah dalam pelaksanaan peranpengawasan berbasis masyarakatyang dibina dan dievaluasi oleh pemerintah berdasarkan azas kewilayahan (kab/kota, kecamatan, desa);
- Sasarannya adalah terlaksananya pembinaan administrasi dan kontrol pelaksanaan fungsi pengawasan berbasis masyarakat, baik secara individu maupun secara kelembagaan di wilayah prov Sulsel dalam membantu pengawasan SDKP di daerah.
- Pembagian kartu tanda pengenal Pokmaswas diberikan kepada Pokmaswas : Kab Bone sebanyak134 lembar, Pokmaswas Kab. Bulukumba sebanyak15 lembar, Kabupaten Palopo sebanyak 15 lembar, dan Kabupaten Sinjai 36 Lembar. dengan total kartu tanda pengenal Pokmaswas sebanyak 200 lembar.

1.5 Cetak buku Saku Pokmaswas 300 buah

- ➡ Maksud pembinaan Pokmaswas 19 lokasi Kab/Kota adalah terlaksananya kunjungan pembinaan kelompok guna meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi anggota dan pengurus Pokmaswas dalam membantu Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di daerah.
- ➡ Tujuannya adalah meningkatnya kemampuan anggota dan pengurus Pokmaswas dalam menangani permasalahan teknis, social dan manajemen dalam internal kelembagaan Pokmaswas didaerah.

- Permasalahan yang dijumpai ditingkat Pokmaswas Kab/kota adalah minimnya partisipasi dan kemampuan Pokmaswas dalam melaksanakan tugas dan peran Pokmaswas, terbatasnya pengetahuan Pokmaswas dalam menerapkan juknis tatacara pelaksanaan Pokmaswas.
- Distribusi Buku Saku Pokmaswas Tahun 2016 yaitu DKP Sulsel (20 buah), Kota Makassar (19 Buah), Takalar (40 buah), Bone (35 Buah), Kota Palopo (14 buah), Lutra (2 buah), Jeneponto (10 buah), Bulukumba (13 buah), Enrekang (27 buah), Barru (32 buah), Sinjai (14 buah), Bantaeng (5 buah), Kota Pare-Pare (15 buah), Gowa (5 buah), Luwu (5 buah), Maros (5 buah), Pinrang (10 buah), Wajo (7 buah), Lutim (13 buah), Selayar (9 buah)

1.6 Perdin dalam daerah dalam rangka penilaian kinerja pokmaswas 23 OH

- Maksud pelaksanaan penilaian kinerja Pokmaswas adalah untuk menilai kinerja Pokmaswas yang berperan aktif sebagai terbaik satu di Kabupaten/Kota dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan kinerja Pokmaswas dibidang teknis, sosial dan manajemen Pokmaswas dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terukur dan objektif.
- Sasarannya adalah tersedianya bahan data evaluasi kinerja kelembagaan Pokmaswas bidang pelestarian sumber daya perairandan bidang sumber daya perikanan di tingkat provinsi Sulsel guna mengikuti proses penilaian kinerja Pokmaswas tingkat nasional tahun 2016.
- Kriteria pelaksanaan evaluasi penilaian terhadap Pokmaswas, sebagai berikut : a) Pokmaswas telah dikukuhkan minimal 2 tahun oleh instansi yang berwenang; b) telah berperan aktif dalam membantu SDKP di kab/kota, c) merupakan pemenang di tingkat kab/kota, d) memiliki profil Pokmaswas berupa selang pandang kegiatan Pokmaswas berikut hasil kegiatan yang memuat out line berikut : a) Nama dan riwayat berdirinya Pokmaswas; b) Organisasi, tugas dan fungsi Pokmaswas; c) Jumlah anggota Pokmaswas minimal 10 orang; d) Kegiatan Pokmaswas yang telah dilaksanakan; e) prestasi yang pernah dicapai Pokmaswas; f) Sarana dan prasarana yang dimiliki Pokmaswas; g) Lampiran : piagam penghargaan, dokumentasi kegiatan.

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1752 / VIII / 2016, tanggal 1 Agustus 2016 (Terlampir) tentang penetapan pemenang hasil evaluasi penilaian tahunan kinerja Pokmaswas tingkat Provinsi Sulsel tahun 2016, diketahui bahwa kelembagaan Pokmaswas binaan yang berhasil dan telah berperan aktif berpartisipasi membantu pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bidang sumberdaya perikanan dan bidang pelestarian sumberdaya perairandengan prestasi terbaik di tingkat provinsi Sulsel, adalah sebagai berikut :

➤ Pokmaswas Bidang Sumber Daya Perikanan

No	Nama Pokmaswas	Alamat	Nama Ketua	Nilai	Pemenang
1	Batu Mesu	Kel Sapolohe, Kec Bonto Bahari, Kab Bulukumba	Nurdin Pattah	94%	Juara I
2	Balang Datu	Tana Keke, Desa Balang Datu, Kec Mapakasunggu, Takalar	Abdul Malik Dg Ngewa	81%	Juara II
3	Komando	P.Bontosua, Desa Mattirotone, Liukang Tupabbiring Utara, Pangkep	Ridwan Wandu	80%	Juara III

➤ Pokmaswas Bidang Pelestarian Sumber Daya Perairan

No	Nama Pokmaswas	Alamat	Nama Ketua	Nilai	Pemenang
1	Mattiro Deceng	Desa Kajuara Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.	Suardi	95%	Juara I
2	La' Balesse	Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare	Ahmad Yani	86%	Juara II
3	Bilongka	Desa Buntu Ma'tabing, Kec Larompong, Kab Luwu	Abd.Rahman	80%	Juara III

2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan SDM Aparat Pengawas.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan SDM aparat pengawas didukung oleh beberapa sub kegiatan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1 Kegiatan temu teknis pengawas/PPNS perikanan 1 kegiatan.

- Maksud pelaksanaan temu teknis Pengawas Perikanan/PPNS lingkup provinsi Sulsel adalah untuk terlaksananya peningkatan pengetahuan dan kesepahaman teknis operasional Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Tujuannya adalah meningkatnya kelancaran dan kemampuan kinerja Pengawas Perikanan/PPNS di lingkup Prov. Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Sasarannya adalah terciptanya kesepahaman strategi dan teknis operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh daerah kabupaten/kota lingkup Prov. Sulawesi Selatan oleh pengawas perikanan.
- Kegiatan temu teknis pengawas perikanan/PPNS lingkup provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 April 2016 di Yasmin Hotel Jalan Jampea Nomor 5 Makassar.
- Temu teknis pengawas perikanan/PPNS lingkup provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dihadiri oleh peserta sebanyak 50 orang, melibatkan para Pengawas Perikanan DKP Kabupaten/Kota, para PPNS Perikanan DKP Kabupaten/Kota, Polsus Perikanan Kabupaten/Kota dan para Pejabat DKP Kab/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan.
- Hasil pelaksanaan kegiatan, kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :
 - 1) Kebijakan pengawasan SDKP di wilayah Prov. Sulawesi Selatan adalah : a) operasi terpadu (koordinasi dan kerjasama dengan TNI AL dan Polair; b) penguatan regulasi; c) dukungan pembiayaan; d) Pengarustaman gender.
 - 2) Tujuan pembangunan perikanan bidang pengawasan SDKP adalah meningkatkan kelestarian lingkungan sumber daya kelautan dan

perikanan. Dan sasarannya meningkatnya pemanfaatan SDK, pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari, berkelanjutan dan bertanggung jawab;

- 3) Strategi pengawasan SDKP di Sulawesi Selatan adalah : a) pembinaan dan penataan dalam pemanfaatan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; b) penertiban dan ketaatan dalam pemanfaatan SDK dan SDKP; c) pemberdayaan, pengawasn dan pemanfaatan SDKP; d) penyuluhan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e) penyadaran masyarakat (*public awarness*).
- 4) Salah satu issu utama bidang pengawasan SDKP di wilayah Prov. Sulawesi Selatan akhir-akhir ini adalah : a) Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya; b) illegal fishing; c) lingkungan; d) persaingan pasar global dan industrialisasi proteksi produksi perikanan oleh negara maju.
- 5) Salah satu instrumen Pengawasan Perikanan yang digunakan terhadap operasional kapal perikanan di laut/pelabuhan, diantaranya adalah : HPK Kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan dipelabuhan pangkalan; SLO; Loog book penangkapan; SHTI; Surat aktivasi penggunaan transmitter/ VMS.
- 6) Pengawasan perdagangan jenis ikan napoleon untuk tujuan ekspor hanya dapat melalui udara pada bandara Soekarno Hatta di Jakarta dan bandara Ngura Rai Bali di seluruh Indonesia dan tidak diperkenankan melalui laut.
- 7) Pengawasan operasional budidaya diarahkan pada jenis budidaya, spesies budidaya, luas lahan/lokasi, penggunaan dana dan/atau tenaga kerja asing, penggunaan pakan/obat-obatan/antibiotic/bahan kimia lainnya.

2.2 Forum PPNS perikanan Sulawesi Selatan I kegiatan

- ✦ Pertemuan forum PPNS Perikanan Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk terlaksananya pembinaan kompetensi, etika dan pengawasan, serta terlaksananya penyatuan gerak dan langkah dalam jiwa korsa PPNS melalui koordinasi dan komunikasi antar PPNS Perikanan Sulawesi Selatan.

- Tujuannya adalah meningkatnya harmonisasi, persatuan dan kesatuan, etika dan moralitas hukum serta kerjasama saling membantu dalam penanganan tindak pidana perikanan antar PPNS Perikanan Sulawesi Selatan.

Sasarannya adalah terwujudnya wadah organisasi PPNS Perikanan Sulawesi Selatan untuk mempersatukan gerak langkah dan meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan etika PPNS dalam mengikuti dinamika kemajuan ilmu dan teknologi

- Kegiatan Pertemuan Forum PPNS Perikanan Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 September 2016 di Grand Imawan Jalan Pengayoman Nomor 36 Panakkukang, Makassar.

- Pelaksanaan Pertemuan Forum PPNS Perikanan Sulawesi Selatan dihadiri oleh peserta sebanyak 50 orang dengan melibatkan para PPNS Perikanan DKP Kabupaten / Kota dan Provinsi, Pengawas Perikanan Pos PSDKP Kabupaten/Kota, Polsus Perikanan Kabupaten/Kota dan para Pejabat DKP Kab/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan

- Hasil pelaksanaan pertemuan forum PPNS Perikanan lingkup prov Sulawesi Selatan, kesimpulan dan saran sebagai berikut :

- 1) PPNS Perikanan DKP Kab/Kota diharapkan tetap dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai PPNS Perikanan meskipun struktur organisasinya yang sebelumnya melekat di Unit Kerja Bidang Pengawasan SDKP-DKP Kab/Kota telah dihapus seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) PPNS Perikanan memiliki indefendensi kewenangan dalam hal penyidikan tindak pidana perikanan di kab/kota meskipun struktur organisasi sebelumnya (bidang pengawasan SDKP) telah dihapus.
- 3) PPNS Perikanan Kab/Kota yang masih ragu-ragu melaksanakan penyidikan TPP, maka dapat meminta bantuan PPNS Perikanan Satker PSDKP Makassar atau Pangkalan PSDKP Bitung untuk dilaksanakan penyidikan bersama dan bila PPNS Perikanan Kab/kota tidak memiliki alokasi anggaran penyidikan, maka dapat memohon ke pusat secara langsung dan/atau melalui Kepala Pangkalan PSDKP Wil Timur.

- 4) Permasalahan yang ditemui bagi PPNS Kab/Kota saat ini adalah adanya kecenderungan dimana atasan selaku Kepala Dinas tidak menyetujui adanya tindakan penyidikan kasus melainkan dengan pembinaan. Hal ini menjadi masalah dalam aspek formil dan materil penyidikan karena salah satu syarat terlaksananya proses penyidikan berdasarkan juknis adalah adanya surat perintah penyidikan atasan atau surat perintah penyidikan yang diketahui atasan bagi PPNS.
- 5) Permasalahan dalam penyidikan lainnya adalah sulitnya menitip tahanan di rutan, dimana rutan menolak menerima titipan tahanan dari PPNS kecuali dari kepolisian

2.3. Cetak buku saku pengawas/PPNS Perikanan sebanyak 300 buah

- ✦ Maksud pencetakan buku saku pengawas / PPNS Perikanan adalah sebagai acuan atau pedoman bagi aparat pengawas/PPNS Perikanan lingkup provinsi Sulawesi-Selatan dalam melaksanakan tugas sebagai keseragaman pola tindak operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara akuntabel & tepat waktu. Sekaligus sebagai panduan pelaksanaan teknis operasional bagi aparat PPNS / Pengawas Perikanan dilapangan.
- ✦ Tujuannya adalah tersedianya panduan dan petunjuk teknis bagi aparat pengawas / PPNS Perikanan lingkup provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau penyidikan sebagai keseragaman pola tindak operasional berdasarkan berdasarkan Stándar Operasional Prosedur.
- ✦ Sasarannya adalah terwujudnya kesepahaman dan keseragaman pola tindak operasional bagi PPNS / Pengawas Pengawas lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan dan penyidikan perkara TPP. Sekaligus terciptanya pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan secara lestari dan berkelanjutan.

- ✦ Distribusi buku saku pengawas/PPNS Perikanan sebagai berikut : DKP Sulsel 30 buah, Kota Makassar 20 buah, Maros 15 buah, Pangkep 15 buah, Barru 18 buah, Pinrang 10 buah, Wajo 15 buah, Bone 45 buah, Kota Palopo 20 buah, Luwu 15 buah, Luwu Utara 12 buah, Luwu Timur 25 buah, Sinjai 10 buah, Jenepono 10 buah, Bantaeng 10 buah, Bulukumba 10 buah, Takalar 10 buah dan Gowa 10 buah

3. Kegiatan Inventarisasi data pengawas perikanan dan kelompok SISWASMAS

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi data pengawas perikanan dan kelompok SISWASMAS didukung oleh beberapa sub kegiatan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Pertemuan sosialisasi data pengawas perikanan dan kelompok Siswasmas 1 kegiatan

Maksud pelaksanaan sosialisasi data pengawas perikanan dan kelompok Siswasmas adalah terlaksananya penyamaan persepsi dengan seluruh stakeholders untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan pengawasan sumber daya ikan yang berbasis masyarakat di wilayah pesisir kab/kota.

Tujuan pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah meningkatnya ketaatan dan kepatuhan dalam pelaksanaan sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran pelaksanaan sosialisasi data pengawas perikanan dan kelompok SISWASMAS adalah terwujudnya pelaksanaan sistem pengawasan sumberdaya ikan yang lesatari dan bertanggung jawab denagbn melibatkan peranserta masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan kabupaten/kota. Pelaksanaan sosialisasi data pengawas perikanan dan kelompok siswasmas dilakukan di 3 kab/kota dengan hasil sebagai berikut :

3.1.1 Sosialisasi data pengawas perikanan dan kelompok siswasmas di Kota Makassar

- Pertemuan sosialisasi data pengawas perikanan dan kelompok siswasmas di Makassar dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan SDM Pengawasan Kelautan dan Perikanan, Bidang Pengawasan SDKP pada Tanggal 10 Maret 2016 bertempat Pulau Lae Lae, Kota Makassar.

- Pertemuan sosialisasi sosialisasi data pengawas perikanan dan kelompok siswasmas dihadiri oleh peserta sebanyak 50 orang.
- Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :
 - 1) Peserta diberikan pemahaman penyamaan persepsi terkait aspek teknis, sosial, kebijakan dan regulasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan system pengawasan berbasis masyarakat.
 - 2) Sosialisasi diberikan pemahaman secara komprehensif tentang pengembangan kesadaran & partisipasi masyarakat pengawas, pemahaman SISWASMAS dan POKMASWAS, dasar hukum pelaksanaan SISWASMAS, tatacara pembentukan POKMASWAS, tugas dan peran POKMASWAS, petunjuk / tatacara pelaksanaan SISWASMAS, pemahaman objek pengawasan berbasis masyarakat serta pemahaman tindak pidana perikanan berikut sanksi-sanksi pidananya.
 - 3) Peserta dibekali pemahaman teknis agar dapat memiliki kesepahaman, kesadaran, motivasi dan partisipasi aktif dalam mewujudkan terlaksananya sistem pengawasan SDKP yang berbasis masyarakat (SISWASMAS) serta dapat mewujudkan kerjasama pengawasan dengan para pelaku usaha, pemerintah dan aparat penegak hukum.
 - 4) Kelompok masyarakat pengawas yang menjadi binaan adalah Pokmaswas Cinta Laut dengan ketua Abd Wahab.
 - 5) Masyarakat telah dapat memahami sedikit demi sedikit esensi pengawasan SDKP yang berbasis masyarakat berdasarkan tatacara pelaksanaan SISWASMAS, namun belum dapat melaksanakan secara komprehensif karena belum memiliki kelompok Pokmaswas

3.1.2 Sosialisasi data Pengawas Perikanan dan Kelompok Siswasmas di Jeneponto.

- ✚ Pertemuan sosialisasi data pengawas perikanan dan kelompok SISWASMAS dilaksanakan pada Tanggal 11 Juni 2016 di sekretariat POKMASWAS General, Kelurahan Pantai Bahari, Kec Bangkala Kab Jeneponto.
- ✚ Pertemuan sosialisasi sosialisasi data pengawas perikanan dan kelompok siswasmas dihadiri oleh para pelaku usaha perikanan/ nelayan/ pengumpul/ pembudidaya, pengolah ikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,

pemuda, LSM, aparat kelurahan serta aparat dinas DKP Kab. Jeneponto dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

■ Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Peserta dibekali pemahaman tentang dasar hukum pelaksanaan SISWASMAS, hubungan antara SISWASMAS dengan POKMASWAS dan Pengawas Perikanan, tatacara pembentukan POKMASWAS, dasar hukum pelaksanaan tugas POKMASWAS, uraian tugas dan peran POKMASWAS, petunjuk / tatacara pelaksanaan SISWASMAS, pemahaman objek pengawasan SDKP berbasis masyarakat, serta pemahaman tindak pidana perikanan berikut sanksi-sanksi pidananya.
- 2) Masyarakat pesisir Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Jeneponto telah dapat memahami dan melaksanakan partisipasi berbasis masyarakat, dasar hukum pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat, tugas kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), namun demikian masyarakat sangat geram dan tidak percaya dengan pemerintah daerah, termasuk terhadap aparat perikanan dan aparat kepolisian akibat pelaporannya yang sekian lama seolah didiamkan, tidak ada tindak lanjut penegakan hukum, tidak nampak adanya upaya serius aparat hukum untuk berupaya menangkap para pelaku bom/bius melalui patroli atau operasi.
- 3) Posisi geografis wilayah peisisir kelurahan Pantai Bahari sangat menguntungkan para pelaku kejahatan *illegal fishing*, mengingat wilayah tersebut sangat jauh dari jangkauan layanan satuan kerja pelayanan aparat hukum terdekat termasuk Pos Polair, Pos TNI AL, Pos Kesyahbandaran Pelabuhan, Pos Pengawas Perikanan, aparat kepolisian, sehingga menyulitkan laporan masyarakat untuk kasus tangkap tangan.
- 4) Masyarakat nelayan kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala Jeneponto, merasa apatis dan kecewa terhadap pejabat DKP Jeneponto dan DKP Provinsi termasuk dengan jajaran aparat penegak hukum (Polres Jeneponto) karena tidak pernah merespon laporan masyarakat apalagi menindak tegas pelaku kejahatan bom di laut.

■ Aparat kepolisian maupun pengawas perikanan / PPNS tidak mampu menghentikan bom ikan yang dilakukan pelaku dengan inisial Daeng Jarre asal

Takalar apalagi untuk menangkap tangan secara langsung karena kepiawaiannya melarikan diri secara spontan, bahkan pernah tetangkap tangan sebelumnya akan tetapi kemudian dinyatakan bebas oleh aparat kepolisian.

3.1.3. Sosialisasi Data Pengawas Perikanan dan Kelompok Siswasmas di Luwu

- ✦ Kegiatan pertemuan sosialisasi SISWASMAS dilaksanakan pada Hari Jumat / Tanggal 2 November 2016, bertempat di Sekretariat POKMASWAS BILONGKA, Dusun Tolemo, Desa Buntu Matabing, Kec Larompong, Kabupaten Luwu.
- ✦ Pelaksanaan Pertemuan sosialisasi SISWASMAS di Kabupaten Luwu Tahun 2016 dihadiri oleh peserta sebanyak 50 orang yang merupakan perwakilan anggota dan pengurus dari 8 (delapan) Pokmaswas setempat.
- ✦ Hasil yang divapai adalah sebagai berikut :
 - 1) SISWASMAS menekankan kesepahaman persepsi tentang tatacara pelaksanaan SISWASMAS dalam hubungannya dengan POKMASWAS, dasar hukum pelaksanaan SISWASMAS, tatacara pembentukan kelembagaan POKMASWAS, tugas dan peran POKMASWAS, petunjuk teknis pelaksanaan SISWASMAS, pemahaman objek pengawasan berbasis masyarakat, serta pemahaman tindak pidana perikanan berikut sanksi-sanksi pidananya.
 - 2) Terbangunnya kesepahaman dengan seluruh stakeholders terkait khususnya terhadap pengguna jasa bidang kelautan dan perikanan, diharapkan dapat bermanfaat guna mendukung terselenggaranya pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka terciptanya tertib pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang perikanan.
 - 3) Seluruh masyarakat diharapkan dapat memahami secara utuh esensi SISWASMAS dan POKMASWAS berdasarkan Kepmen KP Nomor 58/Tahun 2001 tentang tatacara pelaksanaan SISWASMAS serta dapat menyadari dan termotivasi berperan aktif bekerjasama dalam membantu pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat berdasarkan petunjuk teknis atau tatacara pelaksanaan SISWASMAS.

- 4) Masyarakat dapat memahami Objek pengawasan Pokmaswas dibidang sumber daya perairan dan sumber daya perikanan (tangkap) yang dalam pelaksanaannya diharapkan mewujudkan sinergitas, koordinasi dan kerjasama antar masyarakat pelaku usaha lainnya, aparat keamanan dan pemerintah daerah (kab/kota dan provinsi).
- 5) Pokmaswas merasa berkecil hati akibat diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pejabat/aparat DKP Luwu tidak lagi dapat secara bersama-sama melaksanakan pengawasan bersama dalam bentuk patroli terpadu sebagai tindak lanjut atas laporan Pokmaswas.

3.2. Inventarisasi data pengawas perikanan 1 paket

- ✦ Maksud Inventarisasi Data Pengawasan Perikanan adalah terlaksananya pendataan data base SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di kabupaten / kota dan provinsi Sulawesi Selatan.
- ✦ Tujuannya adalah tersedianya data base SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di kab/kota dan provinsi Sulsel.
- ✦ Sasarannya adalah terwujudnya pemutakhiran data base SDM pengawasan yang meliputi aparatur pengawas perikanan dan kelembagaan masyarakat pengawas yang dapat berperan aktif mendukung pelaksanaan pengawasan SDKP di kab/kota
- ✦ Hasil pelaksanaan inventarisasi data pengawasan perikanan kab / kota sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	SDM PENGAWASAN PERIKANAN	JUMLAH (ORANG/KLMPK)	KETERANGAN	
				Aktif	Tdk Aktif
1	Makassar	PPNS/Pengawas Perikanan	7		
		Pokmaswas	8	5	3
2	Takalar	PPNS/Pengawas Perikanan	5		
		Pokmaswas	18	18	-
3	Bulukumba	PPNS/Pengawas Perikanan	3		
		Pokmaswas	23	5	18
4	Luwu Timur	PPNS/Pengawas Perikanan	2		
		Pokmaswas	14	4	10

5	Wajo	PPNS/Pengawas Perikanan	-		
		Pokmaswas	14	10	4
6	Bone	PPNS/Pengawas Perikanan	4		
		Pokmaswas	13	13	-
7	Barru	PPNS/Pengawas Perikanan	1		
		Pokmaswas	10	7	3
8	Luwu Utara	PPNS/Pengawas Perikanan	-		
		Pokmaswas	13	13	-
9	Sinjai	PPNS/Pengawas Perikanan	4		
		Pokmaswas	11	11	-
10	Pangkep	PPNS/Pengawas Perikanan	4		
		Pokmaswas	42	16	26
11	Palopo	PPNS/Pengawas Perikanan	5		
		Pokmaswas	7	5	2
12	Selayar	PPNS/Pengawas Perikanan	7		
		Pokmaswas	7	4	3
13	Pinrang	PPNS/Pengawas Perikanan	2		
		Pokmaswas	11	10	1
14	Luwu	PPNS/Pengawas Perikanan	-		
		Pokmaswas	8	3	5
15	Jeneponto	PPNS/Pengawas Perikanan	4		
		Pokmaswas	10	1	9
16	Maros	PPNS/Pengawas Perikanan	-		
		Pokmaswas	4	4	-
17	Bantaeng	PPNS/Pengawas Perikanan	-		
		Pokmaswas	12	11	1
18	Gowa	PPNS/Pengawas Perikanan	-		
		Pokmaswas	3	3	-
19	Sidrap	PPNS/Pengawas Perikanan	-		
		Pokmaswas	1	1	-
20	Pare-pare	PPNS/Pengawas Perikanan	3		
		Pokmaswas	2	2	-
21	Enrekang	PPNS/Pengawas Perikanan	-		
		Pokmaswas	12	4	8

Sumber : Seksi Pengembangan SDM Pengawasan Kelautan dan Perikanan

APBN

1. Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan telah dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Luwu Timur dan Palopo. Adapun hasil pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pemanfaatan SDK sebagai berikut:

1) Kabupaten Bulukumba

Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 di PPI Bonto Bahari Kelurahan Sapolohé Kecamatan Bonto Bahari dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba yang membidangi pengawasan SDKP, tokoh masyarakat, nelayan dan pengumpul ikan. Berdasarkan hasil diskusi, data dan informasi yang diperoleh pada saat kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba aktif melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan SDKP baik dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pos PSDKP Bulukumba dengan bentuk gelar operasi yang melibatkan PPNS ,pengawas perikanan, Polair dan TNI AL di beberapa wilayah rawan *destructive fishing*. Kegiatan operasi pengawasan SDKP terpadu secara signifikan telah menekan dan mengurangi kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing* di wilayah tersebut.
- Nurdin Patta, Ketua Pokmaswas Batu Mesu menyampaikan bahwa alih fungsi kawasan mangrove menjadi lahan tambak menyebabkan abrasi pantai dan pencemaran perairan akibat penggunaan bahan kimia pada lahan tambak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan DKP Kabupaten Bulukumba menyampaikan bahwa telah dibentuk tim investigasi yang terdiri dari unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba guna menindaklanjuti dugaan pencemaran perairan yang diakibatkan penggunaan bahan kimia pada lahan tambak.
- Peserta menyampaikan bahwa di wilayahnya masih marak terjadi perambahan mangrove dan pemboman ikan yang menyebabkan kerusakan terumbu karang, namun masyarakat belum memiliki data akurat kerusakan mangrove dan terumbu

karang sehingga diminta instansi terkait melakukan monitoring dan inventarisasi data mangrove dan terumbu karang. Pada kesempatan ini juga, diusulkan agar instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi guna mencegah meluasnya kerusakan sumber daya kelautan.

- Data sebaran dan kondisi objek pengawasan pemanfaatan SDK (ekosistem mangrove) di Kabupaten Bulukumba :

Kecamatan	Desa	Luas Lahan Mangrove (Ha)	Kondisi Rusak (Ha)	Kondisi Sedang (Ha)	Kondisi Baik (Ha)
Ujung Bulu	Danuang	20	16,5	-	-
	Manjalling	6	-	6	-
Jumlah		26,0	16,5	6	-

2) Kabupaten Sinjai

Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan di Kabupaten Sinjai dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 di Aula Pertemuan PPI Lappa Balang Nipa. Kegiatan ini diikuti 40 orang peserta yang terdiri dari pejabat dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yang membidangi pengawasan SDKP, pelaku usaha perikanan, aparat desa/kelurahan, Polsus PWP3K, tokoh adat/tokoh masyarakat dan pengurus Pokmaswas. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut :

- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai berkomitmen akan tetap mendukung kebijakan pemberdayaan nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas di wilayah pesisir dan pulau Sembilan.
- Pengurus Pokmaswas dan nelayan menyampaikan bahwa sampai saat ini pelanggaran penggunaan handak, bus dan alat tangkap terlarang (cantrang) masih marak terjadi di hampir seluruh area perairan Pulau Sembilan dan perairan perbatasan Patongko Sinjai dengan Bulukumba.
- Peserta berharap agar laporan kejadian pelanggaran pemanfaatan SDK yang disampaikan masyarakat kepada aparat perikanan provinsi agar tidak sekedar diterima dan dicatat, namun segera ditindaklanjuti dan melakukan penegakan hukum, serta patroli pengawasan SDKP.

➤ Data status/kondisi mangrove di Kabupaten Sinjai

Kecamatan	Desa	Luas Lahan Mangrove (Ha)	Kondisi Rusak (Ha)	Kondisi Sedang (Ha)	Kondisi Baik (Ha)
Sinjai Timur	Tongke	325	-	-	325
	Tongke				
	Samataring	275,5	-	-	275,5
Sinjai Utara	Panaikang	95,5	-	-	95,5
	Lappa	280	-	-	280
Jumlah		976	-	-	976

3). Kabupaten Luwu Timur

- Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 di Aula Pertemuan Desa Lumbewe Kecamatan Burau.
- Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari pelaku usaha perikanan, pengurus/anggota Pokmaswas, tokoh masyarakat dan pejabat/staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang membidangi pengawasan SDKP.
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur berkomitmen bahwa akan tetap mendukung peran pengawasan sumber daya kelautan melalui kebijakan pemberdayaan nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas di wilayah pesisir, serta tetap konsisten memerangi destructive fishing.
- Peserta dari kalangan pelaku usaha perikanan berharap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur mengambil kebijakan agar pemerintah daerah terlibat dalam pelestarian ekosistem perairan, paling tidak mengupayakan hadirnya kawasan konservasi laut daerah dengan cara melibatkan perguruan tinggi dan LSM.
- Permasalahan yang ditemui masyarakat adalah ketika ditemukan pelanggaran (destructive fishing dan illegal fishing) merasa bingung hendak menyampaikan laporan kepada aparat yang mana, mengingat aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur tidak lagi berwenang menerima dan mengambil tindakan hukum, sementara kantor aparat hukum lainnya (Polisi) sangat jauh dan kerap kali tidak menanggapi laporan aduan masyarakat.

- Data status/kondisi mangrove di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Desa	Luas Lahan Mangrove (Ha)	Kondisi Rusak (Ha)	Kondisi Sedang (Ha)	Kondisi Baik (Ha)
Wotu	Balo Balo	25	-	-	25
	Bawalipu	10	-	-	10
Angkona	Tampinna	20	-	-	20
Burau	Magonta	25	-	-	25
Jumlah		80	-	-	80

4. Kota Palopo

- Sosialisasi kesadaran pemanfaatan sumber daya kelautan di Kota Palopo dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 di Aula Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo.
- Sosialisasi kesadaran pemanfaatan sumber daya kelautan di Kota Palopo diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari unsur pelaku usaha perikanan, pengurus/anggota Pokmaswas, tokoh masyarakat dan pejabat/staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo yang membidangi pengawasan SDKP.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo selama ini telah memberi dukungan terhadap pembinaan nelayan, khususnya terkait pemanfaatan ekosistem wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perairan, serta konsisten untuk melaksanakan pengawasan SDKP guna mencegah destructive fishing.
- Tokoh masyarakat berharap pemerintah kota memperhatikan upaya pelestarian ekosistem perairan, khususnya terumbu karang dengan melibatkan perguruan tinggi dan stakeholder lainnya.
- Menurut Yusuf, Pengurus Pokmaswas menyampaikan bahwa masyarakat aktif menanam mangrove tetapi belum menggunakan bibit yang tepat sehingga daya tumbuhnya minim bahkan ada yang gagal.

2. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan

- I. Kegiatan Temu Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nasional Tahun 2016 telah dilaksanakan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 26 s/d 29 April 2016. Hasil pertemuan pada kegiatan ini, yaitu :
 - a. Arah kebijakan Ditjen PSDKP adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan SDKP guna menegakkan perundang-undangan

bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola SDKP secara berkelanjutan.

- b. Strategi dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan :
- c. Akibat dari pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengawasan SDKP sampai 12 mil laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

II. Pembinaan POKMASWAS telah dilaksanakan di Takalar, Jeneponto, Pinrang, Palopo, Bulukumba, Luwu, Sinjai, Pare Pare, Wajo, Bone, Luwu Utara dan Bantaeng. Pembinaan POKMASWAS dilakukan pada 17 POKMASWAS yang aktif dalam pengawasan SDKP di kabupaten/kota, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggota POKMASWAS dalam pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan tatacara pelaksanaan SISWASMAS. Memberikan motivasi anggota POKMASWAS agar lebih berinisiatif dalam membantu pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta memotivasi untuk memperkuat kelembagaan POKMASWAS.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi POKMASWAS sebagai berikut:

- 1) Minimnya pemahaman anggota terhadap tugas POKMASWAS, petunjuk teknis pelaksanaan SISWASMAS, pemahaman objek pengawasan POKMASWAS.
- 2) Terbatasnya kemampuan POKMASWAS mendekati/memantau pelaku handak yang terjadi pada menjelang malam hari atau pagi hari.
- 3) Kurangnya kemampuan POKMASWAS melakukan penulisan dan penyampaian laporan kejadian kepada aparat dan/atau pejabat pembina di DKP kabupaten/kota.
- 4) Masih maraknya praktek penggunaan handak yang kedengaran sampai di pantai.
- 5) Minimnya kesadaran masyarakat sekitar dalam pemanfaatan sumberdaya secara lestari dan bertanggung jawab.

III. POKMASWAS aktif yang diberikan bantuan berupa handphone android berjumlah 16 kelompok, yaitu :

- a. POKMASWAS Intel Bahari Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
- b. POKMASWAS Pattiro Sompe Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.
- c. POKMASWAS Adapi Nagau Desa Panikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
- d. POKMASWAS General Desa Pantai Bahari Kabupaten Jeneponto.
- e. POKMASWAS Bilongka Desa Buntu Ma'tabing Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.
- f. POKMASWAS La'Balasse Desa Lumpue Kecamatan Batucukiki Kota Pare Pare.
- g. POKMASWAS Sipakainge Desa Pantai Timur Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
- h. POKMASWAS Siamasei Kabupaten Pinrang.
- i. POKMASWAS Teluk Bone Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
- j. POKMASWAS Bintang Timur Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- k. POKMASWAS Kuda Laut Desa Munte Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara.
- l. POKMASWAS Harayya Desa Pati Karya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- m. POKMASWAS Patikarya Desa Pati Karya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- n. POKMASWAS Minasa Baji Kecamatan Marusu Baru Kabupaten Maros.

IV. Evaluasi kinerja POKMASWAS

Pelaksanaan evaluasi kinerja POKMASWAS di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan dari bulan Mei s/d Juli 2016. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pemenang hasil Evaluasi Penilaian Tahunan Kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 yang terdiri Bidang Sumber Daya Perikanan (Juara I, Juara II dan Juara III) dan Bidang Pelestarian Sumber Daya Perairan (Juara I, Juara II dan Juara III)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1752/VIII/Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemenang Hasil Evaluasi Penilaian Tahunan Kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.

- b. Apresiasi pemenang Evaluasi Penilaian Tahunan Kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 berupa 1 (satu) unit kamera untuk masing-masing pemenang.
- c. Pemenang Evaluasi Penilaian Tahunan Kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, yaitu :

➤ **Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Bidang Sumber Daya Perikanan**

Juara	Nama POKMASWAS	Alamat	Nama Ketua	Nilai
I	Batu Mesu	Kel. Sapolohe Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Nurdin Pattah	94%
II	Balang Datu	Pulau Tanah Keke Desa Balang Datu Kec. Mapakasunggu Kab. Takalar	Abdul Malik Dg. Ngewa	81%
III	Komando	Pulau Bontosua Desa Mattirobone Kec. Liukang Tupabbiring Utara Kab. Pangkep	Ridwan Wandu	80%

➤ **Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Bidang Pelestarian Sumber Daya Perairan**

Juara	Nama POKMASWAS	Alamat	Nama Ketua	Nilai
I	Mattiro Deceng	Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone	Suardi	95%
II	La' Balesse	Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Kota Pare Pare	Ahmad Yani	86%
III	Bilongka	Desa Buntu Ma'tabing Kec. Larompong Kab. Luwu	Abd. Rahman	80%

3. Peningkatan Operasional Pemantauan Pengawasan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

- Tujuan dilaksanakan kegiatan peningkatan Operasional Pemantauan Pengawasan SDKP dan pengembangan Infrastruktur Pengawasan yaitu :
 - a. Peningkatan pemenuhan sistem pemantauan SDKP yang terintegrasi dan akuntabel.
 - b. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang dapat dipantau.

c. Peningkatan pemenuhan infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu.

■ Operasional pemantauan pemanfaatan SDK telah dilaksanakan di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkep. Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut :

1) **Pemantauan Pariwisata Alam Perairan**

Taman wisata perairan Kapoposang terletak di pulau terluar dari kawasan Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkep. Pulau Kapoposang memiliki luas rata-rata terumbu karang ± 995,6 Ha merupakan yang terluas diantara fringing reef lainnya. Sebaran terumbu karang memanjang ke arah barat dari kedalaman 1 – 45 meter dengan perairan yang sangat jernih. Rataan terumbu yang lebih dalam sekitar 4 – 8 meter berbatasan dengan tubir terumbu dan dinding terumbu (drop off). Lokasi drop off ini sangat menarik untuk sebagai lokasi wisata penyelaman. Ikan-ikan indikator *Chaetodontidae* menjadi pemandangan yang menarik sepanjang drop off sisi utara dan barat.

2) **Pemantauan Kegiatan Budidaya**

Sebagian besar masyarakat Pulau Kapoposang bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan nelayan yang paling dominan adalah nelayan Pang'es dan nelayan penangkap ikan sunu hidup. Di Pulau Kapoposang juga terdapat usaha budidaya Lobster yang menggunakan teknik budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) dengan jenis Lobster yang dibudidayakan adalah Mutiara.

■ Operasional pemantauan pemanfaatan SDP telah dilaksanakan kabupaten Takalar dan Jeneponto. Pemantauan pemanfaatan SDP telah dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten, yaitu Takalar dan Jeneponto. Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut :

■ **Kabupaten Takalar**

Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi pengolahan Rajungan di Perusahaan Arfah Dg. Nai yang beralamat di Desa Kalongkon Kecamatan Bontosunggu. Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak tahun 2005 dan memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Pengolahan Rajungan ini memproduksi 200 kg/hari dengan jumlah karyawan 30 orang yang dipasarkan di kawasan KIMA Makassar. Selain pengolahan Rajungan, di Kabupaten

Takalar juga terdapat perusahaan pengolahan Rumput Laut yaitu CV. Persada Semesta yang beralamat di Jalan Hasanuddin Takalar dan memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Perusahaan tersebut berproduksi rata-rata 20 ton dengan jumlah karyawan 10 orang. Usaha budidaya udang yang terdapat di Kabupaten Takalar, salah satunya adalah CV. Bahari yang beralamat di Dusun Mapaka Lompo Desa Kawari Kecamatan Galesong Selatan. Perusahaan tersebut memiliki dokumen perizinan yang lengkap dan berdiri sejak tahun 2013 dengan jenis produksi yaitu benur *vannamae*. Produksi benur *Vannamae* 20 – 30 juta per bulan dan jumlah karyawan 25 orang.

■ Kabupaten Jeneponto

Usaha pengolahan Rumput Laut skala rumput di Kabupaten Jeneponto terdapat di Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala. Selain itu terdapat juga usaha budidaya tambak seluas 2 Ha yang masih aktif.

Pencapaian Prestasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan SDM Pengawas Perikanan, PPNS dan Masyarakat Pengawas oleh Seksi Pengembangan SDM Pengawasan Kelautan dan Perikanan.

Pencapaian prestasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Peningkatan SDM Pengawas, PPNS dan Masyarakat Pengawas Tahun 2016 oleh Seksi Pengembangan SDM Pengawasan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat sebanyak 243 kelompok yang tersebar di wilayah pesisir kab/kota Sulsel.
- 2) Meningkatnya kompetensi dan kinerja SDM masyarakat pengawas tahun 2016 melalui pembinaan Pokmaswas dengan capaian realisasi sebanyak 150 Pokmaswas aktif (100%) yang telah memiliki kemampuan berperan aktif membantu pengawasan sumber SDKP, dan secara kelembagaan telah menjadi kelaster kekuatan sosial yang dapat menetralsisir pengaruh serta ruang gerak pelaku *desctructive fishing* di wilayah pesisir kab/kota.
- 3) Meningkatnya ilmu pengetahuan (bidang teknis dan hukum), kesadaran, ketaatan, dan partisipasi aktif SDM anggota Pokmaswas secara kolektif di

kabupaten/kota sebagai sebuah kekuatan sosial dalam mengkapanyekan peran pengawasan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan terhadap masyarakat pelaku usaha lainnya.

- 4) Terwujudnya pelaksanaan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat berdasarkan Kepmen KP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tatacara pelaksanaan Siswasmas di seluruh wilayah pesisir dan pulau kecil kab/kota.
- 5) Terbangunnya sebuah mekanisme pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan peran serta masyarakat (Pokmaswas) yang bekerjasama masyarakat pelaku usaha, aparat perikanan dan pemerintah daerah kab/kota.
- 6) Meningkatnya kemampuan kinerja dan penguatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas sebanyak 3 lokasi kab/kota meliputi Pokmaswas Kab Bone, Wajo dan Takalar.
- 7) Meningkatnya kelas kemampuan kelembagaan Pokmaswas bidang pengawasan sumber daya perikanan sebagai prestasi kinerja Pokmaswas tingkat provinsi Sulsel tahun 2016 sebagai berikut :
 - Pokmaswas Batu Mesu (Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba) dengan predikat juara I;
 - Pokmaswas Balang Datu (Pulau Tana Keke, Desa Balang Datu, Kecamatan Mapakasunggu, Kabupaten Takalar) dengan predikat juara II;
 - Pokmaswas Komando (Pulau Bontosua, Desa Mattirobone, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kab. Pangkep) dengan predikat juara III.
- 8) Meningkatnya kelas kemampuan Pokmaswas bidang pengawasan pelestarian sumber daya perairan sebagai prestasi kinerja Pokmaswas tingkat provinsi Sulsel tahun 2016 sebagai berikut :
 - Pokmaswas Mattiro Deceng (Desa Kajua Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.) dengan predikat juara I;
 - Pokmaswas La'BalsessE (Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare) dengan predikat sebagai juara II;
 - Pokmaswas Bilongka (Desa Buntu Ma'tabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu) dengan predikat juara III.

- 9) Terbentuknya asosiasi atau forum komunikasi aparat PPNS/pengawas perikanan kab/kota dan provinsi sebagai wadah kerjasama pengawasan dan penegakan hukum secara informal dalam lingkup Sulsel.
- 10) Meningkatnya dan meluasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pengguna jasa (nelayan, pembudidaya, pengolah) secara kolektif dalam peran pengawasan dan pemanfaatan SDKP melalui kelembagaan Pokmaswas binaan di seluruh wilayah pesisir kab/kota Sulsel.

Bentuk Dukungan Yang Diperlukan Terhadap Bidang Pengawasan Oleh Seksi Pengembangan SDM Pengawasan Kelautan dan Perikanan dilapangan.

1. Masyarakat (POKMASWAS).

- Masyarakat diharapkan dapat memiliki kemampuan SDM, memahami hakekat Pokmaswas, kesadarannya dapat berpartisipasi membantu melaksanakan pengawasan SDKP secara aktif dan sukarela tanpa adanya tuntutan insentif/imbilan.
- Masyarakat diharapkan dapat memahami prinsip dasar Pokmaswas yaitu dari masyarakat - oleh masyarakat - dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat menyadari adanya kepentingan bersama pelaksanaan tugas Pokmaswas.
- Masyarakat diharapkan mampu menerapkan pelaksanaan system pengawasan sumber daya ikan yang melibatkan peranserta masyarakat (Pokmaswas) berdasarkan Juknis Pokmaswas (Kepmen KP No. 58 Tahun 2001).
- Masyarakat diharapkan mampu mewujudkan terlaksananya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha berdasarkan Juknis Pokmaswas (Kepmen KP No. 58 Tahun 2001).
- Masyarakat melalui kelembagaan Pokmaswas diharapkan memiliki kemampuan teknis, sosial dan manajemen Pokmaswas dalam memperkuat kelembagaan pengawasan di daerah kab/kota.
- Masyarakat diharapkan dapat memahami dan melaksanakan tugas Pokmaswas berdasarkan juknis yang direkomendasikan dalam Kepmen KP No 58 / 2001 tentang tatacara pelaksanaan Pokmaswas.

- Masyarakat diharapkan mampu merwujudkan partisipasi secara kolektif melalui kelembagaan Pokmaswas dalam membantu pengawasan SDKP di daerah.
- Masyarakat diharapkan dapat menjalin informasi dan komunikasi antar aparat dan pemerintah melalui Pokmaswas binaan secara aktif .

2. Pengawas Perikanan

- Perlu segera dikeluarkan surat keputusan pengangkatan dan penetapan aparat pengawas perikanan oleh Gubernur Sulsel yang akan melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam lingkup kewenangan provinsi Sulsel (sejauh 0 - 12 mil laut).
- Guna meningkatkan kemampuan teknis operasional pengawas perikanan, maka perlu dukungan alokasi anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimtek, temu teknis, temu koordinasi dan monitoring evaluasi bagi pengawas perikanan lingkup provinsi Sulsel setiap tahunnya.
- Perlu pengadaan atau rekrutmen (pengangkatan /penetapan) pengawas perikanan yang dilaksanakan melaluidiklat pengawasan perikanan yang anggarannya bersumber dari APBD Kinerja DKP Sulsel.

3. PPNS Perikanan

- Perlu melakukan pengadaan / penambahan SDM aparat PPNS Perikanan, yang memiliki legalitas kewenangan SKEP PPNS dari Kemenkum dan HAM RI hingga minimal 4 orang dalam SKPD.
- Perlu diprogramkan kegiatan peningkatan kemampuan fungsi bagi PPNS Perikanan dalam penanganan perkaratindak pidana perikanan melalui kegiatan pelatihan kerja teknis (Latja/Latnis PPNS), coaching clinic PPNS, temu teknis, temu kooordinasi, monitoring dan evaluasi bagi PPNS Perikanan lingkup prov Sulsel.
- PPNS Perikanan Sulsel perlu memiliki kesepahaman teknis dan keseragaman pola tindak dalam penanganan tindak pidana perikanan secara tepat, cepat dan akuntabel

Permasalahan Pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengawas, PPNS dan Masyarakat Pengawas, oleh Seksi Pengembangan SDM Pengawasan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016.

1. Pengawas Perikanan

- a) Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di kab/kota berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 belum dapat dioptimalkan, akibat minimnya jumlah dan kualitas SDM Pengawas Perikanan. Hingga tahun 2016 DKP Prov Sulsel aparatur Pengawas Perikanan hanya terdapat sebanyak 4 orang.
- b) Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, belum dapat dilaksanakan lantaran Peraturan Gubernur sebagai payung hukum atau rujukan pelaksanaannya belum terbit sampai sekarang.
- c) Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap objek Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kab/kota belum dapat dioptimalkan akibat terbatasnya jumlah dan kualitas Pengawas Perikanan. Objek pengawasan SDK yang sementara ini telah dapat tersentuh baru sebatas pengawasan penggunaan alat tangkap merusak (handak dan bius) atau *destructive fishing*, pengawasan ekosistem perairan (mangrove, terumbu karang) dan kawasan konservasi perairan. Sementara objek pengawasan SDP yang baru dapat dilaksanakan adalah pengawasan operasional kapal perikanan.

2. PPNS Perikanan

- a) Minimnya kualitas dan kuantitas SDM PPNS Perikanan. Idealnya jumlah SDM PPNS Perikanan yang siap pakai minimal 4 orang, telah memiliki SKEP PPNS dari Kemenkum dan HAM, berada dibawah bidang teknis (kelautan dan perikanan) serta menguasai program pengetikan komputer.
- b) Kurangnya kemampuan teknis dan juridis PPNS Perikanan dalam melaksanakan analisa kasus, pelaksanaan penyidikan perkaratindak pidana perikanan termasuk pemenuhan aspek formil dan materil berdasarkan juknis penyidikan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pengawasan SDKP KKP-RI.

- c) Minimnya kesepahaman teknis dan keseragaman pola tindak PPNS perikanan dalam penanganan tindak pidana perikanan secara cepat, tepat waktu dan akuntabel.
- d) Minimnya fungsi koordinasi dan kerjasama penegakan hukum dengan instansi teknis terkait (satuan Polair, TNI-AL& DKP Kab/Kota/Prov Sulsel).
- e) Minimnya kemampuan PPNS Perikanan dalam menguarai pemenuhan unsur-unsur pasal pidana berdasarkan Pasal yang dipersangkakan penyidik.
- f) Lemahnya fungsi koordinasi dan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan aparat/instansi penegak hukum di daerah kab/kota.

3. POKMASWAS

- a) Tingkat keaktifan Pokmaswas, semangat kerja dan partisipasi anggota kelompok dalam membantu pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat di kab/kota masih minim dan hal ini sangat bergantung terhadap frekuensi kunjungan pembinaan Pokmaswas sehingga membutuhkan kontinuitas pembinaan secara berkelanjutan ssetiap tahunnya.
- b) Tingkat kemampuan teknis, sosial dan manajemen anggota Pokmaswas dalam pelaksanaan tugas Pokmaswas di daerah masih minim.
- c) Pokmaswas dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan belum sepenuhnya dapat menyadari hakekat prinsip dasar Pokmaswas yaitu dari masyarakat-oleh masyarakat-dan untuk masyarakat, sehingga terkadang masih ada masyarakat meminta jasa dari pemerintah
- d) Pokmaswas belum sepenuhnya dapat memahami dan melaksanakan tugas Pokmaswas berdasarkan juknis Pokmaswas yang direkomendasikan dalam Kepmen KP No 58 Tahun 2001.
- e) Maraknya penggunaan handak dan bius pada wilayah perairan kepulauan yang tidak berpenghuni.

Upayah Pemecahan Masalah-

1. Pengawas Perikanan

- a) Pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah telah dikerjasamakan dengan pengawas perikanan UPT Ditjen Pengawasan SDKP yang berada di Pos PSDKP kab/kota.
- b) Pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan secara terpadu dengan instansi teknis terkait termasuk satuan kepolisian perairan kab/kota sampai sekarang.
- c) Untuk kepentingan pengadaan SDMPengawas Perikanan telah dilakukan usulan calon aparat Pengawas Perikanan untuk mengikuti Diklat Pengawas Perikanan dimaksud melalui APBD Kinerja Prov SulselTA 2016

2. PPNS Perikanan

- a) Mengusulkan pengadaan penambahan aparat PPNS Perikanan melalui Diklat PPNS Perikanan setiap tahunnya melalui APBD Kinerja Prov Sulsel.
- b) Meningkatkan kemampuan teknis PPNS Perikanan dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan melalui pelatihan dan coaching clinic PPNS.
- c) Meningkatkan kesepahaman teknis dan keseragaman pola tindak PPNS perikanan dalam penanganan tindak pidana perikanan secara cepat, tepat waktu dan akuntabel melalui pertemuan teknis dan koordinasi penyidikan.
- d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum dengan instansi teknis terkait (satuan Polair, TNI-AL & DKP Kab/Kota/Prov Sulsel).

3. POKMASWAS

- a) Meningkatkan motivasi, kesadaran dan partisipasi aktif Pokmaswas melalui kunjungan pembinaan Pokmaswas di daerah kab/kota.
- b) Meningkatkan kemampuan, teknis, sosial dan manajemen Pokmaswas dalam membantu pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat di daerah kab/kota melalui kerjasama pembinaan Pokmaswas dengan pejabat DKP Kab/Kota.

- c) Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat di daerah melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis, pertemuan koordinasi, peningkatan kapasitas Pokmaswas, sosialisasi Siswasmas, dan pertemuan evaluasi Pokmaswas.
- d) Meningkatkan sosialisasi Siswasmas, bimbingan dan pembinaan SDM dan kelembagaan Pokmaswas aktif di daerah kab/kota.
- e) Mengajukan usulan permintaan dukungan penambahan anggaran biaya pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Pokmaswas.

4.4.4. Bina Usaha dan Kelembagaan

Ada 3 (tiga) kegiatan pokok yang terdapat dalam program Bina Usaha dan Kelembagaan :

a. Seksi Pembinaan Usaha

APBD

NO	Kegiatan	Kinerja			Keterangan
		Input	Output	Outcome	
1	Bimtek Pengelolaan Kerjasama dan Promosi Usaha Perikanan	Rp. 74.070.000 (3 angkatan)	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Kerjasama dan Promosi Usaha Perikanan	Bertambahnya pengetahuan UMKM/keompok pengolah bagaimana mengelola suatu usaha dengan baik dan bekerjasama dengan pihak lain sehingga usahanya dapat tetap eksis dan berkembang	Peserta UMKM/keompok sector kelautan dan perikanan sebanyak 120 orang. Tempat : 1. Kab. Pangkep 2. Kab. Bone 3. Kab. Pinrang
2	Bimtek Perizinan Usaha Perikanan	Rp. 77.565.000	Terlaksananya Bimtek Perizinan Usaha Perikanan	Meningkatnya pemahaman aparat dan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan perikanan yang baru serta terjaganya kelestarian sumberdaya ikan	Peserta sebanyak 120 orang. Tempat : 4. Kab. Sinjai 5. Kota Pare - Pare 6. Kab. Bone
3	Pameran Indonesia Marine and Fisheries SME Expo	Rp. 32.275.000	Terlaksananya Pameran Indonesia Marine and Fisheries SME Expo	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di Sulawesi Selatan serta investasi di bidang Kelautan dan Perikanan Terpromosinya produk khas daerah oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 	Tempat pelaksanaan Kota Semarang Jawa Tengah

NO	Kegiatan	Kinerja			Keterangan
		Input	Output	Outcome	
4	Pameran Indonesia Marine and Fisheries Expo	Rp. 37.975.000	Terlaksananya Pameran Indonesia Marine and Fisheries Expo	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di Sulawesi Selatan serta investasi dibidang Kelautan dan Perikanan Terpromosinya produk khas daerah oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 	Tempat pelaksanaan Provinsi Jogjakarta
5	Pameran Gelar Kerajinan Nasional Daerah dan Produk Ekonomi Kreatif Nusantara	Rp. 22.700.000	Pameran Gelar Kerajinan Nasional Daerah dan Produk Ekonomi Kreatif Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> Terpromosinya produk-produk khas daerah yang dihasilkan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 	Tempat Pelaksanaan Kota Makassar
6	Pameran Pembangunan	Rp. 50.525.000	Pameran Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Terinformasinya program-program pembangunan Kelautan dan Perikanan Prov. SulSel baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di Sulawesi Selatan serta investasi dibidang kelautan dan perikanan 	Tempat pelaksanaan Center Point Makassar
7	Pameran Pekan Raya SulSel	Rp. 28.270.000	Terlaksananya Pameran Pekan Raya SulSel	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di Sulawesi Selatan serta investasi dibidang kelautan dan perikanan Terpromosinya produk khas daerah oleh UKM 	Tempat Pelaksanaan Celebes Convention Center (CCC) Makassar

NO	Kegiatan	Kinerja			Keterangan
		Input	Output	Outcome	
8	Pameran Hari Nusantra Tingkat Nasional	Rp. 66.500.000	Terlaksananya Pameran Hari Nusantra Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di Sulawesi Selatan serta investasi dibidang kelautan dan perikanan 	Tempat pelaksanaan : Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur
9	Pameran Hari Nusantra Tingkat Provinsi	Rp. 23.200.000	Terlaksananya Pameran Hari Nusantra Tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya promosi dan pemasaran produk olahan perikanan 	Tempat pelaksanaan : Hotel Santika Makassar

APBN

NO	Kegiatan	Kinerja			Keterangan
		Input	Output	Outcome	
1	Pertemuan Verifikasi Unit Pengolahan Produk Perikanan Non Konsumsi (UPPN)	Rp. 45.000.000	Terlaksananya Pertemuan Verifikasi Unit Pengolahan Produk Perikanan Non Konsumsi (UPPN)	<ul style="list-style-type: none"> Terdatanya jumlah Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Non Konsumsi yang akan diregistrasi untuk penerapan Standar Mutu Olahan Produk yang dihasilkan bermutu 	Peserta : UMKM sector Kelautan dan Perikanan dan petugas dinas Kab/kota sebanyak 30 orang Tempat : Kota Makassar
2	Pertemuan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan registrasi usaha hasil perikanan 2 angkatan	Rp. 54.778.000	Terlaksananya Pertemuan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan registrasi usaha hasil perikanan 2 angkatan	<ul style="list-style-type: none"> Teregistrasinya beberapa Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan di Sulawesi Selatan 	Tempat Pelaksanaan : Kota Makassar (Pertemuan 2 angkatan sebanyak 60 orang)
3	Workshop Diversifikasi produk non bioteknologi kelautan	Rp. 48.050.000	Terlaksananya Workshop Diversifikasi produk non bioteknologi kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemahaman petugas dan pelaku usaha mengenai produk non bioteknologi yang akan diregistrasi 	Tempat Pelaksanaan : Kota Makassar Jumlah peserta sebanyak 30 orang
4	FGD Analisis kebutuhan pemanfaatan Saprak Produk Kelautan	Rp. 74.940.000	Terlaksananya FGD Analisis kebutuhan pemanfaatan Saprak Produk Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Teranalisisnya data kebutuhan sarana dan prasarana produk kelautan di daerah Pemanfaatan sarana dan prasarana produk kelautan secara optimal 	Tempat Pelaksanaan : Kota Makassar Jumlah peserta sebanyak 30 orang
5	Lomba Inovasi Menu Masakan Berbahan Baku Ikan Tingkat Provinsi	Rp. 51.878.000	Terlaksananya Lomba Inovasi Menu Masakan Berbahan Baku Ikan Tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya menu masakan hasil laut Terfasilitasinya upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis inovasi masakan/kuliner hasil laut 	Tempat Pelaksanaan : Kota Makassar Jumlah peserta sebanyak 50 orang

NO	Kegiatan	Kinerja			Keterangan
		Input	Output	Outcome	
6	Lomba Inovasi Menu Masakan Berbahan Baku Ikan Tingkat Nasional	Rp. 19.300.000	Terlaksananya Lomba Inovasi Menu Masakan Berbahan Baku Ikan Tingkat Nasional	• Terpromosinya kekayaan masakan hasil laut nusantara kepada masyarakat luas	Tempat : Jakarta
7	Pameran Hasil Kelautan dan Perikanan Luar Negeri	Rp. 58.000.000	Terlaksananya Pameran Hasil Kelautan dan Perikanan Luar Negeri	• Terpromosinya produk hasil kelautan dan perikanan yang diproduksi oleh UKM Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan pada Malaysia Internasional Food and Beverages Trade Fair (MIFB)	Tempat : Negara Malaysia

Dari hasil pembinaan yang telah dilakukan ke UMKM sector Kelautan dan Perikanan, ada beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya adalah :

1. Pemasaran

Pasar adalah merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM sector Kelautan dan Perikanan, ada beberapa UMKM yang memproduksi kalau ada pesanan, ada yang menitipkan di warung/toko dimana pembayaran setelah barang laku terjual sehingga memproduksi kadang-kadang sekali dalam dua minggu, namun ada juga beberapa UMKM yang sudah berkembang dan pemasaran lancar seperti :

- ❑ Azzahra, produk olahannya abon ikan, otak-otak ikan di kota Makassar
- ❑ Eltisyah, produk olahannya bakso sea food dikota Makassar
- ❑ Ilo Mandiri, produk olahannya abon ikan dikota Makassar
- ❑ Marijo, produk olahannya bandeng tanpa duri, tik-tik tulang ikan dikab. Pinrang
- ❑ Cakalang Mas, produk olahannya teri guri dikota Palopo
- ❑ Ajjulukana, produk olahannya bakso ikan tenggiri, kerupuk rumput laut. Tahun 2016 ada tambahan produk yaitu Nugget
- ❑ Marala Food, produk olahannya bakso, nugget, otak-otak goreng dan bakar, dragon ball ikan dikabupaten Pinrang
- ❑ Mappayukki, produk olahannya bakso ikan tenggiri, kerupuk pangsit di Kabupaten Bone
- ❑ Bulu Assapae, produk olahannya ikan bandeng tanpa duri di Kabupaten Pinrang

2. Permodalan

Modal juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM sector Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan usahanya namun bukan menjadi kendala utama, dimana awalnya mereka dapat memproduksi dengan modal sendiri. Kelompok/UMKM sudah ada yang dapat mengakses permodalan baik lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan namun jumlahnya masih sangat terbatas, hal tersebut sesuai dengan jumlah produksinya.

3. Teknologi

Teknologi pengolahan yang dilakukan pada umumnya masih menggunakan teknologi sederhana atau alat-alat produksi yang sifatnya manual, sehingga mempengaruhi kualitas produksinya, namun ada juga beberapa UMKM yang sudah menggunakan mesin. Teknologi berpengaruh terhadap efisiensi didalam proses produksi kualitas produksi yang dihasilkan.

4. Manajemen Usaha

Manajemen usaha UMKM sector Kelautan dan Perikanan masih lemah, pada umumnya belum mempunyai administrasi seperti buku produksi, buku penjualan, dimana keuangan belum dipisahkan antara modal usaha dengan belanja sehari-hari.

Pemecahan Masalah :

1. Pemasaran

Untuk mengatasi permasalahan pasar yang dihadapi UMKM sector kelautan dan Perikanan, DKP Prov Sulsel melakukan kegiatan pertemuan kemitraan usaha perikanan, pengembangan kewirausahaan kelompok pengolah, dimana kegiatan tersebut dapat memberikan informasi, keterampilan serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan sehingga kelompok/UMKM dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dipasar dan mampu mencari peluang pasar.

2. Permodalan

Sedangkan untuk permodalan, kelompok/UMKM sector Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi kelompok/UMKM dengan sumber permodalan yaitu perbankan dan non perbankan seperti BUMN (Pertamina, PT.Telkom) melalui kegiatan pertemuan.

3. Teknologi

Untuk teknologi pengolahan hasil dan kemasan serta pelabelan, pada umumnya UMKM sudah mengikuti pelatihan baik yang dilakukan oleh Kab/Kota maupun yang dilaksanakan oleh Provinsi.

4. Manajemen Usaha

Manajemen Usaha UMKM sector Kelautan dan Perikanan masih lemah, untuk mengatasi hal tersebut kepada petugas Kab/Kota agar membantu membuat buku administrasi/pencatatan seperti buku produksi, buku penjualan, dll sehingga dapat diketahui perkembangan usahanya.



V. HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

5.1. Ekonomi

5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator makro ekonomi untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut selama kurun waktu 2012 - 2016 data produksi total perikanan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan rata - rata sebesar 12,2 %. Peningkatan tersebut terjadi akibat peningkatan produksi dari usaha budidaya rumput laut baik yang diusahakan di laut (*Eucheuma spp*) maupun di tambak (*Gracillaria spp*).

5.1.2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 total tercatat sebesar 3.941.648,8 ton. Dibanding dengan hasil yang dicapai tahun 2015 sebesar 3.786.837,2 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 154.811,6 ton atau kenaikan sebesar 4,1 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 23. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2016

No.	Sumber Daya	Tahun		%
		2015	2016	
1	Penangkapan (Ton)	310.290,4	312.380,8	0.7
	a. Laut	295.239,2	297.406,3	0.7
	b. Perairan Umum	15.051,2	14.974,5	(0.5)
2	Budidaya (Ton)	3.476.546,8	3.629.268.0	4.4
	a. Tambak	1.052.395,1	1,255,018.6	19.3
	b. Laut	2.409.022,5	2,357,244.7	(2.1)
	c. Kolam	9.307,5	10,501.7	12.8
	d. Sawah	5.350,1	5,991.8	12.0
	e. KJA (Laut)	117,2	130.9	11.7
	f. KJA (Tawar)	351,8	380.3	8.1
	Jumlah (Ton)	3.786.837,2	3.941.648,8	4,1

a. Budidaya

Ada 2 (dua) komoditi utama yang dipacu dalam menunjang ekspor perikanan yaitu udang dan rumput laut, disamping itu komoditi kepiting bakau juga memiliki prospek untuk diekspor.

Udang

Di Sulawesi Selatan ada beberapa jenis udang yang hidup di tambak, tetapi yang dibudidayakan ada 2 (dua) jenis yaitu udang Windu dan Vannamei.

Produksi udang di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 tercatat sebesar 41.686 ton yang terdiri dari udang windu 14.776,7 ton, udang vannamei 14.834,5 ton, dan udang lainnya 12.074,8 ton, Jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun 2015 sebesar 40.346,8 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 3,3 %.

Produksi udang di Sulawesi Selatan terbanyak terdapat di kabupaten Pinrang sebesar 7.467,2 ton (17,9 %), Kabupaten Takalar sebesar 4.805 ton (11,5 %), Kabupaten Luwu Timur sebesar 4.510,4 ton (10,8 %), Kabupaten Bone sebesar 3.840,5 ton (9,2 %) dan Kabupaten Luwu sebesar 3.812,7 ton (9,1 %).

Rumput Laut

Di Sulawesi Selatan ada 3 (tiga) jenis rumput laut yang diusahakan oleh pembudidaya yaitu jenis *Eucheuma spp*, *Spinosium spp* dan *Gracillaria spp*, jumlah produksi ketiga jenis rumput laut tersebut pada tahun 2016 sebesar 3.409.048,2 ton (basah), yang terdiri dari *Eucheuma spp* sebesar 2.107.953,7 ton basah, *Gracillaria spp* sebesar 1.051.803,5 ton basah dan *Spinosium spp* sebesar 249.291,0 ton basah. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 3.289.907,6 ton basah, maka terjadi peningkatan sebesar 3,6 %.

Produksi rumput laut jenis *Eucheuma spp* di Sulawesi Selatan adalah Luwu, Luwu Utara, wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Luwu Timur dan Kota palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Eucheuma cottonii* terbesar terdapat di kabupaten Takalar sebesar 702.884 ton basah (33,3 %), Kabupaten Luwu sebesar 244.945,5 ton (11,6 %), Kabupaten Wajo sebesar 237.900 ton (11,3 %), Kabupaten Pangkep sebesar 202.552 ton (9,6 %) dan Kabupaten Bulukumba sebesar 158.440 ton (7,5 %).

Daerah produksi *Gracillaria spp* yaitu Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Maros, Pangkep, Luwu Timur, Pinrang dan Kota Palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Gracillaria sp* terbesar terdapat di kabupaten Luwu sebesar 295.637,5 ton (28,1 %), Kabupaten Luwu Timur sebesar 154.869 ton (14,7 %), kabupaten Wajo sebesar 151.726 ton (14,4 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 149.849,6 ton (14,2 %) dan Kabupaten Takalar sebesar 110.473 ton (10,5%).

Daerah produksi *Spinosium spp* yaitu Jeneponto, Selayar, Takalar, Sinjai dan Bantaeng. Produksi Rumput laut untuk jenis *Spinosium spp* terbesar terdapat di kabupaten Takalar sebesar 220.948 ton (88,6 %), Jeneponto sebesar 13.525,7 ton (5,4 %) dan Sinjai sebesar 12.220 ton (4,9 %).

Kepiting Bakau (Scylla serrata)

Adapun komoditi lainnya melalui usaha budidaya yaitu kepiting bakau (*Scylla serrata*). Produksi pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.360,9 ton sedangkan pada tahun 2015 tercatat sebesar 1.306,9 ton atau terjadi kenaikan produksi sebesar 4,1 %.

Selain komoditi udang, rumput laut dan kepiting bakau, ada beberapa komoditi ikan hasil budidaya yang dipacu untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat meliputi ikan bandeng, ikan mas, ikan nila dan ikan lainnya.

Ikan Bandeng (Chanos chanos)

Produksi ikan bandeng dari hasil budidaya pada tahun 2016 tercatat sebesar 155.762,4 ton dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 126.229,1 ton, maka terjadi peningkatan produksi sebesar 29.533,3 ton atau 23,4 %. Penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan terdapat di kabupaten Bone sebesar 59.297,6 ton (38,1%), Kabupaten Wajo sebesar 20.120,3 ton (12,9%), kabupaten Pinrang sebesar 19.601,6 ton (12,6%), kabupaten Pangkep sebesar 12.546 ton (8,1%) dan kabupaten Luwu Timur sebesar 10.235 ton (6,6 %).

Ikan Mas (Cyprinus carpio)

Produksi ikan Mas dari hasil budidaya di kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2016 tercatat sebesar 9.829,5 ton, dibanding dengan tahun 2015 tercatat sebesar 9.291 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 538,5 ton atau 5,8 %. Daerah - daerah yang selama ini andalan produksi ikan Mas yaitu Kabupaten Toraja Utara sebesar 3.337 ton (33,9 %), Kabupaten Pinrang sebesar 1.850,5 ton (18,8 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 869,8 ton (8,8 %), Kabupaten Luwu sebesar 565,4 ton (5,8 %) dan Kabupaten Sidrap sebesar 555,6 ton (5,7 %).

Ikan Nila (Oreochromis niloticus)

Produksi ikan Nila dari hasil budidaya kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2016 tercatat sebesar 5.711,2 ton, dibanding dengan tahun 2015 tercatat sebesar 4.139,8 ton, maka terjadi peningkatan produksi produksi sebesar 1.571,4 ton atau 37,9 %.

Kabupaten penghasil ikan Nila di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pangkep sebesar 1.499,0 ton (26,2 %), Kabupaten Pinrang sebesar 1.419,1 ton (24,8 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 525,9 ton (9,2%), Kabupaten Maros sebesar 405,5 ton (7,1 %) dan Kabupaten Enrekang sebesar 379,9 ton (6,7 %).

b. Penangkapan

Ikan Tuna /Cakalang/Tongkol

Dimaksudkan dengan ikan tuna/cakalang/tongkol adalah ikan-ikan pelagis besar dalam hal ini meliputi : Albakora, Madidihang, Tuna Mata Besar, Setuhuk Loreng, Setuhuk Biru, Setuhuk Hitam, Ikan Layaran, Ikan pedang, Tongkol Komo, Tongkol Krai, Tongkol Abu-Abu, Lisong, Kenyar, Cakalang.

Pada tahun 2016 produksi tangkapan ikan tuna/Cakalang/Tongkol di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 57.273,3 ton, sedangkan pada tahun 2015 tercatat sebesar 60.706,1 ton hal tersebut berarti terjadi penurunan produksi tangkapan ikan tuna/cakalang/tongkol sebesar 3.432,8 ton atau sebesar 5,6 %.

5.1.3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2016 tercatat sebesar 52,5 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2015 tercatat sebesar 49,7 kg/kapita/tahun dengan penduduk Sulawesi Selatan mencapai 8.606.375 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2016 terjadi kenaikan konsumsi perkapita sebesar 5,6 %.

5.1.4. Pemasaran

Komoditi hasil perikanan Sulawesi Selatan dipasarkan tujuan ekspor, antar Provinsi dan lokal. pada tahun 2015 tercatat sebesar 139.602 ton dengan nilai US\$ 244.660.200 dan pada tahun 2016 tercatat sebesar 118.256,3 ton dengan nilai US\$ 210.317.700 atau terjadi penurunan volume sebesar 15,3 % dan penurunan nilai 14 %. Penurunan volume ekspor terhadap hasil perikanan Sulawesi Selatan disebabkan turunnya permintaan ekspor Rumput laut

5.1.5. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya

Tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sangat bervariasi besarnya, dimana sangat ditentukan oleh sumberdaya yang dikelola dan komoditi yang diusahakan.

Tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya ikan di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 tercatat antara Rp. 7.662.719 sampai Rp. 47.844.262. Secara berurutan tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya di Sulawesi Selatan adalah di

Budidaya KJA Air Laut Rp. 47.844.262, Budidaya Laut (Rumput Laut) Rp. 24.888.684, Budidaya Tambak Rp. 21.642.503, Budidaya Kolam Rp. 12.447.300 Budidaya KJA Air Tawar Rp. 7.662.719 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 24.396.606 dan nelayan perairan umum Rp. 23.032.704.

5.1.6. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tercatat pada Tahun 2016 sebanyak 897.577 orang atau 9,5 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 278.165 orang (30,9 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 167.295 orang (18,6 %), Pengolahan dan Pemasaran sebanyak 451.528 orang (50,3 %) dan Pembudidaya garam sebanyak 589 orang (0,07 %)

5.2. Proyek dan Pembiayaan

5.2.1. Dekonsentrasi (APBN)

Pada tahun 2016 jumlah dana dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan pada 6 (Enam) satuan kerja sebesar Rp.9.947.549.000. Realisasi pembiayaan sampai dengan akhir Desember 2016 tercatat sebesar Rp. 9.407.339.310 atau sebesar 97,6 %, dengan sisa anggaran sebanyak Rp. 540.209.690,- Adapun rincian alokasi dan realisasinya terlihat tabel di bawah ini.

Tabel 24. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Masing-Masing Satuan Kerja, Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Sekretariat Jenderal (01)	970.000.000	969.334.700	665.300	100
2	Ditjen Perikanan Tangkap (03)	1.798.985.000	1.520.680.900	278.304.100	95,7
3	Ditjen Perikanan Budidaya (04)	3.545.655.000	3.524.113.600	21.541.400	99,4
4	Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05)	793.520.000	788.034.400	5.485.600	99,3
5	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) (06)	1.558.789.000	1.395.748.410	163.040.590	89,5
6	Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (07)	1.280.6000.000	1.209.427.300	71.172.700	98,0
J u m l a h		9.947.549.000	9.407.339310	540.209.690	97,6

Sumber: Sub Bagian Program

5.2.2. Provinsi

Pada tahun 2016 jumlah dana provinsi yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp. 69.747.742.155,78,-. Realisasi pelaksanaan pembiayaan sampai dengan akhir Desember 2016 sebesar Rp. 62.332.854.689,- atau sebesar 89,37%. Rincian alokasi belanja publik dan tingkat realisasi terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Rincian Alokasi dan Tingkat Realisasi Belanja Publik, Tahun 2016

KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
		(Rp)	KEUANGAN	%	Fisik (%)
BELANJA LANGSUNG		69.747.742.155,78	62.332.854.689	89,37	93,48
I. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		5,423,223,000	4,690,490,620	86.49	90,91
1	Pembinaan usaha masyarakat pulau-pulau kecil	514,440,000	431,533,700	83.88	84.25
2	Pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat pesisir	1,800,283,000	1,387,904,720	77.09	77.11
3	Pengembangan usaha garam rakyat	73,300,000	73,048,700	99.66	100.00
4	Rehabilitasi kawasan konservasi perairan	1,132,700,000	1,118,767,300	98.77	100,00
5	Pembinaan sistem mitigasi bencana dan ketahanan terhadap bencana di wilayah pesisir	337,000,000	318,320,000	94.46	100.00
6	Pembinaan dan penguatan masyarakat pesisir terhadap kelembagaan konservasi	300,000,000	293,664,800	97.89	100,00
7	Penyusunan dokumen pengelolaan pesisir dan konservasi laut	1,265,500,000	1,067,251,400	84.33	100.00
II. Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		3,983,693,384	3,729,457,967	93.62	96.17
Kegiatan					
1	Pembinaan kelompok masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan	489,043,500	487,637,700	99.71	100.00
2	Peningkatan koordinasi dan SDM aparat pengawas	222,470,000	216,452,587	97.30	100.00
3	Inventarisasi data pengawas perikanan dan kelompok siswasmas	135,350,000	135,350,000	100.00	100.00

KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
		(Rp)	KEUANGAN	%	Fisik (%)
4	Koordinasi dan pembinaan sarana dan prasarana pengawasan	100,000,000	99,964,260	99.96	100.00
5	Penyusunan dan publikasi data pengawasan dan pengendalian perikanan	100,000,000	99,953,600	99.95	100.00
6	Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan	1,954,578,000	1,866,335,700	95.49	100.00
7	Pengawasan dan koordinasi penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi Sulawesi Selatan	765,271,884	611,321,760	79.88	80.07
8	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan	147,640,000	143,191,360	96.99	100.00
9	Koordinasi pengawasan dan pengendalian SDKP	69,340,000	69,251,000	99.87	100.00
III. Pengembangan Perikanan Budidaya		23,731,874,500	20,477,918,178	86.29	88.91
1	Pengembangan induk unggul air payau dan laut	118,250,000	118,130,000	99.90	100.00
2	Operasional produksi benih udang bandeng dan ikan lainnya	196,765,000	196,270,000	99.75	100.00
3	Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan air payau dan laut	1,071,750,000	720,740,250	67.25	67.34
4	Pengembangan induk unggul ikan air tawar	437,500,000	436,387,000	99.75	100.00
5	Pembinaan dan pengembangan teknologi sistem perbenihan ikan air tawar	737,075,000	735,775,000	99.82	100.00
6	Pembinaan dan pengembangan perbenihan ikan air tawar	145,810,000	145,677,200	99.91	100.00
7	Pelayanan pengujian hama dan penyakit ikan	80,000,000	79,700,000	99.63	100.00
8	Pembinaan, pemantauan dan penaggulangan terhadap hama penyakit udang dan ikan	1,604,400,000	1,401,767,300	87.37	87.53
9	Pengembangan budi daya air tawar (paket bibit)	2,655,000,000	1,484,637,500	55.92	56.16
10	Pembinaan pembudidaya ikan air tawar	960,250,000	937,845,000	97.67	100.00
11	Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan paket bibit budidaya air tawar	332,700,000	314,593,400	94.56	100.00
12	Pengembangan budidaya udang dan bandeng (paket bibit)	6,612,000,000	6,008,522,000	90.87	96.98
13	Pembinaan pembudidaya udang dan bandeng dalam pemanfaatan paket bibit	351,068,500	351,051,500	100.00	100.00
14	Koordinasi pengembangan teknologi dan kawasan pembudidayaan laut dan payau	280,850,000	279,785,400	99.62	100.00

KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
		(Rp)	KEUANGAN	%	Fisik (%)
15	Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan paket bibit udang dan bandeng	146,501,000	139,712,200	95.37	99.76
16	Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya rumput laut (paket bibit)	3,629,000,000	3,493,540,851	96.27	100.00
17	Pembinaan pembudidaya rumput laut dalam pemanfaatan paket bibit	643,829,000	643,089,000	99.89	100.00
18	Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan paket bantuan bibit rumput laut	306,501,000	295,667,900	96.47	99.88
19	Pembinaan dan pengembangan sertifikasi CPIB	221,565,000	216,536,250	97.73	100,00
20	Pembinaan dan pengembangan sertifikasi CBIB	1,035,750,000	581,394,000	56.13	56.55
21	Evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya	20,972,000	20,922,000	99.76	100.00
22	Pembinaan dan pemantauan distribusi OIKB dan rekomendasi ekspor impor induk dan benih	98,025,000	97,977,250	99.95	100.00
23	Pembinaan dan pengembangan parasarana irigasi tambak dan fasilitas pendukungnya	1,971,313,000	1,703,464,177	86.41	86.45
24	Penyusunan data statistik perikanan budidaya	75,000,000	74,733,000	99.64	100.00
19	Pembinaan dan pengembangan sertifikasi CPIB	221,565,000	216,536,250	97.73	100,00
20	Pembinaan dan pengembangan sertifikasi CBIB	1,035,750,000	581,394,000	56.13	56.55
IV. Pengelolaan Perikanan Tangkap		14,197,935,000	13,696,161,900	96.47	96.87
1	Pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah laut kewenangan provinsi	686,250,000	674,278,800	98.26	100.00
2	Pembinaan teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan	454,415,000	439,820,800	96.79	100,00
3	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap serta teknologi penangkapan spesifik daerah	6,350,000,000	6,048,173,400	95.25	95.41
4	Pemantauan dan pembinaan penggunaan kapal perikanan berukuran 10 s/d 30 GT	113,615,000	70,335,300	61.91	61.91
5	Evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	111,690,000	88,640,000	79.36	79.36
6	Pembinaan dan pengembangan teknologi usaha perikanan tangkap	6,088,800,000	6,051,273,600	99.38	99.57
7	Pelatihan penerapan teknologi, peralatan, mesin kapal perikanan dan jasa kelautan	322,825,000	260,690,000	80.75	81.41

KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
	(Rp)	KEUANGAN	%	Fisik (%)
8 Penyusunan data statistik perikanan tangkap	70,340,000	62,950,000	89.49	100,00
V. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	7,362,172,500	6,047,625,766	82.14	84.20
1 Pembinaan dan pengembangan usaha perijinan	50,000,000	49,430,000	98.86	100.00
2 BIMTEK perizinan usaha perikanan	129,765,000	129,385,000	99.71	100.00
3 BIMTEK pengelolaan, kerjasama usaha dan promosi usaha	163,670,000	161,745,703	98.82	100.00
4 Layanan administrasi dan bimbingan pemasaran dan promosi produk perikanan baik dalam maupun luar negeri	135,450,000	127,594,904	94.20	100.00
5 Pembinaan produk nilai tambah	880,516,000	831,218,400	94.40	100,00
6 Pembinaan dan peningkatan daya saing mutu dan produk	1,802,505,000	644,686,592	35.77	35.89
7 Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan	1,465,800,000	1,464,427,100	99.91	100.00
8 Pelayanan pengujian mutu hasil perikanan	291,000,000	291,000,000	100.00	100.00
9 Pembinaan standar mutu hasil perikanan	675,400,000	672,708,950	99.60	100.00
10 BIMTEK pengembangan kelembagaan pembudidaya, penangkap ikan dan pengolah hasil perikanan	76,000,000	70,490,000	92.75	100.00
11 Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan	839,800,000	831,787,950	99.05	100.00
12 BIMTEK penguatan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan	74,000,000	67,730,000	91.53	100.00
13 Penyusunan database penyuluh, kelompok dan organisasi usaha perikanan	103,976,500	103,506,500	99.55	100.00
14 Promosi dan pameran produk hasil perikanan	384,950,000	340,676,667	88.50	100,00
15 Penyusunan data statistik pengolahan hasil-hasil perikanan	289,340,000	261,238,000	90.29	97.25
VI. Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,141,850,000	5,213,246,251	84.88	94.68
1 Penyediaan jasa surat menyurat	67,765,000	28,488,000	42.04	100.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	857,000,000	578,595,600	67.51	100.00
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional	358,740,000	354,739,788	98.88	100.00

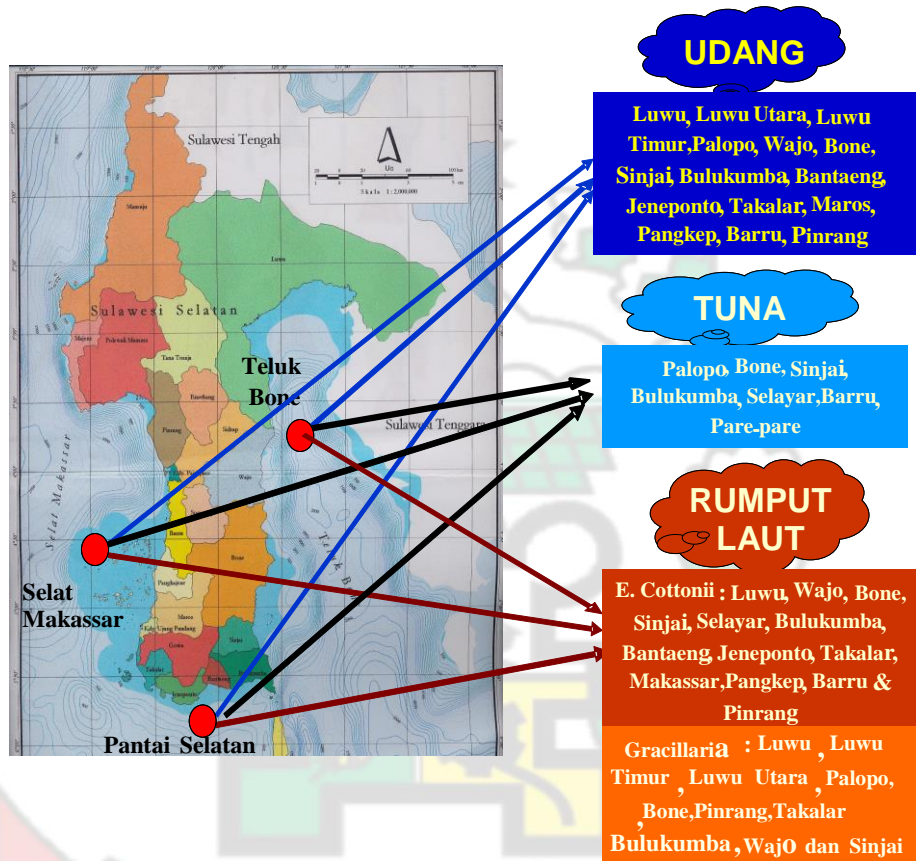
KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
	(Rp)	KEUANGAN	%	Fisik (%)
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	458,002,000	453,733,100	99.07	100.00
5 Penyediaan alat tulis kantor	169,695,000	166,147,950	97.91	100.00
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	109,350,000	106,009,750	96.95	100.00
7 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	40,370,000	37,150,000	92.02	100.00
8 Penyediaan makan minum rapat	90,900,000	90,795,000	99.88	100.00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	595,000,000	266,727,568	44.83	45.04
10 Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja	421,800,000	403,500,000	95.66	100.00
11 Penyediaan jas sopir	144,000,000	142,500,000	98.96	100.00
12 Penyediaan bahan pengujian laboratorium UPTD PPMHP	625,000,000	624,445,000	99.91	100.00
13 Penyediaan bahan bibit dan induk PPBAT	226,500,000	225,750,000	99.67	100.00
14 Penyediaan bahan pengujian Lab. UPTD PPSKI	333,080,000	330,680,000	99.28	100.00
15 Penyediaan jasa administrasi keuangan dinas	1,574,648,000	1,334,464,769	84.75	100.00
16 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	70,000,000	69,519,726	99.31	100.00
VII.Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD	7,167,261,000	6,755,502,132	94.26	96.10
1 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1,040,000,000	996,650,000	95.83	100.00
2 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor UPTD PPBLP	485,250,000	484,391,000	99.82	100.00
3 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor UPTD PPBAT	1,104,680,000	1,101,900,000	99.75	100.00
4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor dinas	487,400,000	478,877,000	98.25	100.00
5 Pengadaan peralatan gedung kantor dinas	761,773,000	760,648,000	99.85	100.00
6 Pengadaan meubeler	355,700,000	355,131,500	99.84	100.00
7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	475,500,000	474,227,500	99.73	100.00
8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	556,500,000	397,901,932	71.50	100.00
9 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	227,700,000	226,251,000	99.36	100.00
10 BIMTEK pengendalian dan pengelolaan keuangan	120,500,000	120,447,000	99.96	100.00
11 BIMTEK workshop kepegawaian	47,000,000	47,000,000	100.00	100.00

Lanjutan.....

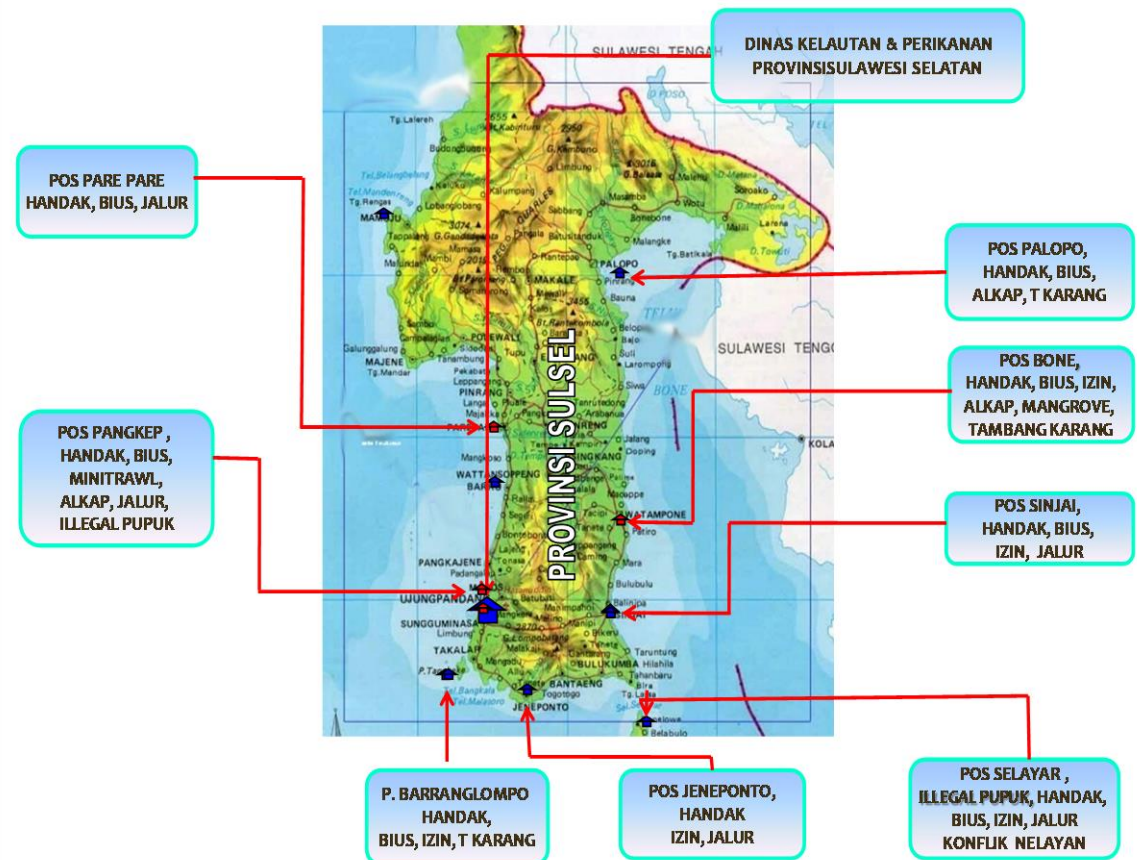
KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
		(Rp)	KEUANGAN	%	Fisik (%)
12	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	72,100,000	72,100,000	100.00	100.00
13	Pendidikan dan pelatihan formal	399,000,000	205,821,200	51.58	51.58
14	Sosisalisai PUG sektor kelautan dan perikanan	86,650,000	86,648,000	100.00	100.00
15	Pembangunan gedung kantor	947,508,000	947,508,000	100.00	100.00
VIII.Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja		1,739,732,772	1,722,451,875	99.01	100,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	540,751,000	526,938,175	97.45	100,00
2	Pertemuan forum SKPD	166,922,000	166,865,000	99.97	100.00
3	Pertemuan pra money terpadu	208,961,000	208,868,900	99.96	100.00
4	Penyusunan dokumen analysis gender	45,972,000	45,961,800	99.98	100.00
5	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	506,583,000	506,203,000	99.92	100.00
6	Penyusunan laporan Monev	57,800,772	57,001,000	98.62	100.00
7	Publikasi dan informasi data pembangunan KP	139,243,000	139,165,000	99.94	100.00
8	Pertemuan sinkronisasi data statistik dan informasi pembangunan KP	73,500,000	71,449,000	97.21	100.00

Sumber : Sub Bagian Program

Lampiran 1. Wilayah Peta Penangkapan Udang, Tuna dan Rumput Laut



Lampiran 2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Subsidi Pengembangan SDM Pengawasan KP Sulawesi Selatan Tahun 2016



Lampiran 3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan,
Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Selayar	63.292	68.313	131.605
2	Bulukumba	195.229	218.000	413.229
3	Bantaeng	88.985	95.532	184.517
4	Jeneponto	172.894	184.913	357.807
5	Takalar	139.381	150.597	289.978
6	Gowa	361.814	373.679	735.493
7	Sinjai	115.962	123.727	239.689
8	Maros	167.724	175.166	342.890
9	Pangkep	157.976	168.724	326.700
10	Barru	82.619	89.287	171.906
11	Bone	356.691	390.282	742.912
12	Soppeng	106.484	119.821	226.305
13	Wajo	188.727	205.768	394.495
14	Sidrap	143.277	149.708	292.985
15	Pinrang	179.321	190.274	369.789
16	Enrekang	101.197	100.417	201.614
17	Luwu	173.472	179.805	353.277
18	Tana Toraja	116.406	113.789	230.195
19	Luwu Utara	153.296	152.076	305.372
20	Luwu Timur	144.912	136.910	281.822
21	Toraja Utara	113.922	113.066	226.988
22	Makassar	727.314	742.287	1.469.601
23	Pare-Pare	69.023	71.400	140.423
24	Palopo	84.192	88.724	172.916
	J u m l a h	4.204.110	4.402.265	8.606.375

Sumber : BPS prov. SulSel

Lampiran 4. Rekapitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tahun 2016

NO	BULAN	SIUP
1	JANUARI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	66
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	12
2	FEBRUARI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	95
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	5
3	MARET	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	289
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	8
4	APRIL	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	180
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	11
5	MEI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	129
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	6
6	JUNI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	102
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	20
7	JULI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	49
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	11
8	AGUSTUS	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	44
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	4
9	SEPTEMBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	16
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	14
10	OKTOBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	1
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	24
11	NOVEMBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	-
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	54
12	DESEMBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	-
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	20
	TOTAL	1.160

Sumber : BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 5. Rekapitulasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2016

NO	BULAN	SIPI
1	JANUARI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	49
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	23
2	FEBRUARI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	91
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	11
3	MARET	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	407
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	21
4	APRIL	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	189
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	19
5	MEI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	135
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	8
6	JUNI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	105
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	35
7	JULI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	48
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	13
8	AGUSTUS	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	43
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	25
9	SEPTEMBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	10
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	41
10	OKTOBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	-
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	15
11	NOVEMBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	-
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	73
12	DESEMBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	-
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	32
	TOTAL	1.393

Sumber : BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 6. Rekapitulasi Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) Tahun 2016

NO	BULAN	SIKPI
1	JANUARI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	24
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	6
2	FEBRUARI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	16
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	15
3	MARET	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	15
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	10
4	APRIL	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	18
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	5
5	MEI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	13
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	7
6	JUNI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	12
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	5
7	JULI	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	7
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	4
8	AGUSTUS	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	6
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	9
9	SEPTEMBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	7
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	8
10	OKTOBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	-
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	3
11	NOVEMBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	-
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	11
12	DESEMBER	
	- Kapal Perikanan 5 - 10 GT	-
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	-
TOTAL		201

Sumber : BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 7. Rekapitulasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengumpul, Penampung, Pengolah, dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Alamat	No.SIUP	Tgl.SIUP	Nama Pemohon
1	PT. TUJUH SAMUDERA JAYA	Jl. Malino	1/D.06.P/P2T/01/2016	12/1/2016	AGNES TANDIARI
2	PT.ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	JL.HA. MAPPANYUKKI NO.9	2/D.06.P/P2T/01/2016	12/1/2016	JAYA BARAMULI
3	PT. OCEAN CHAMP SEAFOOD	Jl. Kima 7/Kav. J-2, KIMA	3/D.06.P/P2T/01/2016	14/1/2016	ARIYANTO HALIM
4	UD. FAJRUN BERSAUDARA	Jl. Yos Sudarso No. 284 Makassar	4/D.06.P/P2T/01/2016	28/1/2016	FAJRUN
5	PT. JIREH COMMODITY	Jl. Kima Raya 2 Komp. Kima Square Warehouse 2 Unit No. 11-12-13	5/D.06.P/P2T/01/2016	28/1/2016	PT. JIREH COMMODITY
6	UD.MAKASSAR OCEAN 97	Jl. Barukang Utara Lr. 13	6/D.06.P/P2T/01/2016	28/1/2016	SARIPUDDIN
7	CV. SEMPURNA	Jl. Barukang Utara Lr. 15 No. 16	7/D.06.P/P2T/01/2016	28/1/2016	ANDRY TANOD
8	UD. REZKY 99, PO	Jl. Sultan Abdullah B. 4 No. 13-14	8/D.06.P/P2T/01/2016	28/1/2016	SYAHRUL
9	PT. MEGA CITRA KARYA	Jl. Ir. Soetami No. 1	9/D.06.P/P2T/02/2016	2/2/2016	ALEX HAMDANI
10	PT. BOGATAMA MARINUSA	Jl. Kima Raya 2 Kav. N-4 BI	10/D.06.P/P2T/02/2016	2/2/2016	CHIN TIGOR CHENDARMA
11	CV. GUNA BAHARI INDONESIA	Jl. Lamuru no. 6	11/D.06.P/P2T/02/2016	5/2/2016	OEI ROBBY WIJAYA
12	UD. BUDINDO LESTARI	Jl. Barukang Utara Lr. 15	12/D.06.P/P2T/02/2016	5/2/2016	FREDDY MARDJUDIN
13	DARWAN. NG	Jl. Sultan Dg. Raja No. 11/7A	13/D.06.P/P2T/02/2016	15/2/2016	DARWAN. NG
14	CV. ADI TIRTA	Jl. Salodong No. 38 (Gudang/T4 Produksi)	14/D.06.P/P2T/02/2016	16/2/2016	YORIS WANTER
15	PT. BANTIMURUNG INDAH	Desa Allepolea Jl. Raya Maros	15/D.06.P/P2T/02/2016	18/2/2016	PT. BANTIMURUNG INDAH
16	UD. VICTORY FUND	Jl. Sultan Daeng Raja No. 51	16/D.06.P/P2T/02/2016	19/2/2016	VONNNY YAU
17	PT. BINTANG MEGA JAYA PERKASA	Jl. Poros Maros No. 50 (Sesuai Akta No. 14)	17/D.06.P/P2T/03/2016	2/3/2016	ADIFIN NURMIN
18	PT. MULTI NUSA INTI LESTARI	Jl. Pangeran Diponegoro No. 95	18/D.06.P/P2T/03/2016	11/3/2016	IR. LUKMANTO LAWY
19	CV. INTI MAKMUR	Jl. Kima 6 Blok F1/ A2	19/D.06.P/P2T/03/2016	11/3/2016	JUNIYANTI IRMA MALADAN
20	SHAIFULLAH, SAG	Jl. Barukang VI No. 24	20/D.06.P/P2T/03/2016	17-03-2016	SHAIFULLAH, SAG
21	PT. TRANS RETAIL INDONESIA	Jl. Adhiyaksa Baru No. 1 Panakukang Square	21/D.06.P/P2T/03/2016	18-03-2016	ALBERT SARUNGALLO, ST
22	PT. ASIA SEJAHTRA MINA	Jl. Ir. Sutami, Kawasan Terpadu Logistik Blok A1 No. 24	22/D.06.P/P2T/03/2016	18-03-2016	IR. NELSON TANRI
23	CV. ADHI KARYA TEKNINDO	Btn. Hamzy Blok. U 1 No. 8	23/D.06.P/P2T/03/2016	24-03-2016	ABD. KADIR
24	CV. ARTHA MAKMUR PERMAI	Jl. Boulevard No. 18 - 19 Ruko Emerald Panakkukang Mas	24/D.06.P/P2T/03/2016	28-03-2016	JOHN HUSYEN
25	H. ARIFUDDIN	Dusun One Sawengka	25/D.06.P/P2T/03/2016	28-03-2016	H. ARIFUDDIN
26	CV. RESKY BAHARI	Dusun/ Lingk. Ballu-Ballu	26/D.06.P/P2T/03/2016		FIRMANSYAH, SE
27	PT. SUKSES HASIL ALAM NUSAINDO	Jl. Kima 9 Kav. I. No. 11 C Kawasan Industri Makassar	27/D.06.P/P2T/03/2016		EFFENDI SOEGIONO
28	CV. RESKI UTAMA	Jl. Sabutung Baru III No. 25	28/D.06.P/P2T/03/2016	29-03-2016	H. JAMALUDDIN
29	NELAYAN HARAPAN UTAMA PRIBUMI, KOPERASI	Jl. A.P. Pettarani No. 11 B	29/D.06.P/P2T/03/2016	30-03-2016	H. M. BUSRAH ABDULLAH, SE., M.Si
30	PT. MITRA KARTIKA SEJATI	Jln. KIMA RAYA I KAV. D-1B KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR	30/D.06.P/P2T/03/2016	31-03-2016	SUSAN TANGKUNAI
31	PT. BUAH MIMPI	Jl. Kima 17 Kav. Kode DD	31/D.06.P/P2T/03/2016	31-03-2016	H. DAULENG TJAMPA
32	UD. SURYA TANI	Jl. Diponegoro No. 95 A	32/D.06.P/P2T/04/2016	8/4/2016	DANIEL WUYSANG
33	PT. KELOLA MINA LAUT	Jl. KIMA 17 BLOK DD 15-16 KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR	33/D.06.P/P2T/04/2016		H. SISWO GUGAH SETIAWAN
34	PT. MULTI MONODON INDONESIA	Jl. Kima Raya I Blok D. 2b	34/D.06.P/P2T/04/2016		MARTEN MONINGKA, SH
35	PT. CHEN WOO FISHERY	Jl. Kima 4 Blok K 9 Kav. B2	35/D.06.P/P2T/04/2016	8/4/2016	FERRY GUNAWAN
36	PT. MULTI SARI MAKASSAR	Jl. Kima 14 Kav. SS 12	36/D.06.P/P2T/04/2016		NURCAHYO
37	PT. DUNIA MARINE PRODUCTS	Jl. Kawasan Industri Makassar 3/K-4B	37/D.06.P/P2T/04/2016	12/4/2016	ABDUL MUIS
38	SYAMSURIADI	Jl. Abubakar lambogo Lr. 4 No. 11	38/D.06.P/P2T/04/2016	12/4/2016	SYAMSURIADI
39	PT. CHEN WOO FISHERY	Jl. Kima 4 Kav. P-2 B	39/D.06.P/P2T/04/2016	15-04-2016	FERRY GUNAWAN
40	PT. SINAR GRAHA	-	40/D.06.P/P2T/04/2016	18-04-2016	LENNY SUGANDY
41	EVENDI	Jl. KH. Hayyung No.36 Benteng	41/D.06.P/P2T/04/2016	21-04-2016	EVENDI
42	CV. PRIMA INDO TUNA	-	47/D.06.P/P2T/05/2016	13-05-2016	AFIANTO AMIN
43	PT. PRIMA BAHARI INTI LESTARI	Jl. Kima 12 Kav. 5 C	48/D.06.P/P2T/05/2016	13-05-2016	IR. LUKMANTO LAWY
44	CV. PACIFIC FORTUNA	Ruko Pasar Grosir Daya Modern Blok A1-17	49/D.06.P/P2T/05/2016	13-05-2016	SUKARMAN
45	CV. OME TRADING COY	Jl. Pengayoman Kompleks Akik Hijau Blok. C. 7	50/D.06.P/P2T/05/2016	13-05-2016	H. OME MANNE
46	PT. BUMI MENARA INTERNUSA		52/D.06.P/P2T/05/2016	16-05-2016	INDRA WINOTO

No	Nama Perusahaan	Alamat	No.SIUP	Tgl.SIUP	Nama Pemohon
47	KSU SIMPUL DISTRIBUSI KOMODITI (KOPERASI)	Jl. KH. Adam Larimi, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur	53/D.06.P/P2T/05/2016	16-05-2016	ASDAR MARZUKI, S. PI
48	H. JAMALUDDIN S. AGO	Jl. Sabutung No. 36	54/D.06.P/P2T/05/2016	17-05-2016	H. JAMALUDDIN S. AGO
49	PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA	Jl. Sultan Hasanuddin No. 95	55/D.06.P/P2T/05/2016	18-05-2016	LILIK TONI SRI MOERTIHARI, SH
50	CV. AIR MARITIM NUSANTARA	Jl. Kapasa Raya Ruko Kapasa Raya Permai No. 7	56/D.06.P/P2T/05/2016	19-05-2016	ANWAR
51	PT. OMERESO FOODS	Jl. POROS KANJILLO BAROMBONG	57/D.06.P/P2T/05/2016	19-05-2016	H. JUFRIMAN, SE
52	PT. INDO JAYA MARINA	Jl. Pasar Ikan Ir. 22 A	58/D.06.P/P2T/05/2016	20-05-2016	RICKY RUDIANA
53	PT. USAHA CENTRAL JAYA SAKTI	Jl. Kima V Kav. E No. 3 A	59/D.06.P/P2T/05/2016	20-05-2016	MERRY CHANDRA
54	PT. LOTTE MART INDONESIA	Jl. Boulevard No. 1 Mall Panakukang	60/D.06.P/P2T/05/2016	20-05-2016	ARWIN ARIN RINENDRA
55	PT. BODDIA JAYA	Jl. Karaeng Salamaka	62/D.06.P/P2T/05/2016	31-05-2016	H. PARAWANSYAH DG. LAPANG
56	PT. TOBIKO UTAMA	Jl. Sultan Alauddin No. 47-51	63/D.06.P/P2T/06/2016	6/6/2016	Hj. FATMAWATI IDRIS, SE
57	PT. MAJU AWANINDO BERJAYA	Lingkungan Padang Alla	64/D.06.P/P2T/06/2016	10/6/2016	Ir. H. ANDI BASO MAPPAEWA
58	CV. MARINE 33	Jl. Mesjid Raya No. 33	65/D.06.P/P2T/06/2016	14-06-2016	PARDIANAH ATJO
59	PT. LINTAS ANTAR NUSA	Dusun Jonggo Desa Aeng Batu - batu	66/D.06.P/P2T/06/2016	14-06-2016	ACHMAD YULIANA
60	PT. WIMAN SEJAHTERA	Jl. Kima Raya I Kav. D No. 1A	67/D.06.P/P2T/06/2016	14-06-2016	DJOHAN WIJAYA
61	PT. RAPID NIAGA INTERNATIONAL	Jl. Ir. Sutami Pergudangan Parangloe Indah Blok L.5 No. 18	68/D.06.P/P2T/06/2016	14-06-2016	NOOR RAHMAH AMIER, ST
62	MUSTAFA B	Jl. CAKALANG I NO. 9	69/D.06.P/P2T/06/2016	15-06-2016	MUSTAFA B
63	CV. ANUGERAH SEJATI	Jl. Metro tanjung Bunga AA.19	70/D.06.P/P2T/06/2016	15-06-2016	SUMIATI
64	ABD. SALAM	Jl. Rajawali Lr. 13 A No.42 D	71/D.06.P/P2T/06/2016	20-06-2016	ABD. SALAM
65	PT. BIRU LAUT NUSANTARA	Jl. Kima 8 Kav. SS No. 23	72/D.06.P/P2T/06/2016	22-06-2016	KUSNI SETYOWATI
66	UD. ANUGRAH BINTANG CEMERLANG	DUSUN BONTOPADDINGIN	73/D.06.P/P2T/06/2016	24-06-2016	H. CHAERUL MUHAMMAD
67	PT. KEMILAU BINTANG TIMUR	Jl. Kima 3 Kav. 2A Makassar	74/D.06.P/P2T/06/2016	28-06-2016	AGUS SAPUTRA
68	PT. NUANSA CIPTA MAGELO	Jl. Kima 3 Daya	75/D.06.P/P2T/06/2016	28-06-2016	RICHARD P. SIAGIAN
69	UD. RESKY MANDIRI	Jl. Sabutung Paotere No. 80	76/D.06.P/P2T/07/2016	28-06-2016	SAPARUDDIN
70	PT. TRANS RETAIL INDONESIA	Jl. H. M. Daeng Tompo Studio trans Walk	77/D.06.P/P2T/06/2016	29-06-2016	ADI PRIHASMORO
71	PT. MINA TIMUR INDONESIA	Jl. Abd. Kuddus, Barombong, Kec. Tamalate	78/D.06.P/P2T/07/2016	13-07-2016	SRI RAMAYANTI RAUF
72	PT. MINA MAJU SEJAHTERA	Jl. cINRANAE nO.1	79/D.06.P/P2T/05/2016	13-07-2016	SURYA
73	UD. REZKY 99, PO	Jl. Sultan Abdullah B. 4 No. 13-14	80/D.06.P/P2T/07/2016	21-07-2016	SYAHRUL
74	PT. SENTRA TANI SEJAHTERA	Jl. Veteran Selatan No. 287	81/D.06.P/P2T/07/2016	27-07-2016	MAKMUR, SE
75	CV. MORYN ABADI	Jl. Barukang Utara No. 189	82/D.06.P/P2T/07/2016	28-07-2016	EMY ROSITA
76	PT. ARTI BUANA LAUTAN INDONESIA	Jl. Barukang Raya No. 79	83/D.06.P/P2T/07/2016	28-07-2016	H. MUHAMMAD ARSYAD BIN H. BUA
77	CV. KARYA MURNI	Jl. Bersih No. 04	84/D.06.P/P2T/07/2016		PAJRIN
78	SINAR LAUT	Jl. Lingk. Ballu-Ballu	85/D.06.P/P2T/08/2016	12/8/2016	MUH. JUFRU
79	AGUSSALIM	Jl. Drs. Haeruddin Hasan No. 21	86/D.06.P/P2T/08/2016	12/8/2016	AGUSSALIM
80	UD. KARYA NELAYAN	Jl. Barukang Utara No. 26	87/D.06.P/P2T/08/2016	19-08-2016	AWAL FAJRI, SH
81	CV. SURI GLOBAL TRADE	BTN Nusa Idaman C6 No. 12	88/D.06.P/P2T/09/2016	9/9/2016	ANDI RACHMIANTY
82	PT. INGO CELEBES JAYA	Jl. Hertasning Komp. Palm Mas No. 13	89/D.06.P/P2T/09/2016	14-09-2016	MAUDY KARTIKA DEWI NYIOLAH
83	PT. DWIRA MASAGENA	Jl. Onta Baru No.48	90/D.06.P/P2T/09/2016	16-09-2016	ABDUL RAJAB, ST
84	CV. NUR ALAMSYAH	Jl. Tinumbu Lr. 165 C No. 22 A	91/D.06.P/P2T/09/2016	16-09-2016	H. ZAINUDDIN S.
85	UD. PULAU MAS	Jl. Diponegoro GG. Ulam Kencana No. 48 A Pesanggaran Bali	92/D.06.P/P2T/09/2016	20-09-2016	HERU PURNOMO
86	PT. PARLEVLIET PARABA SEAFOOD	Jl. Jembatan Tua No. 89	93/D.06.P/P2T/09/2016		JUMARTO
87	USAHA RYAN	Dusun Bulu Tanae Griya Batas Kota	94/D.06.P/P2T/08/2016	23-09-2016	RYAN
88	UD. BINTANG MAS	Jl. H. I. Saleh No. 14	95/D.06.P/P2T/09/2016	27-09-2016	PHILIP RUDIANA
89	CV. 3 BERKAT MURNI BARA	Perum Permata Regency Blok D No. 2	96/D.06.P/P2T/09/2016	27-09-2016	PETY FATIMAH
90	PT. PRIMA GLOBAL SUKSES	Jl. Prof. DR. Ir. Sutami No. 32 A	97/D.06.P/P2T/10/2016	28-09-2016	ANDI SYAHDATUL BAHRIAH
91	UD. HIDAYAH	Jl. Bolu Kanal No. 37	98/D.06.P/P2T/09/2016	30-09-2016	ABD. HARIS, SE
92	SUL FADILLAH NASA	Jl. Sabutung No. 4 Makassar	99/D.06.P/P2T/10/2016	30-09-2016	SUL FADILLAH NASA

Sumber : BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 8. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

No	Kab/Kota	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Gowa	7	46
2	Wajo	22	244
3	Selayar	18	115
4	Luwu Utara	4	39
5	Soppeng	9	94
6	Bantane	53	730
7	Takalar	30	242
8	Palopo	56	527
9	Luwu Timur	7	68
10	Sinjai	7	105
11	Enrekang	8	186
12	Pinrang	40	579
13	Makassar	51	240
14	Pare-Pare	11	146
15	Bone	49	562
16	Bulukumba	9	100
17	Sidrap	4	54
18	Barru	44	454
19	Maros	8	80
20	Tana Toraja	5	47
21	Toraja Utara	3	25
22	Jeneponto	15	147
23	Pangkep	44	496
24	Luwu	5	52
TOTAL		509	5.378

Sumber :Seksi Pembinaan Usaha

Lampiran 9. Data Koperasi Penerima Kapal APBN Tahun Anggaran 2016

No	Kabupaten	Tipe	Mesin	Jumlah	Koperasi Penerima
1	Takalar	10 VNH	Weichai 68 HP	2	Koperasi Serba Usaha Minasa jaya
2	Takalar	20 VNH	Weichai 120 HP	4	Koperasi Serba Usaha Minasa jaya
3	Takalar	3 VPB	Honda 20 HP	1	Koperasi serba Usaha Tallasakku
4	Takalar	3VPB	Honda 20 HP	1	Koperasi Serba Usaha Cahaya Timur
5	Sinjai	20 VLH	Yanmar, 110 HP	3	KUD Mina Lappa
6	Sinjai	5 V	Hyundai 40 HP	2	KUD Mina Lappa
7	Sinjai	5 V	Hyundai 40 HP	1	KUD Mina Lappa
8	Sinjai	10 VLH	Yanmar 78 HP	6	KUD Mina Lappa
9	Sinjai	20 VLH	Yanmar 110 HP	2	KUD Mina Passabu Karya
10	Luwu Utara	10 UNH	Bukh, 76 HP	2	Koperasi Mappatuoe
11	Luwu Utara	20 VNH	Kisung Korsta 120 HP	3	Koperasi Mappatuoe
12	Luwu Utara	20 VNH	Kisung Korsta 120 HP	1	Koperasi Mappatuoe
13	Gowa	20 VNH	Kisung Korsta 120 HP	2	Koperasi Surya Bersama
14	Gowa	10 VLH	Perkins, 86 HP	1	Koperasi Surya Bersama
15	Wajo	20 VPL	Yanmar, 110 HP	1	Koperasi Nelayan dan Tambak Basma Bahari
16	Wajo	3 V	Honda 20 HP	5	Koperasi Nelayan dan Tambak Basma Bahari

Sumber: Seksi Perikanan Tangkap

Lampiran 10. Data Penyerahan Kapal yang diberikan Kepada Kelompok Nelayan Melalui Program Taskin (APBD) Tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Penerima		
		Nama	Kelompok	Alamat
1	Pengadaan Perahu Jolloro di Makassar	Tajuddin Roe	Barrang lombo Bahari	Kel. Barrang Lombo Ujung Tanah
2	Pengadaan Perahu Katinting di Makassar	Nurdin	Barang Lombo Bahari Tiga	Kel. Barrang Lombo Ujung Tanah
3	Pengadaan Perahu Katinting Kec. Duampanua Kab. Pinrang ➢ Klp Nelayan Karaeng Lurang ➢ Klp Nelayan Lalewai ➢ Klp Nelayan Manrapi	Basri Rustam Ikbai	Karaeng Lurang Nelayan Manrapi Nelayan Lalewai	Ds. Dat Ds. Maroneng Ds. Maroneng
4	Pengadaan Perahu Fiber dan Mesin Penggerak di Kec. Galesong Kab. Takalar ➢ Klp Minasa Te'ne ➢ Klp Bajiminasa ➢ Klp. Tuma'Biring	Saharuddin Dg Nawang Dangkala Dg Ngopo Hamadong Dg. Bantang	Minasa Te'ne Bajiminasa Tuma'Biring	Ds. Mappakalombo Ds. Galesong Baru Ds. Boddia
5	Pengadaan kapal Pengangkut Ikan di Kab. Selayar	Wira Indrawan	Nelayan Bahari	Ds. Benteng - Benteng
6	Pengadaan Perahu Mesin Jandong Kec. Bontoma'tene Kab. Selayar	Muhammad Rum	Ridho Ilahi	Ds. Menara Indah
7	Pengadaan Mesin Katinting dan Perahu Kec. Suppa, Lanrisang Kab. Pinrang	Mulladi Samad	Sipatuo Indah	Desa Waetuo Lanrisang

No	Jenis Pekerjaan	Penerima		
		Nama	Kelompok	Alamat
8	Pengadaan Perahu Jukung di Kab. Bulukumba	Baharuddin A	Ari Putra	Desa Eka Tiro Bonto Tiro
9	Pengadaan Perahu Jukung di Kab. Sinjai	Taswan	Bintang Laut	Desa Tongke – Tongke
10	Pengadaan Perahu Jukung di Kab. Bone	Edi Suyono	Mabbarakkae I	Desa Panyulu Kec. T.R. Timur
11	Pengadaan Perahu Jukung di Kab. Luwu	DedyRahman	Kakap Putih	Desa Cimpu , Kec. Suli
12	Pengadaan Perahu Jukung di Kab. Selayar	Aswar	Camar Laut	Desa Rajuni Takabonerate

Sumber: Seksi Perikanan Tangkap

Lampiran 11. Daftar Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	KAB./KOTA	KLAS / TYPE	POSISI PEL. PERIKANAN	KETERANGAN
1	Pelabuhan Perikanan Untia	Kota Makassar	PPN / B	Pantai	Tahap pembangunan
2	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	PPI / D	Pantai	Operasional
3	Pelabuhan Perikanan Rajawali	Kota Makassar	PPI / D	Pantai	Operasional
4	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	PPI / D	Pantai	Tahap pembangunan
5	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	PPI / D	Sungai	Operasional
6	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	PPI / D	Pantai	Operasional
7	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	PPI / D	Pantai	Tidak Oprasional
8	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare	PPI / D	Teluk	Operasional
9	Pelabuhan Perikanan Lero	Kab. Pinrang	PPI / D	Teluk	Tahap pembangunan
10	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	PPI / D	Pantai	Operasional
11	Pelabuhan Perikanan Siwa	Kab. Wajo	PPI / D	Pantai	Tidak Oprasional
12	Pelabuhan Perikanan Bonepute	Kab. Luwu	PPI / D	Pantai	Tahap pembangunan
13	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	PPI / D	Pantai	Tidak Oprasional
14	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	PPI / D	Pantai	Tahap pembangunan
15	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	PPI / D	Pantai	Operasional
16	Pelabuhan Perikanan Malangke	Kab. Luwu Utara	PPI / D	Pantai	Tahap pembangunan
17	Pelabuhan Perikanan Malili	Kab. Luwu Timur	PPI / D	Sungai	Operasional
18	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	PPI / D	Muara Sungai	Operasional
19	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	PPI / D	Pantai	Operasional
20	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	PPI / D	Pantai	Tahap pembangunan
21	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	PPI / D	Pantai	Operasional
22	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	PPI / D	Pantai	Tidak Operasional
23	Pelabuhan Perikanan Boddia	Kab. Takalar	PPI / D	Pantai	Tidak Operasional
24	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	PPI / D	Pantai	Tahap pembangunan
25	Pelabuhan Perikanan Barombong	Kab. Gowa	PPI / D	Muara Sungai	Operasional
26	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	PPI / D	Pantai	Operasional

Sumber: Seksi Perikanan Tangkap

Lampiran 12. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Udang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

TAHUN		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
2013	Volume (Ton)	294.1	511.1	449.5	411.9	515.9	303.5	453.9	266.1	506.2	439.1	773.3	330.3	5,254.9
	Nilai (US \$ 1000)	3,800.4	4,168.8	5,600.3	4,710.1	6,524.1	3,886.7	6,014.6	3,792.9	3,417.8	7,273.5	11,132.1	5,269.1	65,590.4
2014	Volume (Ton)	326.4	521.2	424.8	362	285.4	449.9	397.7	489	484.7	549.3	327.2	362.5	4,980.1
	Nilai (US \$ 1000)	5,203.4	5,461.6	5,031.4	4,954.9	4,322.4	6,638.9	5,532.2	6,897.6	8,448.4	8,051.7	4,330.4	2,928.6	67,801.5
2015	Volume (Ton)	187.5	203.8	324.1	426.1	414.2	332.5	297.5	311.8	326	345.3	342.6	473.7	3,985.1
	Nilai (US \$ 1000)	2,289.1	3,470.2	4,419.6	4,658	4,888.6	4,405.7	4,156.9	3,875.1	3,944.5	4,151	4,320.9	5,992.9	50,572.5
2016	Volume (Ton)	325	439.4	539	472.2	748.0	781.1	602.9	724.5	474.1	609.5	560.9	607.9	6,884.5
	Nilai (US \$ 1000)	3,513.7	3,972.	4,104.8	3,709.9	5,976.8	6,347.3	5,280.8	5,844.9	6,089.8	5,621.2	5,149.1	5,634.7	61,245.0

Sumber : Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 13. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

TAHUN		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
2013	Volume (Ton)	3,780.2	5,434.6	5,573.0	8,430.8	7,795.3	4,883.6	6,504.2	6,089.5	9,160.4	8,922.3	8,302.9	6,017.7	80,894.5
	Nilai (US \$ 1000)	3,454.0	4,983.6	5,269.9	7,885.4	7,489.8	4,827.7	6,014.6	6,626.9	12,020.9	10,057.6	10,095.9	7,527.2	86,253.5
2014	Volume (Ton)	6,618.6	8,181.2	8,295.7	10,665.5	10,431.9	9,259.9	9,210.4	7,830.3	12,297.8	12,670.7	13,404.9	8,787.8	117,654.7
	Nilai (US \$ 1000)	7,208.2	10,331.7	9,851.3	12,935.1	10,881.6	13,101.7	10,973.9	9,466.7	14,721.1	15,247.6	13,930.6	9,840.0	138,489.5
2015	Volume (Ton)	6,955.5	6,546.7	11,492.6	12,041.2	11,929.8	12,066.8	11,759.9	11,260.5	8,933.5	8,532.8	9,704.4	10,524.7	121,748.4
	Nilai (US \$ 1000)	7,479.9	6,518.2	14,924.5	10,490.3	10,537.9	10,444.9	9,414.9	8,957.4	6,254.5	5,926.5	6,438.7	7,531.9	104,919.6
2016	Volume (Ton)	6,366.2	9,214.1	9,342.5	11,084.9	10,005.8	8,524.9	5,778.4	10,798.0	8,649.5	8,876.9	8,342.6	8,143.3	105,127.1
	Nilai (US \$ 1000)	5,065.2	8,155.8	6,087.8	7,861.7	6,818.6	6,238.4	4,790.8	9,515.2	7,842.5	8,201.7	6,618.5	8,679.1	85,875.3

Sumber : Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 14. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

No.	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Volume Ekspor	Ton												
	Udang Beku	325.0	439.4	539.0	472.20	748.04	781.10	602.9	724.5	474.1	609.5	560.9	607.9	6,884.5
	Tuna/Cakalang/Tongkol	300.3	98.4	186.3	389.0	272.1	23.1	224.1	153.9	192.5	171.4	186.0	176.5	2,373.4
	Telur Ikan Terbang	18.0	18.0	20.0	21.9	0.01	2.0	42.1	170.5	10.0	23.2	16.0	51.6	393.3
	Teripang	10.3	4.5	58.2	32.7	24.2	19.0	16.3	5.5	18.0	21.7	16.4	3.4	230.3
	Cumi-Cumi Beku	16.1	15.9	17.6	43.6	41.7	17.3	14.6	7.0	12.2	35.9	15.4	24.0	61.4
	Rumput Laut	6,366.2	9,214.1	9,342.5	11,084.9	10,005.8	8,524.9	5,778.4	10,798.0	8,649.5	8,876.9	8,342.6	8,143.30	105,127.1
	Sirip Ikan hiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kakap/Kerapu	174.6	119.0	115.8	180.7	148.8	79.3	37.3	97.2	54.7	82.7	132.5	283.9	1,506.4
	Kepiting	17.3	15.5	19.9	22.8	27.6	10.4	12.2	23.9	15.8	17.0	13.4	15.8	211.5
	Bahan makanan lainnya	99.5	73.3	211.9	143.1	149.9	53.7	59.0	128.5	92.5	83.3	99.9	73.8	1,268.3
	Bukan Bahan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
	Jumlah	7,527.3	9,998.1	10,511.1	12,390.9	11,418.2	9,510.9	6,786.8	12,108.9	9,519.3	9,921.5	9,383.1	9,380.2	118,256.3

LAPORAN TAHUNAN 2016

Lanjutan.....

No.	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
2	Nilai Ekspor	US\$ 1.000												
	Udang Beku	3,513.7	3,972.0	4,104.8	3,709.9	5,976.8	6,347.3	5,280.8	5,844.9	6,089.8	5,621.2	5,149.1	5,634.7	61,245.0
	Tuna/Cakalang/Tongkol	1,978.0	633.3	1,210.4	2,440.9	1,540.9	139.9	1,141.6	890.0	1,250.4	1,137.9	1,335.9	1,362.1	15,061.4
	Telur Ikan Terbang	277.9	277.9	308.8	337.5	0.1	30.9	495.6	2,688.7	193.2	396.2	303.5	1,189.4	6,499.8
	Teripang	79.3	35.0	436.8	252.7	187.0	146.7	125.6	42.5	138.9	167.7	116.9	26.4	1,755.6
	Cumi-Cumi Beku	653.8	47.4	67.0	131.4	132.9	22.6	65.7	27.8	69.2	146.0	87.5	27.5	1,478.6
	Rumput Laut	5,065.2	8,155.8	6,087.8	7,861.7	6,818.6	6,238.4	4,790.8	9,515.2	7,842.5	8,201.7	6,618.5	8,679.1	85,875.3
	Sirip Ikan hiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	Kakap/Kerapu	1,327.3	1,064.2	1,151.7	1,207.8	1,501.9	737.7	635.9	868.5	663.5	702.3	851.2	5,939.8	16,651.6
	Kepiting	331.6	292.2	372.6	440.2	514.6	195.4	229.6	448.6	288.7	299.4	229.2	295.5	3,937.6
	Bahan makanan lainnya	1,355.3	848.8	2,919.9	2,035.4	1,736.0	178.4	792.0	1,702.6	1,177.2	1,142.8	2,232.8	1,691.5	17,812.8
	Bukan Bahan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Jumlah	14,582	15,327	16,660	18,418	18,409	14,037	13,558	22,029	17,713	17,815	16,924.62	24,846	210,318

Sumber : BBKIPM Makassar dan Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 15. Rekapitulasi Jumlah Pokmaswas Aktif Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pokmaswas sampai dengan Desember 2016

	Kab/Kota	Jumlah Pokmaswas	Jumlah Anggota Aktif	Jumlah Pokmaswas (Klp)	
				Aktif	Tidak
1	Takalar	18	377	18	0
2	Bulukumba	23	76	5	18
3	Luwu Timur	14	108	4	10
4	Wajo	14	214	10	4
5	Bone	13	285	13	0
6	Barrau	10	99	7	3
7	Makassar	8	40	5	3
8	Luwu Utara	13	176	13	0
9	Sinjai	11	193	11	0
10	Pangkep	42	159	16	26
11	Palopo	7	141	5	2
12	Selayar	7	212	4	3
13	Pinrang	11	225	10	1
14	Luwu	8	69	3	5
15	Jeneponto	10	35	1	9
16	Maros	4	40	4	0
17	Bantaeng	12	121	11	1
18	Gowa	3	77	3	0
19	Sidenreng Rappang	1	27	1	0
20	Pare Pare	2	27	2	0
21	Enrekang	12	73	4	8
Jumlah		243	2.774	150	93

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan

Lampiran 16. Data SDM PPNS Perikanan yang Aktif di Bidang Pengawasan SDKP Kab/Kota dan Prov, Hasil Pembinaan Seksi Pengembangan SDM Pengawasan KP Tahun 2016

N o.	Nama PPNS	Satuan Instansi	Masa Berlaku s/d Thn	No. SKEP PPNS/ Tahun Penerbitan
1	2	3	4	5
1	Syamsuddin Nur, S.Pi NIP 19630903 198603 1 027	Staf Seksi Penataan & Gakum / DKP Prov Sulsel	28-Apr-20	AHU-60.AH.09.02. Tahun 2015
2	Nursalam, S.Pi.,M.Si NIP 19680904 200502 1 001	Staf Seksi Pengemb SDM Pengawasan KP / DKP Prov Sulsel	28-Apr-20	AHU-60.AH.09.02. Tahun 2015
3	Muh. Erwin Azis, S.Pi NIP 19840708 201001 1 019	Staf Seksi Penataan & Gakum / DKP Prov Sulsel	02/10/2020	AHU-50.AH.09.01. Tahun 2015
4	Subandi NIP 19601018 198603 1 010	Kepala Seksi Pengawasan SDKP / DKP Kab. Sinjai	28-Apr-20	AHU-60.AH.09.02. Tahun 2015
5	Asrul, S.Pi NIP 19621231 198603 1 247	Kepala Seksi Pengawasan & Perlindungan Ekoper / DKP Kab. Pangkep	09-Feb-20	AHU-18.AH.09.02. Tahun 2015
6	Sanawiah, S.ST NIP 19750613 199903 2 008	Kepala Seksi Pemberdayaan PPK / DKP Kab. Pangkep	27-Mei-18	AHU-38.AH.09.02. Tahun 2013
7	Lutfi, S.Pi.,M.Si NIP 19680601 200212 1 003	Kepala Seksi Kelautan & Konservasi / DKP Kab. Pinrang	07-Okt-19	AHU-43.AH.09.01. Tahun 2014
8	Pahmi, S.Pi. NIP 19690207 200212 1 004	Kepala Seksi Sarana & Prasarana / DKP Kab. Pinrang	07-Okt-19	AHU-43.AH.09.01. Tahun 2014
9	Muh. Gazali, S.Pi NIP .19640910 198509 1 001	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Timur	04-Sep-20	AHU-42.AH.09.01. Tahun 2015
10	Tri Wiyanto Achadi,S.Pi NIP 19740804 200502 1 004	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Timur	03-Mar-21	AHU-13.AH.09.02 Tahun 2016
11	Abdul Hakim Ischak,S.Pi NIP 19740804 200502 1 004	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar	-	AHU-69.AH.09.01. Tahun 2010
12	Kaharuddin,S.Pi NIP 19740324 200604 1 006	Kepala Seksi Pengawasan SD & Ekosistem KP DKP Jeneponto	07-Jun-16	AHU-32.AH.09.01. Tahun 2011
13	Zul Janwar, S.Kel.M.Si NIP 19790129 200312 1 006	Kasi Pengawasan Pengendalian SDI - DKP Kab. Selayar	-	AHU-45.AH.09.01 Tahun
14	Andi Jaelani,SP NIP 19671125 199803 1 006	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Selayar	-	C-52.HN.05.01 TAHUN 2005
15	Dr. Ir Marjani Sultan, M.Si NIP 19611012 198703 1 013	Kadis DKP Kab. Selayar	-	AHU- 45.AH.09.01
16	Abdul Rachman SE,S.Sos NIP .19610807 200003 1 003	Kasi Konservasi SD Perairan-DKP Kab. Bone	-	AHU-70.AH.09.01/20 Tahun 2010
17	Muh. Ibrahim, S.Sos NIP .19630702 199403 1 010	Kasi Pengawasan & Pengendalian SDKP-DKP Kab. Barru	-	C-7 PW 07.03
18	Fatahillah, S.Pi, MM NIP 19630113 18603 1 016	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo	-	C-61.HN.05.01
19	Muh. Nur, A.Md NIP 1962123 198703 1 184	Kasi Pengawasan Pesisir & Laut DKP Kota Palopo	-	C-52.HN.05.01

Lampiran 17 .Data SDM Pengawas Perikanan yang berkedudukan di UPT Pusat (Pos PSDKP Kab/Kota) Sulawesi Selatan Tahun 2016

No.	Nama Pengawas Perikanan	Unit Kerja Penugasan	Unit Kerja Asal
1	2	3	6
1	Renhardi Parantean, SH	UPT Pusat Satker PSDKP Makassar	UPT Pusat Ditjen PSDKP
2	Muh. Kaisyar, S.Pi	UPT Pusat Satker PSDKP Makassar	UPT Pusat Ditjen PSDKP
3	Syamsuddin Nur, S.Pi	UPT Pusat Satker PSDKP Makassar	DKP Sulsel
4	Nursalam, S.Pi.,M.Si	UPT Pusat Satker PSDKP Makassar	DKP Sulsel
5	Burhanuddin, S.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Takalar	UPT Pusat Ditjen PSDKP
6	Inche Hasriawan Rahman	UPT Pusat Pos PSDKP Takalar	UPT Pusat Ditjen PSDKP
7	Sudirman, A.Md.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Takalar	DKP Takalar
8	Fardi B, A.Md.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Takalar	DKP Takalar
9	Mustari, S.Pi	UPT Pusat Pos SDKP Jeneponto	DKP Jeneponto
10	Ibrahim, S.St.Pi	UPT Pusat Pos SDKP Jeneponto	DKP Jeneponto
11	Iqbal M Syam, A.Md.Pi	UPT Pusat Pos SDKP Jeneponto	DKP Jeneponto
12	Taufik, S.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Bulukumba	DKP Bulukumba
13	Syarifuddin Rahim	UPT Pusat Pos PSDKP Bulukumba	DKP Bulukumba
14	Arwan Hidayat	UPT Pusat Pos PSDKP Bulukumba	DKP Bulukumba
15	Syaiful Asri K, S.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Selayar	UPT Pusat Ditjen PSDKP
16	Andi Jaelani, SP	UPT Pusat Pos PSDKP Selayar	DKP Selayar
17	Zul Janwar, S.Kel.,M.Si	UPT Pusat Pos PSDKP Selayar	DKP Selayar
18	Andi Nursam	UPT Pusat Pos PSDKP Selayar	DKP Selayar
19	Nur Alam Nasra, S.T	UPT Pusat Pos PSDKP Sinjai	DKP Sinjai
20	Amal Ahsan, Amd. Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Sinjai	DKP Sinjai
21	Andi Nurhidayat, Amd.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Sinjai	DKP Sinjai
22	Muh. Adhar, S.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Bone	UPT Pusat Ditjen PSDKP
23	Andi Muliani A.M, S.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Bone	DKP Bone
24	Nuryamin, S.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Bone	DKP Bone
25	Syamsuddin Rata, S.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Pangkep	DKP Pangkep
26	Murtini, Amd.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Pangkep	DKP Pangkep
27	Hj, Mardianawati, S.Pi.,M.Si	UPT Pusat Pos PSDKP Pare	DKP Pare
28	Iswahyudin, S.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Pare	DKP Pare
29	A. Abdilah	UPT Pusat Pos PSDKP Pare	DKP Pare
30	Mustadir, S.Pi	UPT Pusat Pos PSDKP Palopo	UPT Pusat Ditjen PSDKP
31	Rasyid S, AN	UPT Pusat Pos PSDKP Palopo	DKP Palopo
32	Rizal Angge	UPT Pusat Pos PSDKP Palopo	DKP Palopo

Lampiran 18. Produksi Benih dan Jumlah Induk pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Payar La'joa Soppeng Tahun 2016

I. PRODUKSI BENIH

Produksi benih ikan yang dihasilkan selama tahun 2016 sebanyak 5.304.000 Ekor berukuran 1 – 3 cm, dengan perincian sebagai berikut :

- Ikan Mas : 3.902.500 Ekor
- Ikan Nila : 1.401.500 Ekor

II. JUMLAH INDUK DAN ASAL

No	Jenis	Jumlah	Asal
1	Ikan Mas - Jantan - Betina	200 Ekor 115 ekor 85 ekor	Sukabumi
2	Ikan Nila - Jantan - Betina	630 Ekor 230 ekor 400 ekor	Sukabumi
	Total Induk Ikan	830 Ekor	

III. CALON INDUK DAN ASAL

No	Jenis	Jumlah	Asal
1	Ikan Mas - Jantan - Betina	250 Ekor 150 Ekor 100 Ekor	Manado
2	Ikan Nila	2 Paket	Jawa Barat
	Total Calon Induk Ikan	250 Ekor, 2 Paket	

Lampiran 19. Data Produksi Pembenihan Udang Windu pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai Tahun 2016

A. Data Produksi selama tahun 2016 persiklus Perbenihan Udang Vannamei dan Udang Windu

➤ Siklus I Mei 2016

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	100.000	Vannamei	30	3.000.000	H. Udu	Pangkep
2	100.000	Vannamei	30	3.000.000	H. Muhida	Malili
3	100.000	Vannamei	30	3.000.000	Syukur	Pangkep
4	100.000	Vannamei	30	3.000.000	Latif	Pare-Pare
5	100.000	Vannamei	30	3.000.000	Muis	Pare-Pare
6	167.000	Vannamei	30	5.010.000	Adi	Pare-Pare

➤ Siklus II Juni 2016

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	150.000	Vannamei	30	4.500.000	Latif	Pare-Pare
2	150.000	Vannamei	30	4.500.000	Muis	Pare-Pare
3	84.000	Vannamei	30	2.520.000	Tunrung	Pinrang
4	100.000	Vannamei	30	3.000.000	Syukur	Pangkep
5	100.000	Vannamei	30	3.000.000	Muis	Pare-Pare

➤ Siklus III November 2016

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	150.000	Windu	25	3.750.000	H. Sudirman	Pinrang
2	100.000	Windu	25	2.500.000	Suke	Barro
3	150.000	Windu	25	3.750.000	A.Pawan	Pinrang
4	150.000	Windu	25	3.750.000	H. Syarifuddin	Pangkep
5	50.000	Windu	25	1.250.000	A.Rahmat	Pinrang

➤ Siklus IV Desember 2016

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	328.400	Windu	25	8.210.000	H. Sudirman	Pinrang
2	328.400	Windu	25	8.210.000	H.Mursida	Pangkep
3	328.400	Windu	25	8.210.000	Tunrung	Pinrang

B. Data Produksi Budidaya Tambak Tahun 2016

Panen Udang Vannamei pada tambak percontohan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai TA. 2016 diBacukiki Pare – Pare dan Palanro dengan rincian sebagai berikut :

Siklus I

- Petak I : 140 Kg (Tanpa Size)
- Petak II : 110 Kg (Size 200/Kg)
- Petak III : 100 Kg (Size 200/kg)
- Jumlah : 350 Kg**

Dari hasil tersebut setelah terjual, nilai total sebesar Rp. 9.800.000

Adapun rincian dari total penjualan adalah sebagai berikut :

1. Pembagian ke petani 40 : 60 %
2. Pembayaran PAD
 - Rp. 9.800.000 x 40 % = Rp. 3.920.000
 - PAD = Rp. 5.880.000

Siklus II

- Petak I : 210 Kg (Size 150 ekor/Kg)
- Petak II : 150 Kg (Size 150 ekor/Kg)
- Petak III : 200 Kg (Size 150 ekor/Kg)
- Jumlah : 560 Kg**

Dari hasil tersebut setelah terjual, nilai total sebesar Rp. 16.800.000

Adapun rincian dari total penjualan adalah sebagai berikut :

1. Pembagian ke petani 40 : 60 %
2. Pembayaran PAD
 - Rp. 16.800.000 x 40 % = Rp. 6.720.000
 - PAD = Rp. 10.080.000
- Hasil penjualan Induk Udang Windu
 - 35,5 Kg x Rp. 60.000 = Rp. 2.130.000

C. Data Produksi Keramba Jaring Apung Tahun 2016

No	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Ikan Baronang	100	20.000	2.000.000
2	Ikan Baronang	200	20.000	4.000.000
3	Ikan Bandeng	50	10.000	500.000
Total		350		6.500.000

Lampiran 20. Daftar Unit Pengolahan Ikan/ Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
1	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N. 4-BI Makassar Telp (0411) 513378 Fax (0411) 513373	Frozen cooked shrimp Frozen Breaded shrimp Frozen Raw Shrimp
2	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. Kima Raya I Kav. D-1b, Makassar Telp (0411) 514515, 514782 Fax (0411) 515430	Frozen Shrimp Frozen cooked shrimp
3	CV. Bone Agung Mina Persada	Jl. Wiyatamandala Kel. Lonrae Timur. Telp(0481)26555 Fax (0418) 26776 081 355 087 788	Frozen Shrimp Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Chepalopods
4	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima raya I Blok D-2B Telp(0411) 514515, 514782 Fax (0411) 515430 085 255 103 877	Frozen cooked shrimp Frozen Raw Shrimp Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods Frozen Tuna (loin, steak) Frozen Farm Raised Fish (lele) Dried Flying Fish Roe
5	PT. South Suco	Jl. Kima VI Blok G/IV B Telp(0411) 510201, 510215 Fax (0411) 510049	Frozen Shrimp
6	PT. Wahyu Pradana BM	Jl. Kima raya I Blok D No. 2C Telp(0411) 4720895, 870760 (0411) 6191011	Frozen shrimp Dried flying fish roe Frozen Demersal Fish Frozen Chepalopods Fresh Tuna Frozen Tuna Frozen Cookedshrimp
7	CV. Prima Indo Tuna	Jl. Ir. Sutami No. 32 0811442826	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen Demersal Fish
8	PT. Sinar Graha	Jl. Sultan Abdullah No. 59 0816256106 (0411) 6074710 (Johan)/085 342 536 1093 081 356 152 866 (Indri)	Frozen Pelagic Fish Frozen Slipper Lobster Frozen Octopus Frozen Fish Fillet
9	PT. Perikanan Nusantara	Jl. Sabutung I No.1. Telp.)411-21625	Frz Demersal & Pelagic Fish Frozen Chepalopods
10	PT. Prima Bahari Inti lestari	Jl. Kima 12 Kav. 5C Telp (0411) 512688 Fax (0411) 514163	Fresh tuna, Frozen Tuna Fresh chepalopods Frozen Chepalopods Fresh fillet fish Frozen Chepalopods Fresh fish Frozen Demersal Fish Frozen Boneless Milkfish

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
11	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K. 9/B2 Telp (0441) 515555 Jl.Kima 4 Kav.P-28,Makassar	Fresh tuna Frozen tuna Ikan Demersal Beku Ikan Demersal Segar
12	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamellang No. 42 kel. Bojo baru Kec. Mallusetasin Kab. Barru Fax (0411) 21105 Telp (0411) 21625	Chilled pasteurized crab meet Frozen Pasteurized crabmeat Can Frozen demersal fish Ikan Scombroid Beku
13	CV.Ome tradingcoy	Jl. Poros kanjilo gowa 085243020588 Fax (0411) 8216946 085 243 020 588, 081 355 468 790	Hana katsuobushi
14	PT. Donglim Jireh	Komp kima square blok B. 1-2, 0816251276	Dried Flying Fish Roe
15	PT. Dunia Marine Product	Jl. Kima 3 Kav. 4b Telp (0411) 512619 Fax (0411) 512625,081241629172	Dried flying fish roe Frozen Shrimp FrzCephalopods, Teripang krg
16	PT. Kawa Guti	Jl. Tool lama no.22 Telp (0411) 512615 Fax (0411) 514826	Frozen flying fish roe (Dried Flying Fish Roe)
17	PT. Omeresso food	Jl. Poros Kanjilo, Barombong Gowa 085243020588	Katsuo Powder Hana Katsuo
18	CV. Makassar jaya	Jl. Batara bira 6 Komp. PU No. 13 081524424900	Dried sea cucumber
19	PT. Multi Sari Makassar	Jl. Kima 14 Kav. SS 12 Telp (0411)4723232 085 342 729 113	Fresh Demersal Fish Frozen Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Pelagic Fish Frozen chepalopods Fresh chepalopods Frozen Tuna, Fresh Tuna Frozen Shrimp, Fresh Shrimp
20	PT. Parlevliet Paraba	Jln. Jembatan Tua No.89 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros 0812 4219 685 Telp(0411)5439100, fax(0411)550623	Fresh Tuna & Frozen Tuna Fresh Pelagic, & Frz. Pelagic Fresh & Frz. Demersal Fish Fresh Cephalopods
21	PT. Kemilau Bintang timur	Jl. Kima 3 Kav. 2A Telp (0411) 512808, 512828 Fax (0411) 513000 082 193 088 277	Frozen Crabmeat Frozen Pasteurized crabmeat Frozen Raw shrimp Frozen chepalopods Fresh Pelagis Fish Frozen Pelagis Fish Fresh Demersal fissh Frozen Demersal fissh Fresh Farm Raised Fish Frozen Farm Raised Fish

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
22	CV. Usaha Centra Jaya Sakti	Jl. Kima V Kav. E No.31 Telp (0411) 514781 Fax (0411) 514781, 3619169 0811 416 889	Frozen octopus frozen tuna & fresh Tuna Fresh demersal fish Frozen Demersal Fish Fresh Milk Fish
23	UD Resky Bahari	Jl. Perintis kemerdekaan km. 19 Telp (0411) 5787951, fax 4813721 081 385 139 566 (Kasman) 081 397 222 534 (Lena)	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish
24	CV. Jaya Indah Cemerlang	Jl. Buru No. 47 Telp (0411) 6077171 081 342 540 495 (Frans)	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Dried Shark Fin Sea Cucumber
25	PT. Global Seafood International Indonesia	Jl. Poros Bantaeng, Bulukumba Km. 131 Ds. Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng Telp (0413) 2424828 Fax(0413) 2424873 085 256 245 392 (Fandi)	Frozen Surimi
26	PT. Ocean Cham Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Telp(0411) 514827, 510866 Fax (0411) 510686	Pateurized Canned Crab meat
27	PT. Kelola Mina laut	Jl. Kima 17 Blok DD-15-16, Makassar 085242009787 Fax (0411) 4723256	Frozen demersal fish Frozen pelagic fish Frozen cephalopods
28	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 Ruko No. 5 Telp(0411) 510666, 513518 Fax(0411) 511666	Produk kering (Dried Sea Cucumber, sirip Ikan, Perut Ikan, abalone dan rumput laut)
29	CV. Hokky Seafood	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 17 Telp(0411) 48136251, 434018,5030822 Fax (0411)420618	Live Crab Fresh Tuna Fresh Demersal&Pelagic Fish
30	CV. Anugerah Sejati	Jl. Metro Tanjung Bunga A.33 Ruko Somba Opu (0411) 8113919	Dried Flying Fish Roe
31	CV. Udin Jaya	Jl. Komp Perumahan Nusa Indah mas	Frozen pelagic Fish Live fish
32	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinranae No. 1, Bulu-Bulu Kec. Marusu Kab. Maros 081355689123, 081355105171 (Surya) Fax (0411) 555 386	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh hrimp Live Fish
33	PT. Anugerah Bintang Cemerlang	Jl. Bambu runcing No. 99 081343512389	Fresh&Frozen Tuna
34	PT. Nusa Dwipa Citra Tunggal	Jl. Kima VII Blok J. N. 4 Telp (0411)514514,513555 081 342 089 182	Frozen Fish
35	PT. Wahyu Putra BimaSakti	Jl. Kima 10 T-2B Makassar	Carrageenan Chip
36	UD. Atops	Jl. Bahagia No. 2 Telp (0411) 556581 Fax (0411) 556582	Dried flying Fis Roe

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
37	CV. Inti Makmur	Jl. Kima 6 Blok F1/A2 telp (0411) 514242, Fax (0411)514338	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen demersal Fish Frozen Chepalopods Fresh & Frozen Shrimp
38	PT. Mitra Sejahtera Makassar	Jl. Ir. Sutami Blok G2 No.11 (0411) 2606099	Rumput Laut
39	UD. Delton	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Blok C No. 11 Makassar SulSel	Rumput laut Kering
40	CV. Sentosa Bimantara Laut	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Sulawesi Blok C No. 10 makassar SulSel	Rumput laut Kering
41	PT. Giwang Citra Laut	Poros Pabrik Gula Takalar Km 1,5 Ds.Pa'ra'punganta.polombangkeng Utara.Kab. Talakar	carrageenan Chips Semi Refined Carrageenan
42	Koperasi Agroniaga	JL. BAKAU NO. 66, KOTA PALOPO Fax (0471) 832513, 0812 4214 301	Dried Seaweed
43	PT. Sumberguna Makassar Nusa	Jl. Ujung Pandang Baru No.17 Makassar	Dried Seaweed
44	PT. Rapid Niaga International	Jl. Ir. Sutami Blok L.5, Makassar	Dried Seaweed
45	CV. Putri Jaya	Kawasan Pergudangan Parang Loe Indah Telp. 085399127997, 081141048815	Dried Seaweed
46	CV. Adi Tirta	Jl. Sabutung No. 123 Makassar (0411) 452782, 45282	Dried Seaweed
47	CV. Benur Rahma	Jl. Tala-Tala Ds. Pattinong, Kec. Galesong Takalar. Telp. 085343822833, (0411) 82326564	Dried Flying fish roe
48	PT. Rika Rayhan	Jl. Kima 4 Kav.P3A, Makassar	Dried Seaweed
49	UD. Centralindo Agar Utama	Gudang Parangloe Indah Blok E No. 10 Makassar Telp.(0411) 5774648,	Dried Seaweed
50	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A.Mks	Dried Seaweed
51	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Pemuda Pantai Salu Songka Kec. Wara Timur, Kota Palopo.	Dried Seaweed
52	CV. Pelita	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A Mks	Dried Seaweed
53	UD. Baharu	Komplek Pergudangan lantebung Jl.Ir. Sutami Blok A.12 No.5 Makassar	Dried Seaweed
54	CV. Agro Mina Dewata	Jl. Sungai Saddang Baru N0.9A, Makassar	Fresh Demersal Fish
55	PT. Bantimurung Indah	Jl. Sam Ratulangi No. 163, Maros.	carrageenan Chips Semi Refined Carrageenan
56	PT. Biru Laut Nusantara	Jl. Kima VIII Kav. SS No.23A Kima, Makassa	Frozen Tuna
57	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima 3 Kav.5 Makassar	Daging Rajungan Kaleng Past

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
58	PT. Mitra Timur Nusantara	Jl. Sultan Abdullah Raya Lrg.3 No. 9 Makassar Fax (0411) 428228 081 2413 3739	Ikan Demersal Beku Ikan Pelagis Beku Cephalopoda Beku Tuna Beku
59	PT. Mina Timur Indonesia	Jl.ABD.Kudus barombong kec. Tamalate, Makassar. Telp (0411) 2122637 081 241 333 359 (Sri)	Telur ikan terbang kering.
60	PT. Sentosa Sumber galesong	Komps.Graha Satelit Blok A/20 Jl. Sultan Hasanuddin , Sungguminasa Gowa, Makassar.	Telur ikan terbang kering
61	PT. Sinar Laut Nusantara	Ds Cikoang,DesaLakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Fresh Demersal Fish Frozen Demersal Fish Fresh Pelagis Fish Frozen Pelagis Fish Fresh Cephalopods Frozen Cephalopods Fresh&Frozen Lobster Fresh&Frozen Slipper Lobster, Fresh Milkfish Fresh Shrimp
62	PT. Tujuh Samudera Jaya	Jl. Malino Ds. Nirannuang, kec Bontomarannu, Gowa	Frozen Flying Fish Roe
63	PT. Asia Sejahtera Mina	Jl. Ir. Sutami Kawasan Terpadu Logistik Blok A-1 Makassar	Dried Seaweed
64	UKM "88 Marijo"	Jl. Poros Pinrang-Pare,Kel.Manarang (bulu) Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang	Boneless Milkfish
65	PT. Mitra Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No. 38 Blok H2-10, Makassar	Dried Seaweed
66	CV. Eltisyah	Jl. Monumen Emmy Zaelan III Komplek BTN Agraria blok q9/24,Makassar	Fish JELLY Product
67	PT. Karya Jaya Mandiri	Jl. Prof.Ir. Sutami no.15A, Makassar	Dried Seaweed
68	PT. Goh Fadel Buana	Jl. Poros Makassar-Maros no. 126 Ballu- Ballu Kel. Taroada, Kec. Turikale, Makassar	Fresh Pelagic Fish Frozen Pelagic Fish fresh Demersal Fish frozen Demersal Fish Frozen Fish Fillet
69	PT. Lintas Antar Nusa	Jl. Poros Kupa , Kec. Mallusetasi, Barru	Ikan Terbang beku
70	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng batu-Batu, Galesong Utara, Kab. Takalar	Frozen Dried Flying fish roe
71	PT. Anugerah Gemilang sukses sedayu	Jl.Poros Macoppa Maros Km.26. No.44 Kab.Maros	Dried Seaweed
72	PT. Galesong	Jl. Baso Dg. BellaDesa Kalukuang Galesong Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
73	PT. Prima Global Sukses	Jl. Prof.Dr.Ir.SutamiNo.32A	Ikan Demersal Segar Ikan Demersal beku Fresh Tuna, Frozen Tuna Cephalopoda Beku

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
74	PT. Boddia Jaya	Jl.Karaeng Salamaka, Dusun Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
75	UD. Generasi Baru	Jl. Andi Malla Poros pattiro Bajo. Kel. Biru kec. Tanete Riattang, Bone sulsel	Bandeng asap Bandeng duri lunak & tanpa duri
76	PT.Jireh Commodity	Jl. Kima Raya 2 Komplek Kima Square warehouse 2 No.11,12,13, Makassar	Dried Flying fish roe Frozen Flying fish roe Teripang Kering Teripang Beku
77	PT. Agarindo	Kab. Bone	Rumput Laut Kering
78	CV. Persada Semesta	Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Rumput Laut Kering
79	PT.Sinar Laut Nusantara	Jl.Kima 4.Kav.P-3B, Makassar	Ikan Demersal Segar Ikan Demersal beku Ikan Pelagis segar Ikan Pelagis Beku Udang segar Udang Beku Cephalopoda segar Cephalopoda Beku Udang Kipas Segar Udang Ikan Beku Tuna Segar Tuna Beku
80	Cv. Indah sari	Jl. Dg. Tata IV. Griya Tata Asri Blok E 13 A Takalar	Dried Flying fish roe

Sumber : Kasie Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Lampiran 21. Kegiatan Monitoring Formalin Tahun 2016

➤ Kota Makassar

No	Lokasi/Kab/TPI/PPI/Pasar	Nama Sampel	Hasil Uji
1	PPI Paotere	Bandeng	0 ppm
		Katombo	0,4 ppm
		Layang	0,4 ppm
		Ikan Merah/Kurisi	0 ppm
		Udang Putih	0 ppm
		Udang Hitam	0 ppm
		Cumi-Cumi Super	0 ppm
		Cakalang Hitam/ Biasa	0,4 ppm
		Cakalang	0 ppm
		Sinrili/Sunglir Merah	0 ppm
		Sinrili/Sunglir Hijau	0 ppm
		Banyara/Kembung	0,4 ppm
2	TPI Rajawali	Ikan Bete – Bete	0 ppm
		Ikan Katamba	0 ppm
		Ikan Merah	0 ppm
		Ikan Kembung	0 ppm
		Ikan Layang	0 ppm
		Ikan Kakap Putih (Kering)	0 ppm
		Ikana Kerapu (Kering)	0,6 ppm
		Ikan Cakalang	0 ppm
3	Pasar Toddopuli	Ikan Selar	0 ppm
		Ikan Kembung	0 ppm
		Ikan Baronang	0 ppm
		Ikan Sindrili	0 ppm
		Udang Vannamei	0 ppm
		Ikan Tembang	0 ppm
		Teri Kering	0,4 ppm
		Layang	0 ppm
		Cumi - Cumi	0 ppm
4	Pasar Daya	Ikan Layang	0,4 ppm
		Ikan Baronang	0 ppm
		Teri Kering	0 ppm
		Cumi – Cumi	0 ppm
		Ikan Katamba	0 ppm
		Ikan Merah	0 ppm
		Ikan Kembung	0 ppm
		Ikan Kakap Putih (Kering)	0 ppm
		Ikana Kerapu (Kering)	0 ppm
		Ikan Cakalang	0 ppm

➤ Kabupaten/Kota

No	Lokasi/Kab/TPI/PPI/Pasar	Nama Sampel	Hasil Uji
1	Pasar Andi Tadda TPI Palopo Kota Palopo	Ikan Cakalang	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Layang	0 ppm
			0 ppm
		Udang	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Kembung	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Welado	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Katamba	0 ppm
2	Pasar Mattirowalie Pasar Palanro Kab. Barru		0 ppm
		Ikan Cakalang	0,4 ppm
			0,4 ppm
		Cumi – Cumi	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Katamba Kering	0,6 ppm
			0,6 ppm
		Ikan Baronang	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Layang	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Kembung	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Kakap Merah	0 ppm
			0 ppm
3	Pasar Sentral Pinrang	Udang Laut	0 ppm
			0 ppm
		Kerang	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Cepa	0 ppm
		Ikan Katamba	0 ppm
		Ebi	0 ppm
		Ikan Bete – Bete	0 ppm
		Ikan Teri Kering	1,5 ppm
		Udang	0 ppm
		Ikan Layang	0 ppm
4	Pasar Karisa Kab. Jeneponto	Ikan Kerapu Kering	0 ppm
		Ikan Teri Kering Ujung Leru	0,6 ppm
		Ikan Terbang Kering	0,6 ppm
		Ikan Layang	0 ppm
		Ikan Cakalang	0 ppm
		Ikan Kembung	0 ppm
		Ikan Bandeng	0 ppm
			0 ppm
		Ikan Cepa	0 ppm
			0 ppm
			0 ppm

Lanjutan.....

5	Pasar Sentral Makale	Ikan Kerapu	0 ppm
		Ikan Teri Kering	0 ppm
		Ikan Sunu Kering	0 ppm
		Ikan Bungo Kering	1,5 ppm
		Ikan Cakalang Besar Kering	0,6 ppm
		Ikan Mujair Kering	0,6 ppm
		Lure Bugis Kering	0,6 ppm
		Karallo Kering	0,6 ppm
		Carede Kering	0,6 ppm
		Lure Kering	0,6 ppm
		Borgo Kering	3,6 ppm
		Udang Kering	2,4 ppm

Sumber : UPTD Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

